



I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang menyatakan Laporan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, sedangkan Perangkat Daerah (PD) sebagai entitas akuntabilitas wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang memuat informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat dengan LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas baik kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan. Laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode tahun anggaran 2025 dan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan perubahan posisi keuangan selama pelaksanaan APBD tahun 2025.

Kabupaten Katingan merupakan salah satu unit pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola, dan berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan;
24. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
25. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
- 2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



- 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 3.1.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
 - 3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - 3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 3.1.4 Indikator Kemiskinan
 - 3.1.5 Gini Ratio (Koefisien Gini)
 - 3.1.6 Laju Inflasi
 - 3.1.7 Pertumbuhan Ekonomi
- 3.2 Kebijakan Keuangan
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah
- 3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
 - 5.4.2 Beban dari kegiatan operasional
 - 5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO
 - 5.4.4 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

- 5.4.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.7 Pos Luar Biasa
- 5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
- 5.4.9 Surplus/defisit-LO
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.5 Saldo Awal Kas
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1 Ekuitas awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2025
 - 6.2.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan
- 6.2 Barang Ekstrakomptabel (*Extracomptable*)
- 6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
 - 6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02
- 6.4 Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 s.d Semester I 2025

VII Penutup



II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa Ibu kota Kabupaten Katingan berkedudukan di Kasongan. Kabupaten Katingan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:

1. Kecamatan Katingan Hulu;
2. Kecamatan Marikit;
3. Kecamatan Sanaman Mantikei;
4. Kecamatan Katingan Tengah;
5. Kecamatan Pulau Malan;
6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
7. Kecamatan Katingan Hilir;
8. Kecamatan Tasik Payawan;
9. Kecamatan Kamipang;
10. Kecamatan Petak Malai;
11. Kecamatan Bukit Raya
12. Kecamatan Mendawai; dan
13. Kecamatan Katingan Kuala.

Kabupaten Katingan mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, serta Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau; dan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa, dan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Katingan terdiri atas 39 Perangkat Daerah (PD) sebagaimana berikut :

1. Dinas Pendidikan



Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

6. Dinas Perhubungan dan Perikanan.

Dinas Perhubungan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Perikanan.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian



Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

19. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

20. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelola pajak dan retribusi daerah dan dana transfer.

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.

24. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan.



25. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan.

26. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat menyelenggarakan fungsi pengawasan.

27. 13 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah.

28. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan serta serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Namun, semenjak pembentukan wilayah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas administrasi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.396,76 km².

Secara keseluruhan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya. Ketiga belas kecamatan tersebut terhambat dari Selatan ke Utara, dimana Kecamatan Katingan Kuala memiliki jarak terjauh ke ibukota Kabupaten yakni sejauh 365 km. Kabupaten ini dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang ±650 km dengan banyak anak sungainya. dan terdapat 49 desa/kelurahan yang terletak pada lereng dan 112 desa/kelurahan yang terletak pada dataran menurut topologi wilayahnya.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai sosial ekonomi masyarakat, dan ada beberapa indikator yang menggambarkan capaian kerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Indikator-indikator yang digunakan sebagai parameter kesejahteraan rakyatnya adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- d. Indikator Kemiskinan
- e. Gini Ratio (Koefisien Gini)
- f. Laju Inflasi
- g. Pertumbuhan Ekonomi.

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur Panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek (kemampuan membaca dan menulis) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu model manusia dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel mengenai Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang diperoleh dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya yang menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan di setiap tahunnya jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Katingan pada tahun 2025 sebesar 74,39 persen mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen dari tahun 2024 sebelumnya sebesar 73,90 persen.

Tabel 3.1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Kotawaringin Barat	74,15	74,39	74,92	74,44	73,53
Kotawaringin Timur	73,25	73,45	73,99	72,66	74,61
Kapuas	71,34	71,72	72,40	71,32	73,02
Barito Selatan	73,05	73,45	74,01	72,36	73,00
Barito Utara	71,64	72,16	72,71	72,31	73,75
Sukamara	69,04	69,28	69,86	70,35	74,75
Lamandau	72,21	72,28	72,81	73,44	74,01
Seruyan	69,22	69,31	69,81	70,24	73,59
Katingan	72,45	72,66	73,43	73,90	74,39
Pulang Pisau	70,57	70,65	71,05	71,62	73,62
Gunung Mas	72,00	72,22	72,50	73,18	73,97
Barito Timur	73,09	73,17	73,69	74,21	72,48
Murung Raya	69,54	69,67	70,13	70,91	73,73
Kota/Municipality					



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Palangka Raya	81,17	81,22	81,47	81,95	74,92
Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73	74,01

Sumber/ Source : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/ Based On Census, Surveys, and Others Sources

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara lebih rinci, PDRB Kabupaten Katingan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2
PDRB Kabupaten Katingan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku
Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.489,55	2.622,51	2.867,01	3.117,01	3.521,02
Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	361,16	418,23	372,22	403,15	455,08
Industri Pengolahan/Manufacturing	1.506,96	1.696,39	1.743,59	1.835,32	2.078,77
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	2,74	3,00	3,37	3,71	3,96
Pengadaan Air, Pengelolaan	4,70	4,89	5,27	5,52	5,55



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**	2025**
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities					
Konstruksi/Const ruction	1.089,89	1.247,40	1.366,98	1.487,85	1.539,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	663,11	759,79	851,35	925,58	1.007,45
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storag	737,46	829,68	936,30	1.026,90	1.113,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Acomm odation and Food Service Activities	204,52	220,65	244,11	272,97	300,40
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	82,85	95,89	105,91	113,56	119,58
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	120,03	130,22	143,82	156,12	168,61
Real Estat/Real Estate Activities	221,87	259,67	274,38	303,33	323,49
Jasa Perusahaan/ Business Activities	1,15	1,29	1,52	1,67	1,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	562,74	609,07	660,72	718,40	700,97



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**	2025**
Jasa Pendidikan/ Education	513,78	557,94	612,50	690,35	736,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	290,59	312,75	347,58	381,30	415,88
Jasa lainnya/Other Services Activities	187,77	196,23	216,77	228,48	253,51
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	9.040,86	9.965,59	10.753,40	11.671,21	12.745,77

Sumber data : BPS Katingan Dalam Angka 2026

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep angkatan kerja menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan sebagian penduduk menjadi angkatan kerja, antara lain karena faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor psikologis. Dengan terdapatnya perkembangan sosial ekonomi maka kondisi angkatan kerja juga berkembang dengan berbagai variasinya, yang akhirnya akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Katingan tahun 2025 sebesar Rp.3.561.258,83 mengalami kenaikan dibandingkan UMK Katingan tahun 2024 sebesar Rp3.343.905,00. Secara umum, semakin tinggi golongan umur, maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2025 mencapai 87.903 orang yang menunjukan tren meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan jumlah angkatan kerja pada 2023 yang mencapai 80.066 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lain yang juga sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

menggunakan pendekatan jam kerja. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Kabupaten Katingan 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada tahun 2025 mencapai 4,59 persen mengalami penurunan 0,29 persen dibandingkan TPT tahun 2024 yang sebesar 4,88 persen. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 sebesar 68,11 persen, atau meningkat 0,48 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 67,63 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari sebelumnya, kondisi ini disinyalir terjadinya penurunan angkatan kerja baru yang terserap oleh lapangan kerja misalnya lulusan SMA/SMK, Diploma/Sarjana yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan langsung terjun dalam bursa angkatan kerja.

Tabel 3.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Katingan,
Tahun 2023 – 2025

Indikator	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ <i>rate of Labour Force Participation</i>	62,42	67,63	68,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Rate of Open Unemployment</i>	4,96	4,88	4,59

Sumber : Data Sakernas 2023 - 2025 (diolah)

3.1.4 Indikator Kemiskinan

Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat suatu wilayah dapat diukur dari berbagai indikator, yang *pertama* tingkat kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan pada tahun 2025 cenderung meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Katingan pertahunnya. Data ini diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2025*, *BPS-Statistics Indonesia*.

Tabel 3.1.4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ <i>Regency</i>					
1. Kotawaringin Barat	12,29	12,44	13,44	13,43	14,18
2. Kotawaringin Timur	27,06	27,56	26,57	26,69	27,70
3. Kapuas	19,45	20,18	19,19	19,47	20,43
4. Barito Selatan	6,42	6,83	6,66	6,87	7,09
5. Barito Utara	7,40	7,70	7,14	7,60	7,44
6. Sukamara	2,38	2,48	2,71	2,90	2,87
7. Lamandau	2,92	2,78	2,63	2,79	2,89



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Seruyan	15,07	15,96	15,71	16,06	15,64
9. Katingan	9,15	9,71	8,95	9,55	9,75
10. Pulang Pisau	5,43	6,04	5,92	5,91	6,23
11. Gunung Mas	6,29	6,70	6,55	6,86	6,67
12. Barito Timur	8,02	8,42	8,59	8,74	8,12
13. Murung Raya	7,31	7,69	7,81	8,05	7,64
Kota/ Municipality					
Palangka Raya	10,86	10,62	10,31	10,70	11,16
Kalimantan Tengah	140,05	145,11	142,18	145,63	147,80

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)2024, BPS/ National Socioeconomic Survey 2025, BPS- Statistics Indonesia

Selain tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan, permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedang indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 9,55 ribu jiwa (5,26 persen), dan pada tahun 2025 bertambah menjadi 9,75 ribu jiwa (5,75 persen), dibandingkan tahun sebelumnya persentase tersebut mengalami peningkatan.

3.1.5 Gini Ratio (koefisien Gini)

Indikator *kedua* yang mempengaruhi kesejahteraan adalah gini ratio. Gini ratio merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk dengan skala 0 s.d 1. Kondisi selama tahun 2025 gini ratio Kabupaten Katingan naik dari 0,253 persen menjadi 0,278 persen mengalami kenaikan sebesar 0,531 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan gini ratio ini dimungkinkan karena terjadinya kenaikan pengeluaran daya beli masyarakat terutama menengah keatas Berikut kondisi gini ratio berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenans) 2025, BPS/National Socioeconomic Survey 2025, BPS-Statistics Indonesia.

Tabel 3.1.5
Jumlah Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2023 – 2025

Komponen Pengeluaran	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/ Regency			
1. Kotawaringin Barat	0,335	0,303	0,277
2. Kotawaringin Timur	0,290	0,304	0,268
3. Kapuas	0,305	0,309	0,287
4. Barito Selatan	0,289	0,284	0,288
5. Barito Utara	0,323	0,269	0,328
6. Sukamara	0,287	0,289	0,25
7. Lamandau	0,333	0,278	0,295
8. Seruyan	0,261	0,222	0,237
9. Katingan	0,261	0,253	0,278
10. Pulang Pisau	0,280	0,255	0,289
11. Gunung Mas	0,309	0,255	0,235
12. Barito Timur	0,331	0,299	0,318
13. Murung Raya	0,261	0,258	0,259



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Komponen Pengeluaran	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota/ Municipality Palangka Raya	0,312	0,309	0,309
Kalimantan Tengah	0,362	0,383	0,298

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, BPS/ National Socioeconomic Survey 2025, BPS- Statistics Indonesia

3.1.6 Laju Inflasi

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, inflasi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) merujuk ke Kabupaten Kuala Kapuas yang tercatat (3,25 persen), inflasi Kalimantan Tengah menjadi fokus utama pemerintah daerah secara umum pada tahun 2025 terjaga di angka (3,13 persen) dalam rentang target nasional, mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH). ini menunjukkan kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah yang berjalan menuju pemulihan ke arah normal. Inflasi tahunan atau inflasi *year-on-year* ini disebabkan oleh tekanan harga pada komoditas pokok tetap memberikan tantangan nyata bagi daya beli masyarakat setempat. Berikut pemicu utama inflasi tahun 2025 berdasarkan tren :

1. Pemicu utama inflasi di Kabupaten Katingan.

Berdasarkan tren tahun 2025, inflasi di wilayah ini didominasi oleh kelompok **Makanan, Minuman, dan tembakau**. Beberapa komoditas yang sering menjadi penyebab utama kenaikan harga meliputi:

- Hortikultura:** harga bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sering mengalami fluktuasi tajam, terutama saat pasokan dari luar daerah terhambat.
- Protein Hewani:** Daging ayam ras dan telur ayam ras setempat mengalami tekanan harga di pertengahan tahun akibat kenaikan biaya pakan dan distribusi.
- Faktor Musiman:** Kenaikan harga rutin terjadi menjelang hari besar keagamaan dan akibat gangguan cuaca yang menghambat distribusi logistik ke wilayah pelosok katingan.

2. Upaya Penanganan: Strategi 4K

Pemerintah Kabupaten Katingan merespon tekanan ini dengan menerapkan strategi **4K** yaitu:

- Keterjangkauan Harga:** Melaksanakan **Operasi Pasar Murah (OPM)** dan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** secara berkala untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
- Ketersediaan Pasokan:** Mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang menanam kebutuhan pokok seperti cabai, sayur mayur (ketahanan pangan mandiri).



- c. **Kelancaran Distribusi:** Memperkuat kerjasama antar daerah untuk memastikan stok pangan tetap mengalir masuk ke katingan.
- d. **Komunikasi Efektif:** Memantau harga pasar secara *real-time* untuk mencegah spekulasi harga oleh pedagang nakal.

3. Kebijakan Bantuan Sosial

Untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak kenaikan harga, Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2025 menyalurkan **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** Inflasi.

- a. Target : warga di kecamatan yang terpencil (seperti Katingan Hulu).
- b. Tujuan : menjaga agar daya beli masyarakat pedesaan tidak anjlok meski harga barang pasar meningkat.

Sedangkan inflasi Kabupaten Katingan sesuai dengan arahan Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah menjaga stabilitas agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat. inflasi yang terkendali akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat. Inflasi harus kita kendalikan bersama, pemerintah daerah berperan penting terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan distribusi.

Secara angka, katingan berhasil menghindari *hyperinflation*, namun tantangan distribusi logistik dan tergantung pada pasokan pangan luar daerah menjadi “pekerja rumah” yang besar. Inflasi di katingan pada 2025 adalah cerita tentang perjuangan menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat di tengah ketidakpastian iklim dan ekonomi global.

Namun sejak Desember 2024 sampai sekarang menunjukkan tren perbaikan, yang juga menunjukkan sinyal ekonomi membaik.

3.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar



harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami tumbuh positif dari tahun ke tahun Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menggunakan tiga asas pemerintahan, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dimaksud didanai dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Kabupaten Katingan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud dari pembagian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Katingan juga wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut tentu saja harus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, baik dalam hal dukungan anggaran ataupun pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan yang lainnya harus saling mendukung.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berperan penting sebagai landasan hukum dalam mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan tata kelola fiskal yang adil, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyeimbangkan setiap komponen belanja berdasarkan prioritas dan amanat ketentuan yang berlaku. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengatur sumber pendapatan, termasuk pajak dan retribusi, sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

3.1.7.1 Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Manfaat Transfer ke Daerah cukup signifikan dengan adanya penerapan mekanisme Transfer ke Daerah selain dapat mendorong percepatan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD juga dapat meningkatkan efisiensi di semua lini dan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.

Efisiensi tersebut mencakup efisiensi birokrasi yang harus dilalui, efisiensi anggaran dari biaya yang ditimbulkan, SDM yang dibutuhkan lebih minimal, efisiensi waktu lebih cepat karena langsung ditransfer dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), efisiensi Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan efisiensi pelaporan anggaran. Pada tahap selanjutnya, Transfer ke Daerah tersebut mendorong penggunaan satu Rekening Kas Umum Daerah untuk menampung transfer dari APBN dan APBD (*Treasury Single Account*) di daerah serta mempercepat penetapan, pelaksanaan dan penyerapan dana APBD.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.



a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, penyalur DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang bagi hasil meliputi beberapa jenis potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat. Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan adanya Bagi Hasil Pajak dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu sendiri:

- a) Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri;



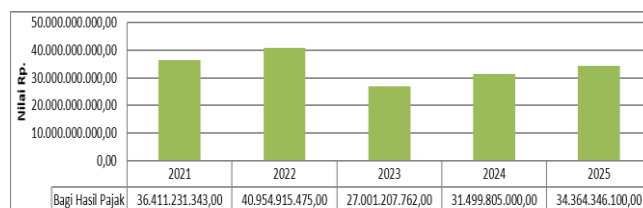
- b) Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun objek dan atau subjek pajaknya berada di daerah;
- c) Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun objek dan atau subjek pajaknya berada di daerah;
- d) Memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah;
- e) Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
- f) Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
- g) Memberikan kompensasi kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagi Hasil Pajak bersumber dari:

- a) Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b) PPh Pasal 21;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk Kabupaten Katingan, Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan pada tahun 2025 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah tersebut terbesar diperoleh jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Gambar 3.1.6
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Katingan
Tahun 2021 – 2025





Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan :

1. Pertambangan Minyak Bumi
2. Pertambangan Gas Bumi
3. Pertambangan Umum
4. Pertambangan Panas Bumi
5. Kehutanan
6. Perikanan.

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam pada Pemerintah Kabupaten Katingan bersumber dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).

Pada tahun 2025 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*), Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, dengan uraian DBH SDA sebagai berikut :

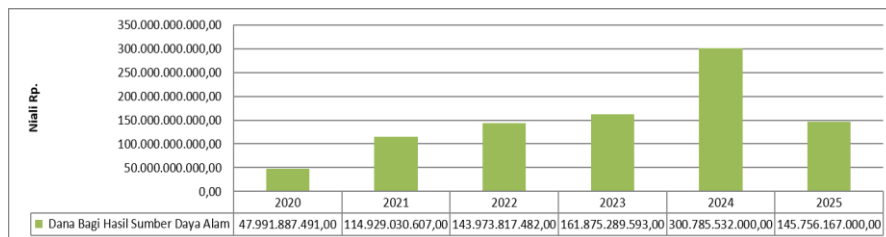
Tabel 3.3.1
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025
DBH Sumber Daya Alam (SDA)		147.546.382.000,00	145.756.167.000,00	98,78
1	DBH SDA Minyak Bumi	5.433.000,00	5.430.000,00	99,94
2	DBH SDA Gas Bumi	56.668.000,00	56.668.000,00	100,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.525.077.000,00	2.525.077.000,00	100,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	137.457.131.000,00	135.666.916.000,00	98,69
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.347.736.000,00	6.347.737.000,00	100,00
6	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	2.000,00	0,00
7	DBH SDA Perikanan	1.154.337.000,00	1.154.337.000,00	100,00



Gambar 3.1.7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025

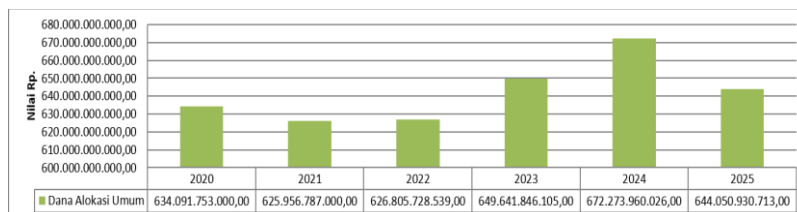


3) Dana Alokasi Umum

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom Provinsi/Kabupaten/Kota di setiap tahunnya. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBD, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan DAU adalah sebagai instrumen untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Untuk itu, berhasil tidaknya alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun. DAU untuk Kabupaten Katingan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada berikut ini:

Gambar 3.1.8
Dana Alokasi Umum Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025



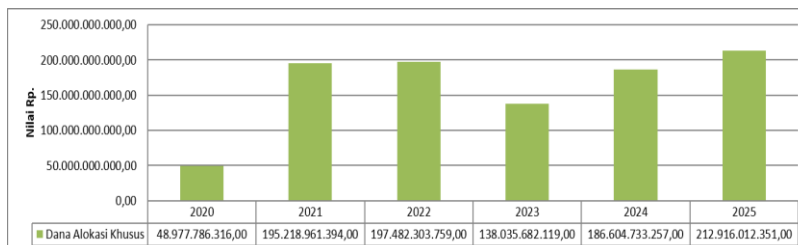
4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Fisik dimana peruntukannya adalah untuk pembangunan wilayah dan Non Fisik yang diperuntukkan untuk membantu operasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada awalnya, DAK yang dialokasikan sejak tahun 2003 hanya dialokasikan untuk 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Saat ini DAK sudah digunakan untuk mendanai



kegiatan khusus pada 11 bidang yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kependudukan, dan kehutanan.

Gambar 3.1.9
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025



Gambar 3.1.9 diatas menggambarkan tentang penerimaan DAK pada Kabupaten Katingan. Pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun 2024.

3.1.7.2 Pinjaman, Obligasi dan Hibah Daerah

1) Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
- b) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit



APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;

- d) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
- e) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
- f) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
- g) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah; dan
- h) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Dengan prinsip tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah seharusnya memiliki visi yang jauh ke depan untuk dapat mengelola potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, mengingat pinjaman daerah mempunyai konsekuensi pada biaya yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*).

Alternatif sumber-sumber pinjaman yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Pinjaman yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam maupun luar negeri;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia; dan
- e) Masyarakat, yaitu berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan waktunya, pinjaman daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan



atau satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

b) Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

c) Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (seperti biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pengaturan tentang pembayaran kembali pinjaman daerah diatur sebagai berikut:

- a) Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b) Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada melakukan pinjaman daerah dalam bentuk apapun.

2) Obligasi Daerah

Obligasi Daerah diartikan sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan khusus dalam kaitannya dengan Obligasi Daerah. Unsur yang pertama adalah, berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah. Untuk melindungi fiskal daerah, Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus terlebih dahulu



mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan. Pada prinsipnya, diharapkan pendapatan yang didapat dari proyek yang dibiayai Obligasi Daerah dapat menutup pokok dan bunga yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, perlu diadakan langkah-langkah penilaian atas proyek yang akan dibiayai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan apakah komponen-komponen dari proyek yang dimaksud di sini telah layak sehingga benar-benar dapat menghasilkan penerimaan.

Unsur yang kedua adalah mengenai penawaran umum Obligasi Daerah di pasar modal. Dalam prakteknya Obligasi Daerah dianggap sebagai efek yang bersifat utang. Jika Obligasi Daerah telah diterbitkan dan telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka Obligasi Daerah telah siap untuk diperjualbelikan di pasar modal. Transaksi jual beli Obligasi Daerah mengikuti mekanisme di pasar modal. Berkaitan dengan hal ini, prosedur yang perlu diikuti telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai Keputusan Kepala Bapepam-LK dan peraturan pasar modal lainnya. Pihak yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal. Prinsip keterbukaan dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai prospek Obligasi Daerah untuk menarik minat investor.

Obligasi Daerah merupakan efek yang bersifat utang, dimana si penerbit obligasi memiliki piutang terhadap pemegang obligasi dan si berutang berkewajiban untuk membayar pokok obligasi beserta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian Obligasi Daerah. Obligasi Daerah diberikan untuk waktu yang tetap selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Secara khusus, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman. Obligasi juga merupakan pinjaman, tetapi diberikan dalam bentuk surat berharga. Dalam obligasi, si peminjam menjadi emiten dan pemberi pinjaman menjadi pemegang obligasi. Suku bunga biasanya sudah ditentukan. Kebanyakan obligasi adalah semi-tahunan, yang artinya bunga dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun pada pokok obligasi. Pokok obligasi itu sendiri dibayarkan dalam bentuk pembayaran tunggal pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jumlah bunga yang



telah dibayarkan adalah sama dalam tiap tahunnya sampai pembayaran pokok obligasi lunas.

Prinsip umum mengenai penerbitan Obligasi Daerah, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah;
- b) Obligasi Daerah merupakan pinjaman Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;
- c) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);
- d) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis *index bond* yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal, misalnya dengan kurs dollar atau harga emas; dan
- e) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada menerbitkan obligasi daerah dalam bentuk apapun.

3) Hibah Daerah

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain lain pendapatan. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.



Hibah yang bersumber dari Dalam Negeri bersumber dari:

- a) Pemerintah;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Badan/Lembaga Organisasi Swasta dalam negeri; dan
- d) Kelompok masyarakat/perorangan.

Sedangkan Hibah yang bersumber dari luar negeri diperoleh dari lembaga/institusi, negara:

- a) Bilateral;
- b) Multilateral; dan
- c) Donor lainnya.

Prinsip dasar pelaksanaan hibah daerah di Indonesia yaitu:

- a) Hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah;
- b) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- c) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- d) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah;
- e) Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait;
- f) Hibah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah, sementara yang berasal dari Luar Negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut diteruskan oleh Pemerintah kepada Daerah. Penerusannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPPH) antara Pemerintah dengan Daerah.

Dalam pengelolaan hibah, daerah berkewajiban untuk:

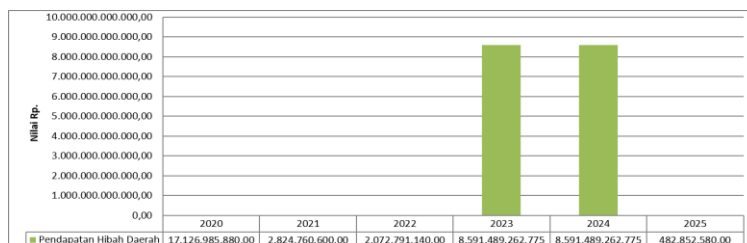
- a) Menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan apabila hibah berupa jasa konsultan dan jasa lainnya. Apabila Daerah tidak mengganggu kegiatan, pencairan hibah tidak dapat dilakukan;



- b) Dana pendamping dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD).

Tahun 2025 Pendapatan Hibah yang diterima dari Badan Usaha Swasta (Pihak Ketiga) yang diperoleh Kabupaten Katingan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat pada Gambar 3.1.10 menggambarkan naik turunnya Pendapatan Hibah yang diperoleh selama tahun tertentu. Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan yang diterima Pemerintah untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 Pendapatan Hibah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan pada tahun 2025 Pendapatan Hibah kembali mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Gambar 3.1.10
Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025



3.1.7.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak



yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

a. Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yaitu :

1) Bersifat pajak, dan bukan retribusi.

Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam UU, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan. Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet. Sedangkan yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal, contoh : Pajak Penerangan Jalan.

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pusat.

5) Potensinya memadai.

Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.



- (a) Aspek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak, objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat.
 - (b) Aspek kemampuan masyarakat, artinya pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

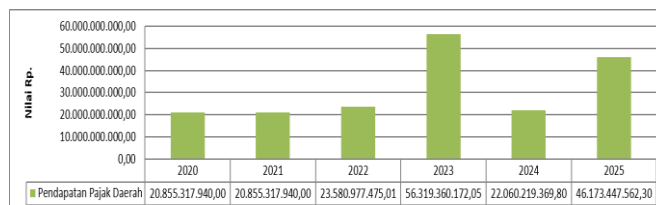
Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilihat pada grafik 3.1.11 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Katingan diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tahun 2025 Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sektor yang mempunyai kontribusi tinggi atas pendapatan pajak daerah Kabupaten Katingan pada Tahun 2025, sedangkan BPHTB merupakan sektor yang sangat kecil kontribusinya dilihat dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan Pendapatan pajak yang diterima Kabupaten Katingan mengalami kenaikan pada tahun 2025 jika dibandingkan pada tahun 2024.

Gambar 3.1.11
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025





b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan Perda, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat menetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
 - (a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 - (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - (c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
 - (e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 - (f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

- 1) Retribusi Jasa Usaha
 - (a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

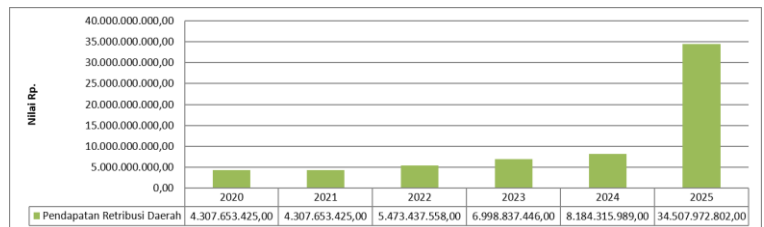


- (b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.
- 2) Retribusi Perizinan Tertentu
 - (a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - (b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
 - (c) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi harus diatur dengan Perda, juga dimuat ketentuan atau materi yang harus diatur dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga sektor Retribusi tersebut, Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar, diikuti oleh Retribusi Jasa Usaha dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Gambar 3.1.12 menunjukkan bahwa Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Katingan tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah untuk Pemerintah Kabupaten Katingan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2025 pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2024.

Gambar 3.1.12
Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2025



3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam RKPD 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2025 – 2029 di tahun 2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Katingan dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.



Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan mengarahkan kebijakan Pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh-kembangnya dunia usaha;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah;
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD;
5. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah;
6. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah; dan
7. Memperbaiki sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2025, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lainnya.

Komponen penyediaan Dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskan pada dua aspek yaitu pertama, memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan. Kedua, estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2025 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen SiLPA tahun 2025, sebagai penunjang sektor penerimaan pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal



(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam penyusunan APBD pemanfaatan segala potensi dengan penggunaan sumber daya harus secara efisien, efektif dan optimal. Sehingga perlu didasari oleh prinsip-prinsip anggaran yang memungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Katingan bisa melakukan melakukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Kebijakan Belanja tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui upaya antara lain:

1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen IV dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif;
3. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
6. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar;
7. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa terpadu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;
8. Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
9. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan service mobil);



- b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan; dan
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.
10. Untuk Belanja Tidak Terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk peristiwa-peristiwa tidak terduga seperti penanganan bencana alam dan kebutuhan pada kebutuhan tak terduga lainnya.

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan TA 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

APBD Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun 2025 terjadi Empat kali pergeseran atau perubahan APBD sebagai berikut:

1. Tahap I melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 14 April 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ;
2. Tahap II melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 yang menetapkan perubahan kedua atas peraturan Bupati Katingan No.54 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025;
3. Tahap III melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
4. Tahap IV melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 12 Desember 2025 tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian Pendapatan Daerah yaitu bersumber dari TDF sebesar Rp2.511.509.000,00, Insentif DD sebesar Rp125.810.534.516,00 dan dari IF sebesar Rp 0,00.
 - b. Penyesuaian pos pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dipengaruhi oleh beberapa kondisi dan regulasi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

- 2) Surat Edaran Bersama Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE - 1/MK.07/2024 tentang Tindak lanjut Arahan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4) Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 900/ 833/ SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.
- 6) Undang – undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah.
- 8) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN .
- 9) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang jadwal seleksi pengadaan PPPK tahun 2024.
- 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
- 11) Surat Edaran Nomor : 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
- 12) Penyesuaian target pencapaian Pada Pos Pendapatan Daerah terutama pada Pajak Daerah berkurang sebesar Rp20.362.514.224,00, Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp 411.104.558,00 dan Lain-lain PAD yang Sah berkurang sebesar Rp. -9.971.225.908,00
- 13) Penyesuaian terhadap Pos Belanja Daerah terutama pada belanja operasi berkurang sebesar Rp100.057.830.320,22, belanja modal berkurang sebesar Rp39.083.580.763,81, belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp39.460.000.000,00 dan belanja transfer berkurang sebesar Rp6.276.812.800,00

Rincian atas pergeseran dan atau perubahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Rincian Pergeseran dan/atau Perubahan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran		Kenaikan/ Penurunan
		Perda APBD	Perkada Pergeseran IV	
a	b	c	d	e = d - c
A	PENDAPATAN	1.481.629.284.490,00	1.400.228.411.300,00	81.400.873.190,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	133.197.130.490,00	102.452.285.800,00	30.744.844.690,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran		Kenaikan/ Penurunan
		Perda APBD	Perkada Pergeseran IV	
a	b	c	d	e = d - c
	Pendapatan Pajak Daerah	85.958.514.224,00	65.596.000.000,00	20.362.514.224,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.547.880.558,00	7.136.776.000,00	411.104.558,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	36.190.735.708,00	26.219.509.800,00	9.971.225.908,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.348.432.154.000,00	1.297.776.125.500,00	50.656.028.500,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.290.765.554.000,00	1.238.046.993.000,00	52.718.561.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.566.600.000,00	43.566.600.000,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.050.000.000,00	8.081.266.250,00	(1.031.266.250,00)
	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	81.266.250,00	(31.266.250,00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
B	BELANJA	1.631.703.634.490,00	1.446.825.410.605,97	184.878.223.884,03
1	BELANJA OPERASI	1.041.518.520.483,47	941.460.690.163,25	100.057.830.320,22
	Belanja Pegawai	562.297.778.093,00	562.140.159.142,99	157.618.950,01
	Belanja Barang dan Jasa	391.899.649.420,05	331.902.909.013,94	59.996.740.406,11
	Belanja Subsidi	1.850.000.000,00	1.700.000.000,00	150.000.000,00
	Belanja Hibah	81.376.652.970,42	43.939.874.486,32	37.436.778.484,10
	Belanja Bantuan Sosial	4.094.440.000,00	1.777.747.520,00	2.316.692.480,00
2	BELANJA MODAL	302.561.368.406,53	263.477.787.642,72	39.083.580.763,81
	Belanja Modal Tanah	713.500.000,00	742.500.000,00	(29.000.000,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.231.319.645,42	72.672.310.560,68	(6.559.009.084,74)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.637.593.112,85	117.315.440.769,85	(322.152.343,00)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104.757.417.748,26	72.182.963.412,19	32.574.454.336,07
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127.137.900,00	470.172.900,00	(343.035.000,00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	40.260.000.000,00	800.000.000,00	39.460.000.000,00
	Belanja Tak Terduga	40.260.000.000,00	800.000.000,00	39.460.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	247.363.745.600,00	241.086.932.800,00	6.276.812.800,00
	Belanja Bagi Hasil	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	239.863.745.600,00	233.586.932.800,00	6.276.812.800,00
C	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	(150.074.350.000,00)	(46.596.999.305,97)	102.446.084.444,03
D	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(150.074.350.000,00)	(46.596.999.305,97)	(103.477.350.694,03)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(150.074.350.000,00)	(46.596.999.305,97)	(103.477.350.694,03)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00

Berikut adalah proses Tahapan dan Jadwal Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025:

Tahapan APBD Murni :

1. Surat Nomor 900.1.12.1/29/TAPD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah di reviu oleh APIP Daerah;



2. Surat Nomor 900.1.12.1/28/TAPD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Kabupaten Katingan;
3. Keputusan Bupati Katingan nomor 100.3.3.1/701 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 tentang Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Katingan atas Rancangan Kebijakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Nomor 900.1.12.1/47/TAPD/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Katingan;
5. Surat Nomor 10.3.7.1/11/HUK/2024, Nomor 170/694/DPRD-KAT/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Katingan dan Kepala Daerah; dan
6. Surat nomor 900.1.12.1/68/TAPD/XI/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Penyampaian Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur untuk di Evaluasi.

Tahapan APBD Perubahan :

1. Surat Nomor 900.1.12.1/36/TAPD/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP Daerah;
2. Surat nomor 900.1.12.1837TAPD/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
3. Surat Nomor KUA 100.3.7.1/8/HUK/2025 dan 100.3/614/DPRD-KAT/2025 dan PPAS 100.3.7.1/7/HUK/2025 dan 100.3/613/DPRD-KAT/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Pembahasan dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS;
4. Surat Nomor KUA 100.3.7.1/8/HUK/2025 dan 100.3/614/DPRD-KAT/2025 dan PPAS 100.3.7.1/7/HUK/2025 dan 100.3/613/DPRD-KAT/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Pembahasan dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS;
5. Surat Nomor 900.1.12.1/50/TAPD/IX/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD;
6. Surat Nomor 100.3.7.1/11/HUK/2025 dan 100.3/653/DPRD-KAT/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah; dan
7. Surat Nomor 900.1.12.1/53/TAPD/IX/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Menyampaikan Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD Perubahan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 3.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per SKPD
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan	35.000.000,00	93.800.000,00	268,00	107.700.000,00
Dinas Kesehatan	35.035.000.000,00	38.576.959.429,00	110,11	33.193.626.290,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	1.509.777.544,00	141,1	1.556.121.299,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	166.200.000,00	169.200.000,00	101,81	167.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000.000,00	504.570.500,00	96,11	513.412.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	13.300.000,00	133,00	7.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	604.000.000,00	617.488.000,00	102,23	581.525.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	467.376.000,00	420.295.000,00	89,93	437.156.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.266.250,00	630.943.180,00	305,89	499.906.230,00
Sekretariat Daerah	3.855.000.000,00	7.186.922.950,50	186,43	9.009.960.161,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00	27.850.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	87.550.000,00	175,10	118.250.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.287.353.102.800,00	1.225.357.987.781,57	95,18	1.508.989.314.600,00
Badan Pendapatan Daerah	61.733.500.000,00	39.283.228.186,80	63,63	29.060.045.100,46
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	18.100.000,00	181,00	17.100.000,00
Dinas Perhubungan dan Perikanan	680.000.000,00	559.487.500,00	82,28	606.017.841,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.256.000,00	101,28	20.800.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	28.680.000,00	143,40	25.406.400,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	19.670.000,00	98,35	20.170.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	16.930.000,00	84,65	22.700.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	21.000.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	23.640.000,00	118,20	34.140.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	14.800.000,00	74,00	10.500.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	80.000.000,00	91.700.000,00	114,63	55.400.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	18.900.000,00	94,50	23.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	18.717.000,00	93,59	22.222.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.750.000,00	103,75	20.500.000,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	17.199.080,00	86,00	9.931.890,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	13.569.000,00	67,85	20.107.500,00
JUMLAH	1.392.147.145.050,00	1.315.378.621.151,87	94,48	1.585.199.112.311,46

Urusan pemerintah dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp1.446.825.410.605,97 dan terealisasi sebesar Rp1.365.710.891.819,34 atau 94,39%, Rincian belanja per PD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja - LRA per SKPD
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	369.396.882.811,00	269.859.546.100,54	73,05	381.696.278.676,95
2	Dinas Kesehatan	309.793.726.544,00	307.854.261.689,71	99,37	357.531.600.462,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.059.011.170,66	89.958.643.976,82	91,74	127.691.397.298,91
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	22.686.592.714,00	16.406.658.512,00	72,32	33.530.192.411,00
5	Dinas Sosial	7.285.000.116,00	6.572.504.856,00	90,22	7.840.024.988,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.690.935.518,00	9.154.625.446,00	94,47	11.348.467.025,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.189.716.926,00	10.750.554.212,00	88,19	11.486.153.820,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	18.832.293.059,00	17.623.904.737,00	93,58	17.655.044.143,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.049.007.363,00	10.656.493.044,00	96,45	11.140.130.588,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.228.046.024,00	6.748.249.600,00	93,36	7.945.609.589,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.785.735.251,00	6.372.923.040,00	93,92	8.914.102.264,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	16.855.896.409,00	16.038.020.076,00	95,15	17.214.604.498,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.881.612.754,00	13.668.331.289,00	91,85	14.903.530.913,00
14	Sekretariat Daerah	59.444.841.348,00	56.803.801.394,00	95,56	60.884.288.475,00
15	Sekretariat DPRD	46.546.878.268,00	42.994.052.682,00	92,37	45.239.597.556,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.434.524.636,00	7.363.242.932,00	87,30	11.337.510.123,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	282.336.798.726,31	340.013.527.880,36	120,42	274.516.845.980,58
18	Badan Pendapatan Daerah	8.996.289.795,00	8.594.194.715,00	95,53	10.664.567.293,25
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.469.299.418,00	7.084.454.979,00	94,85	9.917.219.894,00
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	14.384.836.488,00	13.702.334.006,00	95,26	12.835.619.220,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	4.289.764.133,00	4.045.300.697,00	94,30	4.389.805.469,00
22	Kecamatan Mendawai	2.785.833.488,00	2.649.938.755,00	95,12	2.684.883.318,00
23	Kecamatan Kamipang	3.451.247.585,00	3.125.584.175,00	90,56	3.802.580.656,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	3.249.354.800,00	2.826.753.047,00	86,99	3.121.165.327,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	5.995.318.222,00	5.811.147.729,00	96,93	6.500.092.860,00
26	Kecamatan Tewang S. Garing	4.342.096.466,00	4.047.723.573,00	93,22	5.185.597.325,00
27	Kecamatan Pulau Malan	3.479.084.999,00	3.312.355.336,00	95,21	3.553.729.345,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	4.935.147.000,00	4.442.511.161,91	90,02	4.996.302.411,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.321.609.625,00	3.050.157.441,00	91,83	3.503.444.121,00
30	Kecamatan Marikit	2.999.795.600,00	2.820.659.801,00	94,03	2.660.424.321,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	3.479.837.817,00	3.369.250.073,00	96,82	4.103.094.026,50
32	Kecamatan Petak Malai	1.905.079.600,00	1.847.614.220,00	96,98	2.343.577.777,00
33	Kecamatan Bukit Raya	2.029.347.200,00	1.908.433.914,00	94,04	2.511.190.273,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.135.193.868,00	7.882.340.138,00	96,89	34.152.900.490,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	21.535.836.023,00	20.963.386.892,00	97,34	33.109.895.323,00
36	Badan Penanggulangan bencana Daerah	8.217.098.171,00	7.470.437.843,00	90,91	8.200.853.033,00
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.577.751.369,00	6.150.597.350,00	93,51	7.383.448.057,00
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.762.190.306,00	7.389.085.306,00	95,19	8.274.767.939,97
39	Inspektorat	15.985.898.995,00	14.377.289.200,00	89,94	12.373.797.618,00
Jumlah		1.446.825.410.605,97	1.365.710.891.819,34	94,48	1.587.144.334.909,47

Komposisi pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 didominasi oleh pendanaan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.169.396.432.012,00 atau sebesar 94,45% dari total APBD, diikuti oleh pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp90.315.422.535,17 atau sebesar 88,15% dari total APBD,



dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp45.174.096.839,00 atau 107,17% dari total APBD, serta terakhir dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp9.694.669.765,70 atau sebesar 119,96% dari total APBD.

Pendanaan tersebut dialokasikan untuk belanja-belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan prioritas-prioritas yang ditetapkan baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Beberapa bentuk belanja yang dijadikan prioritas di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang diatur oleh undang-undang, tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun *mandatory spending* yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan adalah minimal 20% dari perhitungan APBD. Di tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan anggaran sebesar Rp369.396.882.811,00 terealisasi Rp233.136.685.421,06 atau sebesar 63,11%
- b. Bidang Kesehatan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan adalah minimal 10% dari perhitungan APBD diluar belanja pegawai/gaji. Di tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp309.793.726.544,00 untuk alokasi anggaran fungsi kesehatan, dengan realisasi belanja sebesar 295.024.349.978,71 atau 95,23% dari alokasi yang disediakan.
- c. Bidang Pengawasan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang pengawasan adalah minimal 0,75% dari perhitungan APBD. Di tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp15.985.898.995,00 untuk alokasi anggaran fungsi pengawasan, dengan realisasi belanja sebesar Rp14.377.289.200,00 atau 89,94% dari alokasi yang disediakan.
- d. Bidang Infrastruktur, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur adalah minimal 40% dari alokasi Dana Perimbangan. Di Tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp98.059.011.170,66 terealisasi Rp89.958.643.976,82 atau sebesar 91,74%
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja adalah minimal 0,2% dari alokasi anggaran urusan Sumber Daya Manusia. Di tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp7.291.013.197,20 terealisasi Rp6.919.281.979,00 atau sebesar 94,90%

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah kabupaten yang disalurkan kepada desa dengan persentase sebesar 10%. Pada APBD TA 2025 besaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp96.871.107.800,00 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp96.871.107.800,00 atau 100% tersalurkan.

3. Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk tahun 2025 guna mendukung program penanganan dampak inflasi. Pemerintah Kabupaten Katingan menganggarkan sebesar Rp71.882.676.434,80 untuk



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

belanja wajib perlindungan sosial sesuai dengan formulasi dan petunjuk penggunaan dalam PMK yang antara lain digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyelenggaraan pasar murah, dan pemberian bantuan di bidang pertanian.



IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Kabupaten Katingan adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. PD bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan PD yang bertindak Perangkat Daerah (PD) adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh PD. Dan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota.

Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Peraturan Bupati (Perbup) Katingan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah. Pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.



Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Aset dicatat sebagai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebagai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran



pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan Yang Ada di Dalam SAP

Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrua, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - b. Akuntansi Pendapatan (Kebijakan Akuntansi 02);
 - c. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 03);
 - d. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 04);
 - e. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 05);
 - f. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 06);
 - g. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 07);
 - h. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 08);
 - i. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09);
 - j. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 10);
 - k. Akuntansi konstruksi Dalam Pengerjaan (Kebijakan Akuntansi 11);
 - l. Akuntansi Properti Investasi (Kebijakan Akuntansi 12);
 - m. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13);
 - n. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 14);
 - o. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 15);
 - p. Akuntansi Koreksi Kesalahan (Kebijakan Akuntansi 16).
 2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi Nomor 01)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

- b. Akuntansi Pendapatan (Kebijakan Akuntansi 02)

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada tahun anggaran berjalan. Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan tersebut direalisasikan dengan masuknya sumber daya ekonomi yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan - LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas tahun berjalan atau diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan - LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan nilai pendapatan



bruto tanpa dikompensasi dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum anggaran yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah (RKUD) atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima dan langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUD dengan syarat telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

c. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 03)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, timbulnya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan nilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi apabila nilai perolehan tidak diperoleh.

Belanja-LRA adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan. Pengukuran belanja mempergunakan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 04)

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk pada LRA diakui pada saat tanggal transfer masuk ke RKUD, sedangkan transfer masuk-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan ketetapan/dokumen yang sah atau saat pendapatan direalisasikan dan diukur berdasarkan nilai nominal pada dokumen atau nominal yang masuk pada RKUD. Transfer keluar pada LRA diakui saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum disana, sedangkan transfer keluar pada LO diakui pada saat terbitnya SP2D atau saat terbitnya dokumen yang menyatakan kewajiban pemda kepada entitas lainnya dan diukur berdasarkan nilai nominal dalam dokumen tersebut.



e. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 05)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD dan diukur berdasarkan azas bruto.

f. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 06)

Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya dan apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Penyajian saldo kas dan setara kas termuat dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena merupakan bagian dari manajemen kas.

g. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 07)

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah atau surat penagihan lainnya dan belum dilunasi, pengukurannya disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian piutang dilakukan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nominal piutang dengan penyisihan piutang yang dikelompokkan menjadi empat kategori kualitas yaitu:

- 1) Kualitas piutang lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 0,5% dari nilai piutang;
- 2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 – 2 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 10% dari nilai piutang;
- 3) Kualitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 – 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 50% dari nilai piutang; dan
- 4) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dari nilai piutang.

h. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 08)

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pada umumnya metode penilaian persediaan yang dilakukan adalah metode FIFO (*First in First out*) dan metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik. Pengukuran persediaan dilakukan pada saat akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi. Selain persediaan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang masih dalam proses



produksi, barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat juga dicatat sebagai persediaan.

i. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09)

Suatu pengeluaran pemerintah dapat diakui sebagai investasi apabila di masa mendatang terdapat kemungkinan pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal. Berdasarkan tingkat likuiditasnya investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu investasi jangka pendek (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama maksimal 12 bulan) dan investasi jangka panjang (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan). Pengukuran investasi dilakukan berdasarkan nilai/biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan akan diukur berdasarkan nilai wajar. Metode penilaian investasi didasarkan pada prosentase kepemilikan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan $< 20\%$ menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan $20 - 50\%$ atau $< 20\%$ tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan
- 3) Kepemilikan $> 50\%$ menggunakan metode ekuitas.

j. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 10)

Aset tetap diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu berupa barang berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, diperoleh/dibangun dengan maksud digunakan sendiri serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal entitas, nilainya memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan atau apabila tidak memungkinkan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, kecuali aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan.

k. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kebijakan Akuntansi 11)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

l. Akuntansi Properti Investasi (Kebijakan Akuntansi 12)

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan



pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

m. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13)

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan berdasarkan peraturan daerah dan diakui pada saat terbitnya SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pengukuran dana cadangan berdasarkan nominal kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan tersebut. Dana cadangan disajikan dalam neraca kelompok aset non lancar, pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA – Penerimaan Pembiayaan dan Laporan Arus Kas – arus masuk kas dari aktivitas investasi, pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA – Pengeluaran Pembiayaan dan laporan arus kas – arus keluar kas dari aktivitas investasi, sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Pendapatan LO-Lain-Lain PAD yang Sah.

n. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 14)

Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Secara umum aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta kepemilikan atau penguasaannya berpindah berdasarkan dokumen yang sesuai dan sah. Tagihan penjualan angsuran dan tagihan kerugian daerah dinilai berdasarkan nilai nominal dalam dokumen yang resmi dikurangi dengan nilai angsuran atau setoran yang telah dilakukan ke kas umum daerah. Kemitraan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai aset yang diserahkan yang dicatat terpisah dari aset tetap. Aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai perolehan dikurangi nilai amortisasi yang dihitung berdasarkan metode garis lurus. Aset Lain-Lain disajikan berdasarkan nilai buku berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakaikan kepada unit pemerintah lain, atau aset yang diserahkan kepada pihak lain tetapi belum ada dokumen penyerahannya.

o. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 15)

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek (diselesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan), dan kewajiban jangka panjang (diselesaikan dalam tempo lebih dari 12 bulan). Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas nilai kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nominal kewajiban yang belum dibayar.

p. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan (Kebijakan Akuntansi 16)

Koreksi atas kesalahan dapat disebabkan antara lain oleh keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis,



kesalahan penerapan kebijakan atau interpretasi. Terhadap kesalahan segera dilakukan koreksi segera setelah diketahui pada akun yang bersangkutan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi dapat berupa perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode serta estimasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.



V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah :

- Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- Pendapatan kas yang diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pemerintah Kabupaten Katingan menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.392.147.145.050,00	1.315.378.621.151,87	1.585.199.112.311,46

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp1.392.147.145.050,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan TA 2025. Pendapatan ini terealisasi sebesar Rp1.315.378.621.151,87 atau 94,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.392.147.145.050,00. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.452.285.800,00	90.315.422.535,17	88,15	68.168.667.171,46
Pendapatan Transfer	1.281.613.593.000,00	1.215.368.528.851,00	94,83	1.508.968.514.600,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.081.266.250,00	9.694.669.765,70	119,96	8.061.930.540,00
Jumlah	1.392.147.145.050,00	1.315.378.621.151,87	94,49	1.585.199.112.311,46

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan	35.000.000,00	93.800.000,00	268,00	107.700.000,00
Dinas Kesehatan	11.035.000.000,00	12.526.670.683,00	113,52	10.974.818.369,00
BLUD RSUD Mas Amsyar	24.000.000.000,00	26.050.288.746,00	108,54	22.218.807.921,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	1.509.777.544,00	141,10	1.556.121.299,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	166.200.000,00	169.200.000,00	101,81	167.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000.000,00	504.570.500,00	96,11	513.412.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	13.300.000,00	133,00	7.700.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	604.000.000,00	617.488.000,00	102,23	581.525.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	467.376.000,00	420.295.000,00	89,93	437.156.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.266.250,00	630.943.180,00	305,89	499.906.230,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.256.000,00	101,28	20.800.000,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	19.670.000,00	98,35	20.170.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	16.930.000,00	84,65	22.700.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	21.000.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	23.640.000,00	118,20	34.140.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	14.800.000,00	74,00	10.500.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	80.000.000,00	91.700.000,00	114,63	55.400.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	18.900.000,00	94,50	23.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	18.717.000,00	93,59	22.222.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.750.000,00	103,75	20.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	28.680.000,00	143,40	25.406.400,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	13.569.000,00	67,85	20.107.500,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	17.199.080,00	86,00	9.931.890,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	87.550.000,00	175,10	118.250.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1.287.353.102.800,00	1.225.357.987.781,57	95,18	1.508.989.314.600,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	18.100.000,00	181,00	17.100.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00	27.850.000,00
Badan Pendapatan Daerah	61.733.500.000,00	39.283.228.186,80	63,63	29.060.045.100,46
Dinas Perhubungan dan Perikanan	680.000.000,00	559.487.500,00	82,28	606.017.841,00
Sekretariat Daerah	3.855.000.000,00	7.186.922.950,50	186,43	9.009.960.161,00
Jumlah	1.392.147.145.050,00	1.315.378.621.151,87	94,49	1.585.199.112.311,46

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.585.199.112.311,46 realisasi pencapaian target pendapatan pada Tahun 2025 sebesar Rp1.315.378.621.151,87 mengalami penurunan sebesar Rp269.820.491.159,59. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya penerimaan dari Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
102.452.285.800,00	90.315.422.535,17	68.168.667.171,46

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari:

Tabel 5.1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Pajak Daerah	65.596.000.000,00	46.173.447.562,30	70,39	22.060.219.369,80
Pendapatan Retribusi Daerah	7.136.776.000,00	34.507.972.802,00	483,52	8.184.315.989,00
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.428.321.792,77	97,95	4.579.510.360,83
Lain-lain PAD Yang Sah	26.219.509.800,00	6.205.980.378,10	23,67	33.344.621.451,83
Jumlah	102.452.285.800,00	90.315.422.535,17	88,15	68.168.667.171,46

Tabel 5.1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan	35.000.000,00	93.800.000,00	268,00	107.700.000,00
Dinas Kesehatan	27.035.000.000,00	29.690.041.578,00	109,82	25.509.976.980,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	1.559.777.544,00	145,80	1.556.121.299,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	166.200.000,00	169.200.000,00	101,80	167.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000.000,00	504.570.500,00	96,10	513.412.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	13.300.000,00	133,00	7.700.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	604.000.000,00	617.488.000,00	102,23	581.525.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	467.376.000,00	420.295.000,00	89,92	437.156.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	125.000.000,00	148.090.600,00	118,47	121.625.000,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.256.000,00	101,28	20.800.000,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	19.670.000,00	98,35	20.170.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	16.930.000,00	84,65	22.700.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	21.000.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	23.640.000,00	118,20	34.140.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	14.800.000,00	74,00	10.500.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	80.000.000,00	91.700.000,00	114,62	55.400.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	18.900.000,00	94,50	23.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	18.717.000,00	93,58	22.222.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.750.000,00	103,75	20.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	28.680.000,00	143,40	25.406.400,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	13.569.000,00	67,84	20.107.500,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	17.199.080,00	85,99	9.931.890,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	87.550.000,00	175,10	118.250.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	5.739.509.800,00	9.614.496.595,87	167,35	20.800.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	18.100.000,00	181,00	17.100.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00	27.850.000,00
Badan Pendapatan Daerah	61.733.500.000,00	39.283.228.186,80	63,63	29.060.045.100,46
Dinas Perhubungan dan Perikanan	680.000.000,00	559.487.500,00	82,27	606.017.841,00
Sekretariat Daerah	3.855.000.000,00	7.186.922.950,50	186,43	9.009.960.161,00
Jumlah	102.452.285.800,00	90.315.422.535,17	88,15	68.168.667.171,46

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
65.596.000.000,00	46.173.447.562,30	22.060.219.369,80

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.5
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pajak Reklame	185.000.000,00	183.068.969,00	98,96	251.540.145,00
Pajak Air Tanah	25.000.000,00	19.241.864,00	76,97	4.028.970,00
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	76.897.300,00	76,90	345.623.880,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000,00	7.074.369.496,50	188,65	8.673.435.396,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.250.000.000,00	1.411.825.282,00	112,95	1.303.801.439,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000,00	1.318.528.938,00	4,71	890.658.838,00
PBJT - Makanan dan/atau Minuman	995.000.000 ,00	1.572.863.403,80	158,08	1.848.738.212,8
PBJT - Tenaga Listrik	10.050.000.000,00	10.643.534.744,00	105,91	8.617.300.989,00
PBJT-Jasa Perhotelan	80.000.000,00	125.618.200,00	157,02	124.991.500,00
PBJT-Jasa Parkir	160.000.000,00	5.305.000,00	3,32	0,00
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	1.000.000,00	652.500,00	65,25	100.000,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.000.000.000,00	9.545.360.694,00	106,06	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.000.000.000,00	14.196.181.171,00	118,30	0,00
Jumlah	65.596.000.000,00	46.173.447.562,30	70,39	22.060.219.369,80

Pendapatan Pajak Daerah dengan target sebesar Rp65.596.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.173.447.562,30 atau terealisasi 70,39% dari anggaran yang ditetapkan. Pencapaian target pajak daerah diantaranya :

Bahwa terkait tidak terpenuhinya realisasi target Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2025, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh terbesar akibat objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Perusahaan atas terbitnya usulan Hak Guna Usaha (HGU) yang berproses sudah lama melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak terpenuhi dengan maksimal, bahwa pada tahun 2025 telah dilaksanakan pertemuan dengan pihak Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, dan dari pertemuan tersebut pihak Kementerian menyatakan bahwa kemungkinan besar dari beberapa usulan HGU oleh beberapa perusahaan besar swasta sawit, ada satu yang kemungkinan selesai dan akan terbit HGU di tahun 2025, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan pertemuan dengan Perusahaan Besar Swasta Sawit yang mengusulkan HGU, dan pihak Perusahaan besar Swasta Sawit menyatakan apabila HGU terbit, maka pihak perusahaan akan segera menyelesaikan kewajiban BPHTB, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, ternyata HGU tersebut masih belum terbit sehingga realisasi BPHTB pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai dengan rencana pada target penerimaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1.6
Pajak Daerah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

PD Pemungut	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Sekretariat Daerah	3.825.000.000,00	7.123.764.950,50	186,43	8.922.316.161,00
Badan Pendapatan Daerah	61.611.000.000,00	39.044.377.611,80	63,37	13.137.903.208,80



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

PD Pemungut	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	60.000.000,00	5.305.000,00	8,84	0,00
Jumlah	65.596.000.000,00	46.173.447.562,30	70,50	22.060.219.369,80

Terdapat empat Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan atas pajak daerah yaitu Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp7.123.764.950,50 dari target anggaran sebesar Rp3.825.000.000,00 atau 186,43%, Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp39.044.377.611,80 dari target anggaran sebesar Rp61.611.000.000,00 atau 63,37%, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata dengan Realisasi sebesar Rp5.305.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp60.000.000,00 atau 8,84%.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
7.136.776.000,00	34.507.972.802,00	8.184.315.989,00

Retribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Katingan dalam periode Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.000.000.000,00	3.547.585.950,00	118,25	3.159.955.700,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	26.006.188.746,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	0,00	0,00	52.735.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00	135.759.000,00	90,50	120.292.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	89.955.000,00	0,00	94.100.000,00
Retribusi Los	5.000.000,00	4.420.000,00	88,40	27.750.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	153.400.000,00	208.139.580,00	135,68	708.227.790,00
Retribusi Penyewaan Tanah	475.000.000,00	354.832.500,00	74,70	323.332.841,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	501.500.000,00	708.314.882,00	141,24	263.727.859,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	365.000.000,00	361.221.000,00	98,96	392.908.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	465.000.000,00	630.920.000,00	135,68	765.950.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Retribusi Pemakaian Alat	109.500.000,00	107.000.000,00	97,71	113.918.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	685.000.000,00	734.612.000,00	107,24	602.917.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	53.421.000,00	0,00	41.355.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	40.000.000,00	35.055.000,00	87,63	43.385.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	382.376.000,00	329.345.000,00	86,13	370.809.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	125.000.000,00	148.090.600,00	118,47	121.625.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000,00	33.050.000,00	132,20	85.800.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00	1.020.062.544,00	156,93	894.527.299,00
Jumlah	7.136.776.000,00	34.507.972.802,00	483,52	8.184.315.989,00

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp7.136.776.000,00 terealisasi sebesar Rp34.507.972,802,00 atau terealisasi 483,52% dan bila dibanding pendapatan Retribusi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp26.323.656.813,00. Pelampauan Retribusi melebihi target terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp3.547.585.950,00 atau terealisasi 118,25%, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.020.062.544,00 atau terealisasi 156,93%, dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sebesar Rp734.612.000,00 atau terealisasi 107,24%. Adapun rincian pendapatan retribusi berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

SKPD Pemungut	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan	35.000.000,00	93.800.000,00	268,00	107.700.000,00
Dinas Kesehatan	3.035.000.000,00	29.690.104.578,00	78,26	3.291.169.059,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	1.559.777.544,00	45,77	1.556.121.299,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	166.200.000,00	169.200.000,00	101,81	167.450.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

SKPD Pemungut	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Lingkungan Hidup	525.000.000,00	504.570.500,00	96,11	513.412.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	13.300.000,00	133,00	7.700.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	604.000.000,00	617.488.000,00	102,23	581.525.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	407.376.000,00	414.990.000,00	101,87	437.156.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	125.000.000,00	148.090.600,00	118,47	121.625.000,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.256.000,00	101,28	20.800.000,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	19.670.000,00	98,35	20.170.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	16.930.000,00	84,65	22.700.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	21.000.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	23.640.000,00	118,20	34.140.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	14.800.000,00	74,00	10.500.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	80.000.000,00	91.700.000,00	114,62	55.400.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	18.900.000,00	94,50	23.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	18.717.000,00	93,58	22.222.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.750.000,00	103,75	20.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	28.680.000,00	143,40	25.406.400,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	13.569.000,00	67,84	20.107.500,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	17.199.080,00	85,99	9.931.890,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	87.550.000,00	175,10	118.250.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	35.000.000,00	31.805.000,00	90,87	20.800.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	18.100.000,00	181,00	17.100.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00	27.850.000,00
Badan Pendapatan Daerah	107.500.000,00	187.540.000,00	174,45	216.818.000,00
Dinas Perhubungan dan Perikanan	580.000.000,00	559.487.500,00	96,46	606.017.841,00
Sekretariat Daerah	30.000.000,00	63.158.000,00	210,52	87.644.000,00
Jumlah	7.136.776.000,00	34.507.972.802,00	483,52	8.184.315.989,00

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah dengan realisasi terbesar pada Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp29.690.104.578,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

atau 78,26% mengalami kenaikan sebesar Rp26.398.935.519,00 dibandingkan tahun sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp1.559.777.544,00 atau 45,77% mengalami kenaikan sebesar Rp3.656.245,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp617.488.000,00 atau 102,23% mengalami kenaikan sebesar Rp35.963.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
3.500.000.000,00	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83

Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.428.321.792,77 atau 97,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Realisasi tersebut berasal dari penerimaan dividen atas:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang diterima pada tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 06 tanggal 07 Februari 2025 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Kalteng senilai Rp3.416.545.356,00; dan
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada CV Jamkrida Kalteng yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 05 Tanggal 10 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) CV Jamkrida Kalteng senilai Rp11.776.436,77.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
26.219.509.800,00	6.205.680.378,10	33.344.621.451,83

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan pendapatan daerah lain-lain selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Rincian Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	420.482.800,00	420.482.800,00	100,00	1.088.070.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00	510.460.552,00	85,07	693.098.840,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	32.366.277,00	0,00	4.286.637.389,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	70.000.000,00	72.061.557,15	102,94	28.020.942,86
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	654.477.446,92	327,23	147.548.498,61



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000,00	59.322.123,00	395,48	57.624.046,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	400.000.000,00	2.575.336.597,47	643,83	4.649.026.307,36
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	510.027.000,00	226.693.761,00	44,44	175.787.507,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.000.000,00	5.896.222,00	147,40	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	1.648.583.041,56	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.970.000.000,00	0,00	0,00	22.218.807.921,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.219.509.800,00	6.205.680.378,10	23,67	33.344.621.451,83

Tabel 5.1.10
Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Kesehatan	24.000.000.000,00	0,00	0,00	22.218.807.921,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	2.204.509.800,00	6.146.358.255,10	278,80	0,00
Badan Pendapatan Daerah	15.000.000,00	59.322.123,00	395,48	11.125.813.530,83
Jumlah	26.219.509.800,00	6.205.580.378,10	23,67	33.344.621.451,83

Berdasarkan tabel diatas, lain-lain PAD yang sah target sebesar Rp26.219.509.800,00 terealisasi sebesar Rp6.205.580.378,10 atau 23.67%. Apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp27.138.941.073,73 di tahun 2025.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.281.613.593.000,00	1.215.368.528.851,00	1.508.968.514.600,00

Pendapatan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2025 melalui Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.102.129.168.000,00	1.043.585.897.496,00	94,69	1.317.897.063.468,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	135.917.825.000,00	125.810.534.516,00	92,56	138.904.565.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.566.600.000,00	45.972.096.839,00	105,52	52.166.886.132,00
Jumlah	1.281.613.593.000,00	1.215.368.528.851,00	94,83	1.508.968.514.600,00

Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi pendapatan transfer mengalami Penurunan sebesar Rp293.599.985.749,00 dengan angka realisasi Rp1.215.368.528.851,00. Nilai diperoleh atas menurunnya pendapatan pada transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.238.046.993.000,00	1.169.396.432.012,00	1.456.801.628.468,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan terealisasi sebesar Rp1.169.396.432.012,00 atau 94,45% dari target anggaran sebesar Rp 1.238.046.993.000,00 Realisasi tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp287.405.196.456,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 5.1.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Perimbangan	1.102.129.168.000,00	1.043.585.897.496,00	94,69	1.317.897.063.468,00
Dana Desa	135.917.825.000,00	125.810.534.516,00	92,56	133.014.020.000,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	5.890.545.000,00
Jumlah	1.238.046.993.000,00	1.169.396.432.012,00	94,45	1.456.801.628.468,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.102.129.168.000,00	1.043.585.897.496,00	1.317.897.063.468,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp1.043.585.897.496,00 dan Rp1.317.897.063.468,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.13
Realisasi Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Bagi Hasil	201.438.535.000,00	186.190.613.100,00	92,43	332.285.338.000,00
Dana Alokasi Umum	665.141.777.000,00	644.050.930.713,00	96,82	672.273.960.026,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.474.442.000,00	82.775.069.237,00	99,16	186.604.733.257,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.074.414.000,00	130.569.284.446,00	85,85	126.733.032.185,00
Jumlah	1.102.129.168.000,00	1.043.585.897.496,00	94,69	1.317.897.063.468,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
201.438.535.000,00	186.190.613.100,00	332.285.338.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DBH PBB	40.017.883.000,00	29.270.908.100,00	73,14	26.034.554.000,00
DBH PPh Pasal 21	7.757.066.000,00	5.058.306.200,00	65,20	5.425.483.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	47.104.000,00	35.131.800,00	75,58	39.768.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	5.433.000,00	5.430.000,00	99,94	0,00
DBH SDA Gas Bumi	56.668.000,00	56.668.000,00	100,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	2.525.077.000,00	2.525.077.000,00	100,00	412.114.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	137.457.131.000,00	135.666.916.000,00	98,69	271.730.286.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.347.736.000,00	6.347.737.000,00	100,00	13.650.774.000,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	2.000,00	0,00	454.818.000,00
DBH SDA Perikanan	1.154.337.000,00	1.154.337.000,00	100,00	1.551.238.000,00
DBH Sawit	6.070.100.000,00	6.070.100.000,00	100,00	12.986.302.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Jumlah	201.438.535.000,00	186.190.613.100,00	92,43	332.285.338.000,00

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi r 2024
665.141.777.000,00	644.050.930.713,00	672.273.960.026,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari transfer keuangan daerah Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. DAU ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan potensi fiskal masing-masing Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan **Desentralisasi** secara adil dan merata. Realisasi **Dana Alokasi Umum (DAU)** Tahun Anggaran 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DAU	502.854.873.000,00	502.450.388.684,00	99,92	464.843.810.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	54.129.106.000,00	33.442.744.029,00	61,78	30.553.332.026,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	65.241.836.000,00	65.241.836.000,00	100,00	84.959.849.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.515.962.000,00	41.515.962.000,00	100,00	51.449.946.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	39.067.023.000,00
Jumlah	665.141.777.000,00	644.050.930.713,00	96,83	672.273.960.026,00

5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
83.474.442.000,00	82.775.069.237,00	186.604.733.257,00

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang bersumber dari transfer keuangan daerah Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana fisik di daerah sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.16
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.329.885.000,00	1.272.725.548,00	95,70	974.202.126,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	8.650.239.494,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.120.000,00	212.305.202,00	98,23	7.072.209.850,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	89.346.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	6.428.726.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	18.311.945.705,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	783.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	81.928.437.000,00	81.290.038.487,00	99,22	141.995.063.582,00
Jumlah	83.474.442.000,00	82.775.069.237,00	99,16	186.604.733.257,00

5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
152.074.414.000,00	130.569.284.446,00	126.733.032.185,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) merupakan dana yang bersumber dari transfer keuangan daerah Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang bersifat non-fisik, terutama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. DAK Non Fisik digunakan untuk mendukung program-program seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah, sehingga lebih menekankan pada aspek pelayanan, operasional, dan pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 5.1.17
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	29.579.274.779,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.125.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	63.776.781.000,00	56.714.246.757,00	88,93	49.380.187.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.957.484.000,00	1.065.220.000,00	54,42	2.389.750.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	21.862.600.000,00	12.849.244.376,00	58,77	20.156.536.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.088.628.950,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.321.480.000,00	2.311.430.000,00	99,57	1.736.860.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.431.889.000,00	8.398.297.759,00	99,60	4.032.516.895,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	495.302.068,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	3.670.484.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	12.078.491.693,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	478.245.000,00	478.245.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.107.895.000,00	11.441.475.133,00	81,10	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.592.200.000,00	2.177.821.009,00	60,63	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	30.726.784.000,00	30.705.022.412,00	99,93	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.305.750.000,00	1.305.750.000,00	100	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.088.506.000,00	2.697.732.000,00	87,35	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	364.800.000,00	364.800.000,00	100,00	0,00
Jumlah	152.074.414.000,00	130.569.284.446,00	85,86	126.733.032.185,00

5.1.1.2.1.2 Dana Desa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
135.917.825.000,00	125.810.534.516,00	133.014.020.000,00

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi penerimaan Dana Desa Tahun 2025 tidak mencapai target dikarenakan Alokasi Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat mengalami pengurangan. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp125.810.534.516,00 dengan capaian 92,56% mengalami penurunan sebesar Rp7.203.485.484,00 dari Tahun 2024. Rincian realisasi Dana Desa Tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 1**.

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
0,00	0,00	5.890.545.000,00

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memperoleh alokasi Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
43.566.600.000,00	45.972.096.839,00	52.166.886.132,00

Pendapatan yang berasal dari Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang ditransfer di tahun 2025 sebesar Rp45.972.096.839,00.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
42.150.000.000,00	45.174.096.839,00	52.166.886.132,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer pada tahun 2025 sebesar Rp45.174.096.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024 (dalam rupiah)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	2.225.035.529,00	0,00	6.448.890.198,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	0,00	3.056.073.100,00	0,00	12.839.336.028,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	32.000.000.000,00	29.596.797.274,00	92,48	22.893.547.026,00
Pajak Pengembalian Dan Pemanfaatan Air Permukaan	150.000.000,00	78.360.840,00	52,24	122.889.676,00
Pajak Rokok	10.000.000.000,00	10.217.830.096,00	102,17	9.862.223.204,00
Jumlah	42.150.000.000,00	45.174.096.839,00	107,17	52.166.886.132,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.416.600.000,00	798.000.000,00	0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Bantuan Keuangan yang direalisasikan untuk Bantuan Damang sebesar Rp798.000.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.081.266.250,00	9.694.669.765,70	8.061.930.540,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2025 berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp9.694.669.765,70 dengan capaian 11,96% mengalami kenaikan sebesar Rp1.612.739.225,70 dari Tahun 2024, yang dapat disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.19
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Hibah	81.266.250,00	482.852.580,00	594,16	378.281.230,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000.000,00	9.211.817.185,70	115,14	7.683.649.310,00
Jumlah	8.081.266.250,00	9.694.669.765,70	119,96	8.061.930.540,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
81.266.250,00	482.852.580,00	378.281.230,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp482.852.580,00 merupakan Pendapatan Hibah Uang yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari PT BISMA Dharma Kencana senilai Rp137.852.580,00 (tanggal 26 Februari senilai Rp81.266.250,00, tanggal 29 Agustus 2025 senilai Rp56.172.660,00 dan tanggal 2 September senilai Rp413.670,00), dari PT Panca Mitra Katingan senilai Rp50.000.000,00 pada tanggal 19 November 2025 dan dari PT. Karya Dewi Putra senilai Rp295.000.000,00 pada tanggal 25 November 2025 dengan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	378.281.230,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	81.266.250,00	482.852.580,00	594,16	0,00
Jumlah	81.266.250,00	482.852.580,00	594,16	378.281.230,00

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.000.000.000,00	9.211.817.185,70	7.683.649.310,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada 17 FKTP senilai Rp8.886.917.851,00 dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat senilai Rp324.899.334,70 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.20
Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2025
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I	489.034.018,00
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II	453.076.211,00
UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai	345.681.896,00
UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango	382.010.651,00
UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang	312.155.925,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan	652.975.075,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II	584.476.240,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng Pangi	825.331.596,00
UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara	534.640.089,00
UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali	433.534.509,00
UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba	1.112.200.681,00
UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman	590.795.007,00
UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran	293.312.612,00
UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi	193.768.568,00
UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang	446.613.690,00
UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei	207.179.564,00
RSUD Pratama Tumbang Samba	1.030.131.519,00
Kontribusi dari Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	324.899.334,70
Total	9.211.817.185,70

5.1.2

Belanja

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.446.825.410.605,97	1.365.710.891.819,34	1.587.144.334.909,47

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Rincian Realisasi Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	941.460.690.163,25	883.002.510.430,62	93,79	984.181.752.206,53
Belanja Modal	263.477.787.642,72	251.436.796.284,72	95,43	374.195.510.225,24
Belanja Tak Terduga	800.000.000,00	291.942.800,00	36,49	1.605.409.963,00
Belanja Transfer	241.086.932.800,00	230.979.642.304,00	95,81	227.161.662.514,70
Jumlah	1.446.825.410.605,97	1.365.710.891.819,34	94,39	1.587.144.334.909,47

Adapun, Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 per perangkat daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	369.396.882.811,00	269.859.546.100,54	73,05	381.696.278.676,95
2	Dinas Kesehatan	309.793.726.544,00	307.854.261.689,71	99,37	357.531.600.462,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.059.011.170,66	89.958.643.976,82	91,74	127.691.397.298,91



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	22.686.592.714,00	16.406.658.512,00	72,32	33.530.192.411,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.135.193.868,00	7.882.340.138,00	96,89	34.152.900.490,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	21.535.836.023,00	20.963.386.892,00	97,34	33.109.895.323,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.217.098.171,00	7.470.437.843,00	90,91	8.200.853.033,00
8	Dinas Sosial	7.285.000.116,00	6.572.504.856,00	90,22	7.840.024.988,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.690.935.518,00	9.154.625.446,00	94,47	11.348.467.025,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.189.716.926,00	10.750.554.212,00	88,19	11.486.153.820,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.832.293.059,00	17.623.904.737,00	93,58	17.655.044.143,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.577.751.369,00	6.150.597.350,00	93,51	7.383.448.057,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.762.190.306,00	7.389.085.306,00	95,19	8.274.767.939,97
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	14.384.836.488,00	13.702.334.006,00	95,26	12.835.619.220,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.049.007.363,00	10.656.493.044,00	96,45	11.140.130.588,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.228.046.024,00	6.748.249.600,00	93,36	7.945.609.589,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	16.855.896.409,00	16.038.020.076,00	95,15	17.214.604.498,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.881.612.754,00	13.668.331.289,00	91,85	14.903.530.913,00
19	Sekretariat Daerah	59.444.841.348,00	56.803.801.394,00	95,56	60.884.288.475,00
20	Sekretariat DPRD	46.546.878.268,00	42.994.052.682,00	92,37	45.239.597.556,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.785.735.251,00	6.372.923.040,00	93,92	8.914.102.264,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	4.289.764.133,00	4.045.300.697,00	94,3	4.389.805.469,00
23	Kecamatan Kamipang	3.451.247.585,00	3.125.584.175,00	90,56	3.802.580.656,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	3.249.354.800,00	2.826.753.047,00	86,99	3.121.165.327,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	5.995.318.222,00	5.811.147.729,00	96,93	6.500.092.860,00
26	Kecamatan Tewang S. Garing	4.342.096.466,00	4.047.723.573,00	93,22	5.185.597.325,00
27	Kecamatan Pulau Malan	3.479.084.999,00	3.312.355.336,00	95,21	3.553.729.345,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	4.935.147.000,00	4.442.511.161,91	90,02	4.996.302.411,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.321.609.625,00	3.050.157.441,00	91,83	3.503.444.121,00
30	Kecamatan Marikit	2.999.795.600,00	2.820.659.801,00	94,03	2.660.424.321,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	3.479.837.817,00	3.369.250.073,00	96,82	4.103.094.026,50
32	Kecamatan Mendawai	2.785.833.488,00	2.649.938.755,00	95,12	2.684.883.318,00
33	Kecamatan Bukit Raya	2.029.347.200,00	1.908.433.914,00	94,04	2.511.190.273,00
34	Kecamatan Petak Malai	1.905.079.600,00	1.847.614.220,00	96,98	2.343.577.777,00
35	Inspektorat	15.985.898.995,00	14.377.289.200,00	89,94	12.373.797.618,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	8.434.524.636,00	7.363.242.932,00	87,3	11.337.510.123,00
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	282.336.798.726,31	340.013.527.880,36	120,43	274.516.845.980,58
38	Badan Pendapatan Daerah	8.996.289.795,00	8.594.194.715,00	95,53	10.664.567.293,25
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.469.299.418,00	7.084.454.979,00	94,85	9.917.219.894,00
Jumlah		1.446.825.410.605,97	1.365.710.891.819,34	94,39	1.587.144.334.909,47



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
941.460.690.163,25	883.002.510.430,62	984.181.752.206,53

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	562.140.159.142,99	526.896.314.427,53	93,73	506.232.945.775,58
Belanja Barang dan Jasa	331.902.909.013,94	316.043.555.079,09	95,22	369.606.587.482,51
Belanja Subsidi	1.700.000.000,00	1.093.601.700,00	64,33	2.536.412.800,00
Belanja Hibah	43.939.874.486,32	37.210.809.766	84,69	103.297.956.459,44
Belanja Bantuan Sosial	1.777.747.520,00	1.758.229.458,00	98,90	2.507.849.689,00
Jumlah	941.460.690.163,25	883.002.510.430,62	93,79	984.181.752.206,53

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
562.140.159.142,99	526.896.314.427,53	506.232.945.775,58

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp526.896.314.427,53 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp562.140.159.142,99. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.663.368.651,95 apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penambahan pada Belanja Gaji PPPK dan Honorarium Non PNS, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	347.361.310.741,28	341.718.458.119,36	98,38	304.228.869.824,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	193.610.292.829,51	161.354.075.569,00	83,34	105.190.234.411,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.446.577.157,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.534.155.572,20	12.127.722.414,00	96,76	11.841.294.027,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	154.000.000,00	137.438.503,00	89,25	0,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	100	530.200.000,00
Belanja Pegawai BLUD	7.000.000.000,00	10.957.019.822,17	156,53	9.995.770.356,58
Belanja Pegawai BOSP	878.800.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	562.140.159.142,99	526.896.314.427,53	93,73	506.232.945.775,58

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	287.804.246.859,00	192.132.113.534,00	91,29	263.389.872.132,00
2	Dinas Kesehatan	105.899.287.627,85	105.338.709.376,17	99,47	96.728.344.151,58
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.672.628.866,67	5.371.119.933,00	94,68	4.821.626.899,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	3.750.657.000,00	3.546.448.205,00	94,55	3.084.039.816,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.420.957.568,00	2.296.099.105,00	94,84	1.966.885.698,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.096.854.331,00	10.668.873.392,00	96,14	5.096.966.493,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.278.175.040,00	3.118.631.063,00	95,13	2.604.071.870,00
8	Dinas Sosial	2.912.934.860,00	2.740.850.745,00	94,09	2.568.956.958,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.645.725.687,00	3.473.220.843,00	95,26	3.329.881.135,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.917.802.563,00	4.695.138.837,00	95,47	4.664.331.702,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.666.460.696,00	5.642.292.003,00	84,63	3.897.250.071,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.211.599.539,00	3.043.111.171,00	94,75	2.587.293.664,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.334.550.404,00	3.137.980.012,00	94,10	3.171.573.666,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.359.761.841,00	4.152.205.096,00	95,23	3.937.926.709,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	3.410.084.035,00	3.245.966.091,00	95,18	3.012.499.067,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.785.645.001,00	3.550.997.577,00	93,8	3.099.860.996,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.604.391.344,00	8.075.647.676,00	93,85	7.548.340.594,00
18	Sekretariat Daerah	15.135.596.733,00	14.490.270.275,00	95,73	13.718.508.759,00
19	Sekretariat DPRD	16.709.254.905,00	16.013.707.356,00	95,83	14.934.136.864,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.342.184.330,00	3.144.223.578,00	94,07	2.923.686.534,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	2.403.470.372,00	2.189.290.697,00	91,08	2.190.925.469,00
22	Kecamatan Kamipang	2.096.480.415,00	1.989.055.675,00	94,87	1.835.680.456,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	2.116.985.709,00	2.003.547.815,00	94,64	1.949.244.314,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	3.273.210.236,00	3.136.572.363,00	95,82	3.261.608.925,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.834.260.524,00	2.669.803.135,00	94,19	2.905.361.688,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
26	Kecamatan Pulau Malan	2.443.181.329,00	2.319.842.836,00	94,95	2.417.284.776,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	2.759.188.774,00	2.554.292.239,00	92,57	2.589.652.127,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.886.189.819,30	1.664.030.881,00	88,22	1.706.278.137,00
29	Kecamatan Marikit	1.558.477.090,00	1.442.505.763,00	92,55	1.374.154.048,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	2.115.642.497,00	2.010.168.471,00	95,01	2.099.890.836,00
31	Kecamatan Mendawai	1.749.358.258,00	1.644.872.755,00	94,02	1.543.115.768,00
32	Kecamatan Bukit Raya	932.361.512,00	838.711.214,00	89,95	949.143.973,00
33	Kecamatan Petak Malai	868.041.485,00	827.878.570,00	95,37	765.038.262,00
34	Inspektorat Daerah	6.046.716.451,00	5.580.657.942,00	92,29	5.864.079.893,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.842.812.356,00	3.599.255.636,00	93,66	3.727.816.545,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.707.409.344,17	82.752.349.067,36	95,4	13.844.721.783,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.060.247.429,00	2.853.693.635,00	93,25	2.791.916.122,00
38	Badan Pendapatan Daerah	4.484.344.212,00	4.307.656.942,00	96,05	3.774.292.541,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	5.002.982.100,00	4.634.522.923,00	92,63	3.556.686.334,00
Jumlah		562.140.159.142,99	526.896.314.427,53	93,73	506.232.945.775,58

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
331.902.909.013,94	316.043.555.079,09	369.606.587.482,51

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp316.043.555.079,09 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp331.902.909.013,94, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Barang Pakai Habis	71.279.768.190,43	66.719.623.335,15	93,60	68.500.596.264,39
Belanja Barang Tak Habis Pakai	764.116.000,00	761.440.955,00	99,65	120.450.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.999.617,00	19.425.000,00	97,13	382.169.503,00
Belanja Jasa Kantor	75.756.211.516,36	65.454.551.245	86,40	90.146.079.054,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.235.494.993,27	26.959.003.180,52	98,98	26.982.540.980,83
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.948.209.764,00	3.599.647.078,50	91,17	2.417.038.129,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.886.391.376,03	1.535.586.920,00	81,40	2.014.374.710,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	133.875.000,00	126.950.000,00	94,83	62.950.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.717.992.275,00	6.132.506.619,00	91,28	23.064.006.654,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.215.730.555,00	1.115.129.650,00	91,73	1.461.550.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.795.769.595,07	3.225.237.033,07	84,97	7.350.697.767,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	74.996.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	367.499.800,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.407.891.436,40	9.186.526.875,00	97,65	12.354.967.966,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.803.259.296,25	5.267.518.894,00	90,77	6.741.539.263,90
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.386.419.198,10	1.338.764.682,00	96,56	3.571.217.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	173.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.805.402.281,03	64.765.990.399,00	92,78	104.648.189.326,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.229.660.000,00	3.104.080.000,00	96,11	2.713.985.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	414.500.000,00	382.110.259,00	92,19	143.835.219,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	25.300.549.300,00	26.234.086.876,48	103,69	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.442.680.000,00	2.356.430.000,00	163,34	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.716.288.620,00	12.829.911.711,00	119,72	108.395.818,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.642.700.000,00	14.929.034.366,37	128,23	16.205.809.027,39
Jumlah	331.902.909.013,94	316.043.555.079,09	95,22	369.606.587.482,51

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	43.175.945.883,15	42.150.214.664,55	97,60	27.059.838.706,00
2	Dinas Kesehatan	102.066.857.303,25	103.684.276.101,54	101,58	105.050.775.851,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.627.867.864,80	9.176.505.568,00	86,34	18.797.528.111,90
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	4.429.412.341,00	2.856.628.226,00	64,49	11.342.318.737,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.064.994.893,00	1.943.206.433,00	94,10	3.343.216.521,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.167.693.572,00	9.037.491.985,00	98,58	16.868.524.367,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.654.464.583,00	3.081.334.318,00	84,32	4.869.841.663,00
8	Dinas Sosial	3.709.309.856,00	3.199.694.262,00	86,26	3.743.525.068,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.757.061.638,00	4.422.600.034,00	92,97	5.973.145.827,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.387.161.052,00	5.278.950.375,00	82,65	6.207.834.118,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.544.376.728,58	8.380.497.644,00	98,08	10.598.226.422,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.179.984.863,00	1.986.452.179,00	91,12	3.459.551.969,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.218.349.902,00	3.052.801.328,00	94,86	4.043.562.733,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.914.220.918,00	5.732.482.452,00	96,93	6.920.141.465,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	2.530.825.448,98	2.222.500.162,00	87,82	2.418.100.522,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	5.040.792.306,00	4.475.318.316,00	88,78	5.299.065.228,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.414.909.006,20	3.825.153.255,00	86,64	5.585.220.630,00
18	Sekretariat Daerah	25.698.951.170,75	24.930.578.666,00	97,01	27.835.961.916,00
19	Sekretariat DPRD	28.777.411.963,00	25.957.168.326,00	90,20	29.822.237.592,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.482.500.994,00	2.285.649.212,00	92,07	4.256.858.520,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	1.263.178.136,00	1.233.040.000,00	97,61	1.541.575.000,00
22	Kecamatan Kamipang	946.638.270,00	794.867.500,00	83,97	1.517.861.380,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	1.044.863.521,00	735.864.632,00	70,43	1.067.339.313,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	1.997.534.715,72	1.952.051.812,00	97,72	2.678.520.405,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.020.941.052,10	893.700.438,00	87,54	1.385.764.480,00
26	Kecamatan Pulau Malan	956.743.469,00	913.372.500,00	95,47	1.036.284.569,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	1.777.662.301,00	1.492.367.435,00	83,95	1.987.991.304,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.064.054.692,70	1.020.940.330,00	95,95	1.319.411.034,00
29	Kecamatan Marikit	1.101.840.719,52	1.039.804.038,00	94,37	1.203.770.273,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	1.014.400.320,00	1.010.823.502,00	99,65	1.686.040.528,00
31	Kecamatan Mendawai	950.472.980,00	919.486.000,00	96,74	1.109.917.550,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
32	Kecamatan Bukit Raya	1.041.485.688,00	1.018.222.700,00	97,77	1.423.396.300,00
33	Kecamatan Petak Malai	1.036.758.115,00	1.019.735.650,00	98,36	1.540.754.515,00
34	Inspektorat Daerah	7.357.681.553,00	6.224.286.958,00	84,60	5.516.407.725,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.923.871.070,00	3.187.940.296,00	81,24	6.767.761.686,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.268.612.953,23	12.189.632.820,00	91,87	17.445.774.663,88
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	3.015.132.894,17	2.839.755.280,00	94,18	6.088.744.172,00
38	Badan Pendapatan Daerah	3.744.903.705,79	3.521.955.373,00	94,05	5.679.627.737,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	6.533.040.571,00	6.356.204.308,00	97,29	5.114.168.880,00
Jumlah		331.902.909.013,94	316.043.555.079,09	95,22	369.606.587.482,51

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.700.000.000,00	1.093.601.700,00	2.536.412.800,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.093.601.700,00 atau 64,33% dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00. Belanja Subsidi TA 2025 direalisasikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kasongan dalam rangka pemberian subsidi selisih tarif dari harga yang ditetapkan oleh PDAM kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Subsidi Selisih Tarif Air Minum Kepada Masyarakat Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan serta realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.28
Rincian Realisasi Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Belanja Subsidi kepada Bahan Usaha Milik Swasta untuk Kegiatan Pasar Murah Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	1.250.000.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Subsidi kepada PDAM Kasongan	1.350.000.000,00	743.601.700,00	55,08	1.286.412.800,00
Jumlah			1.700.000.000,00	1.093.601.700,00	64,33	2.536.412.800,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
43.939.874.486,32	37.210.809.766,00	103.297.956.459,44

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.210.809.766,00 atau 84,69% dari anggaran sebesar Rp43.939.874.486,32. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 merupakan Belanja Hibah yang berupa uang maupun barang Pemerintah Kabupaten Katingan kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Rincian Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	26.200.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.751.234.736,00	5.748.962.533,00	99,96	8.359.331.932,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.475.369.750,32	19.839.671.852,00	96,90	21.697.787.940,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.474.000.000,00	8.880.845.381,00	65,91	15.064.446.448,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	230.000.000,00	224.600.000,00	97,65	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	28.328.391.087,98
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.92.540.000,00	0,00	0,00	2.443.179.051,46
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.316.730.000,00	1.316.730.000,00	100	1.204.820.000,00
Jumlah	43.939.874.486,32	37.210.809.766,00	84,69	103.297.956.459,44

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	4.846.139.736,00	2.943.973.300,00	60,75	34.608.082.039,44
2	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	5.197.300.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.496.730.000,00	3.491.330.000,00	99,85	28.604.791.200,00
5	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	670.561.395,50	669.512.465,00	99,84	671.797.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	346.000.000,00	250.000.000,00	72,25	351.255.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	423.464.203,02	420.753.247,00	99,36	0,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	6.398.000.000,00	6.395.704.433,00	99,96	3.937.214.672,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	792.803.151,80	744.393.300,00	93,89	599.440.000,00
10	Sekretariat Daerah	11.580.000.000,00	11.516.151.100,00	99,45	12.441.418.000,00
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.141.000,00	80.530.500,00	99,25	73.920.000,00
12	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2.225.035.000,00	2.094.095.340,00	94,12	2.998.522.100,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	12.580.000.000,00	8.104.366.081,00	64,42	13.264.216.448,00
Jumlah		43.939.874.486,32	37.210.809.766,00	84,69	103.297.956.459,44

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.777.747.520,00	1.758.229.458,00	2.507.849.689,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.758.229.458,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp1.777.747.520,00. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.31
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.680.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	695.747.520,00	686.229.458,00	98,63	599.849.689,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial/Kelompok Kemasyarakatan	1.010.000.000,00	1.000.000.000,00	99,01	180.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Jumlah	1.777.747.520,00	1.758.229.458,00	98,90	2.507.849.689,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.32
Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	1.010.000.000,00	1.000.000.000,00	99,01	180.000.000,00
2	Dinas Sosial	447.000.000,00	437.500.000,00	97,87	580.000.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	320.747.520,00	320.729.458,00	99,99	67.849.689,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.680.000.000,00
	Jumlah	1.777.747.520,00	1.758.229.458,00	98,90	2.507.849.689,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
263.477.787.642,72	251.436.796.284,72	374.195.510.225,24

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp251.436.796.284,72 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp263.477.787.642,72. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Rincian Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	742.500.000,00	683.500.000,00	92,05	1.478.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.672.310.560,68	71.019.432.124,00	97,73	106.614.740.833,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.315.440.769,85	111.725.356.633,99	95,23	160.277.154.014,83
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.182.963.412,19	67.448.604.554,73	93,44	105.242.194.176,61
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	470.172.900,00	465.602.972,00	99,03	235.131.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	94.400.000,00	94.300.000,00	99,89	347.790.000,00
Jumlah	263.477.787.642,72	251.436.796.284,72	95,43	374.195.510.225,24



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Realisasi Belanja Modal TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Modal Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	33.570.550.332,85	32.633.244.601,99	97,21	56.638.485.799,51
2	Dinas Kesehatan	101.327.581.612,90	98.331.276.212,00	97,04	155.202.480.459,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.758.514.439,19	75.411.018.475,82	92,24	98.874.942.288,01
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	916.523.373,00	899.216.000,00	98,11	5.659.617.410,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.511.407,00	151.704.600,00	99,47	238.007.071,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.271.288.120,00	1.257.021.515,00	98,88	11.144.404.463,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.284.458.548,00	1.270.472.462,00	98,91	726.939.500,00
8	Dinas Sosial	215.755.400,00	194.459.849,00	90,13	947.542.962,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	617.586.797,50	589.292.104,00	95,42	1.373.643.063,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	538.753.311,00	526.465.000,00	97,72	262.733.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.621.455.634,42	3.601.115.090,00	99,44	3.159.567.650,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.186.166.967,00	1.121.034.000,00	94,51	1.336.602.424,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.209.290.000,00	1.198.303.966,00	99,09	1.059.631.540,97
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	775.024.604,00	771.805.496,00	99,58	282.062.414,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	513.672.337,00	509.030.100,00	99,10	1.265.010.000,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.631.459.102,00	1.615.999.750,00	99,05	4.878.463.602,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	748.761.732,00	702.407.600,00	93,81	1.102.680.000,00
18	Sekretariat Daerah	7.030.293.444,25	5.865.996.092,00	83,44	5.208.399.800,00
19	Sekretariat DPRD	1.060.211.400,00	1.023.177.000,00	96,51	483.223.100,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	961.049.927,00	943.050.250,00	98,13	1.733.557.210,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	623.115.625,00	622.970.000,00	99,98	657.305.000,00
22	Kecamatan Kamipang	408.128.900,00	341.661.000,00	83,71	449.038.820,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	87.505.570,00	87.340.600,00	99,81	104.581.700,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	724.573.270,28	722.523.554,00	99,72	559.963.530,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	486.894.889,90	484.220.000,00	99,45	894.471.157,00
26	Kecamatan Pulau Malan	79.160.201,00	79.140.000,00	99,97	100.160.000,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	398.295.925,00	395.851.487,91	99,39	418.658.980,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	371.365.113,00	365.186.230,00	98,34	477.754.950,00
29	Kecamatan Marikit	339.477.790,48	338.350.000,00	99,67	82.500.000,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	349.795.000,00	348.258.100,00	99,56	317.162.662,50
31	Kecamatan Mendawai	86.002.250,00	85.580.000,00	99,51	31.850.000,00
32	Kecamatan Bukit Raya	55.500.000,00	51.500.000,00	92,79	138.650.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	280.000,00	0,00	0,00	37.785.000,00
34	Inspektorat Daerah	2.581.500.991,00	2.572.344.300,00	99,65	993.310.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	667.841.210,00	576.047.000,00	86,26	841.931.892,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.042.702.628,91	12.976.633.950,00	99,49	13.098.944.256,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.393.919.094,83	1.391.006.064,00	99,79	1.036.559.600,00
38	Badan Pendapatan Daerah	767.041.877,21	764.582.400,00	99,68	1.210.647.015,25
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	623.778.817,00	617.511.435,00	99,00	1.166.241.906,00
Jumlah		263.477.787.642,72	251.436.796.284,72	95,43	374.195.510.225,24



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
742.500.000,00	683.500.000,00	1.478.500.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp683.500.000,00 dan Rp1.478.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	683.500.000,00	683.500.000,00	100,00	1.478.500.000,00
Jumlah		742.500.000,00	683.500.000,00	92,05	1.478.500.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
72.672.310.560,68	71.019.432.124,00	106.614.740.833,80

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp72.672.310.560,68 dan direalisasikan sebesar Rp71.019.432.124,00 atau 97,72%. Terdapat penurunan sebesar Rp35.595.308.709,80 dari realisasi belanja tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.36
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	877.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	3.418.908.675,00	3.383.533.390,00	98,97	4.292.830.503,60
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.200.845.873,00	11.929.627.000,00	97,78	15.849.457.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	530.000.000,00	179.376.000,00	33,84	163.700.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	363.402.800,00	359.623.354,00	98,96	10.543.250,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.967.440,00	2.900.000,00	97,73	2.300.000,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	3.460.000,00	2.400.000,00	69,36	23.410.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	147.270.000,00	145.300.000,00	98,66	28.504.000,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	2.245.379.334,00	2.132.904.065,00	94,97	3.383.545.558,08
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.831.374.675,28	12.697.441.489,00	98,96	15.956.542.869,26
11	Belanja Modal Alat Studio	1.463.455.770,00	1.451.060.550,00	99,15	1.583.391.367,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	322.038.678,40	242.535.493,00	75,31	218.700.288,00
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	44.804.820,00
14	Belanja Modal Peralatan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.421.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Komunikasi Navigasi				
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	7.671.835.140,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	20.012.297.204,00	19.524.871.451,00	97,56	43.012.180.470,00
17	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	179.714.812,00	179.050.000,00	99,63	353.300.000,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	33.600.000,00	0,00	0,00	1.883.714.832,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.703.000.000,00	2.699.175.000,00	99,86	698.550.000,00
20	Belanja Modal Komputer Unit	6.546.572.036,00	6.467.671.044,00	98,79	7.014.271.116,54
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.904.449.361,00	2.812.576.125,00	96,84	2.473.880.461,32
22	Belanja Modal Alat Pelindung	36.630.000,00	36.600.000,00	99,92	220.000.000,00
23	Belanja Modal Alat SAR	164.359.502,00	130.359.300,00	79,31	189.930.640,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	136.109.000,00	120.108.585,00	88,24	34.600.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	21.230.700,00	21.226.000,00	99,98	137.979.450,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.284.444.700,00	5.417.749.803,00	102,52	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.107.300.000,00	1.069.843.475,00	96,62	473.248.068,00
Jumlah		72.672.310.560,68	71.019.432.124,00	97,73	106.614.740.833,80

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	9.898.916.353,00	9.987.205.887,00	100,89	7.618.256.548,80
2	Dinas Kesehatan	33.318.015.222,90	32.327.147.661,00	97,03	71.007.063.273,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.170.544.327,00	1.901.780.350,00	87,62	729.674.700,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	561.523.373,00	545.266.000,00	97,10	410.511.576,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.511.407,00	139.704.600,00	99,43	30.440.991,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	486.288.120,00	474.556.622,00	97,59	2.077.030.396,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	352.018.548,00	351.177.525,00	99,76	660.739.500,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
8	Dinas Sosial	180.325.400,00	172.808.800,00	95,83	120.030.580,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	393.876.797,50	366.142.104,00	92,96	131.643.063,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	188.753.311,00	177.665.000,00	94,13	76.433.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.305.955.634,42	3.288.200.090,00	99,46	2.677.967.650,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	941.766.967,00	879.259.000,00	93,36	341.602.424,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	223.770.000,00	223.770.000,00	100,00	199.300.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	300.142.604,00	297.855.496,00	99,24	232.212.414,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	260.672.337,00	256.668.200,00	98,46	73.010.000,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	147.359.102,00	134.340.000,00	91,17	716.463.602,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	341.761.732,00	337.603.000,00	98,78	326.080.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.097.073.444,25	1.077.444.000,00	98,21	1.417.804.800,00
19	Sekretariat DPRD	1.035.211.400,00	998.257.500,00	96,43	483.223.100,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.141.927,00	360.402.250,00	97,63	735.992.000,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	45.115.625,00	44.970.000,00	99,68	79.305.000,00
22	Kecamatan Kamipang	185.182.244,00	119.136.000,00	64,33	183.738.820,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
23	Kecamatan Tasik Payawan	87.505.570,00	87.340.600,00	99,81	104.581.700,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	260.323.826,28	259.484.110,00	99,68	216.883.530,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	123.419.889,90	121.695.000,00	98,60	355.667.000,00
26	Kecamatan Pulau Malan	79.160.201,00	79.140.000,00	99,97	100.160.000,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	62.540.925,00	62.200.000,00	99,45	158.220.000,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	371.365.113,00	365.186.230,00	98,34	477.754.950,00
29	Kecamatan Marikit	339.477.790,48	338.350.000,00	99,67	82.500.000,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	81.795.000,00	81.751.000,00	99,95	63.025.918,00
31	Kecamatan Mendawai	86.002.250,00	85.580.000,00	99,51	31.850.000,00
32	Kecamatan Bukit Raya	55.500.000,00	51.500.000,00	92,79	98.650.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	0,00	0,00	0,00	37.785.000,00
34	Inspektorat Daerah	944.260.991,00	938.094.300,00	99,35	366.210.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	667.841.210,00	576.047.000,00	86,26	444.131.892,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.028.522.628,91	10.977.583.900,00	99,54	11.789.118.400,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.343.919.094,83	1.341.056.064,00	99,79	937.769.600,00
38	Badan Pendapatan Daerah	637.321.377,21	635.532.400,00	99,72	467.734.000,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	559.428.817,00	557.531.435,00	99,66	554.175.406,00
Jumlah		72.672.310.560,68	71.019.432.124,00	97,72	106.614.740.833,80



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
117.315.440.769,85	111.725.356.633,99	160.277.154.014,83

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp117.315.440.769,85 dan direalisasikan sebesar Rp111.725.356.633,99 atau 95,23%. Terdapat penurunan realisasi Belanja sebesar Rp48.551.797.380,84 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.826.760.769,85	107.142.628.811,99	95,81	157.904.615.720,83
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.539.920.000,00	1.654.550.000,00	65,14	242.090.600,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.698.760.000,00	2.678.263.522,00	99,24	1.734.603.694,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	250.000.000,00	249.914.300,00	99,97	363.844.000,00
Jumlah		117.315.440.769,85	111.725.356.633,99	95,23	160.277.154.014,83

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	23.169.461.079,85	22.207.435.742,99	95,85	48.785.098.050,71
2	Dinas Kesehatan	68.009.566.390,00	66.004.128.551,00	97,05	83.050.645.685,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.049.079.700,00	9.645.104.996,00	87,29	1.299.309.909,90
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	0,00	0,00	0,00	1.880.520.718,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	596.440.000,00	585.463.800,00	98,16	66.200.000,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	223.710.000,00	223.150.000,00	99,75	1.242.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian	350.000.000,00	348.800.000,00	99,66	186.300.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
8	Dinas Lingkungan Hidup	315.500.000,00	312.915.000,00	99,18	481.600.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	200.000.000,00	197.425.000,00	98,71	995.000.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	474.882.000,00	473.950.000,00	99,80	49.850.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	200.000.000,00	199.478.000,00	99,74	1.192.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	538.600.000,00	537.000.000,00	99,70	2.394.100.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	367.000.000,00	364.804.600,00	99,40	159.600.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	985.520.000,00	974.533.966,00	98,89	860.331.540,97
15	Sekretariat Daerah	5.933.220.000,00	4.788.552.092,00	80,71	3.790.595.000,00
16	Sekretariat DPRD	25.000.000,00	24.919.500,00	99,68	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	381.565.210,00
18	Kecamatan Kamipang	222.946.656,00	222.525.000,00	99,81	265.300.000,00
19	Kecamatan Katingan Hilir	159.299.444,00	159.299.444,00	100,00	343.080.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	397.800.000,00
21	Dinas Perhubungan dan Perikanan	64.350.000,00	59.980.000,00	93,21	33.466.500,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.800.000.000,00	1.785.000.000,00	99,17	1.110.225.856,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	207.566.080,00
24	Badan Pendapatan Daerah	129.720.500,00	129.050.000,00	99,48	742.913.015,25
25	Inspektorat Daerah	1.637.240.000,00	1.634.250.000,00	99,82	128.100.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	785.000.000,00	782.464.893,00	99,68	9.067.374.067,00
27	Dinas Sosial	35.430.000,00	21.651.049,00	61,11	827.512.382,00
28	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	43.475.000,00	43.475.000,00	100,00	339.100.000,00
Jumlah		117.315.440.769,85	111.725.356.633,99	95,23	160.277.154.014,83

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
72.182.963.412,19	67.448.604.554,73	105.242.194.176,61

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp72.182.963.412,119 dan direalisasikan sebesar Rp67.448.604.554,73 atau 93,44%. Terdapat penurunan realisasi Belanja sebesar Rp37.793.589.621,88 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.1.40
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.539.734.292,65	54.047.756.642,27	92,33	87.595.307.011,63
2	Belanja Modal Bangunan Air	13.360.229.119,54	13.118.957.262,46	98,19	15.898.397.164,98
3	Belanja Modal Instalasi	283.000.000,00	281.890.650,00	99,61	349.250.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.399.240.000,00
Jumlah		72.182.963.412,19	67.448.604.554,73	93,44	105.242.194.176,61

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.144.771.501,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.538.890.412,19	63.864.133.129,82	93,18	96.845.957.678,11
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	355.000.000,00	353.950.000,00	99,70	3.368.585.116,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	336.000.000,00	333.831.137,00	99,35	0,00
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	247.000.000,00	246.159.750,00	99,66	289.400.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.000.000,00	0,00	0,00	617.000.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu	591.908.000,00	582.648.000,00	98,44	616.000.000,00
8	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	329.600.000,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	214.180.000,00	214.050.050,00	99,94	199.600.000,00
10	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	499.000.000,00
11	Kecamatan Katingan Kuala	578.000.000,00	578.000.000,00	100,00	578.000.000,00
12	Kecamatan Katingan Hilir	304.950.000,00	303.740.000,00	99,60	0,00
13	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	320.000.000,00	319.050.000,00	99,70	199.704.157,00
14	Kecamatan Katingan Tengah	335.755.000,00	333.651.487,91	99,37	260.438.980,00
15	Kecamatan Katingan Hulu	268.000.000,00	266.507.100,00	99,44	254.136.744,50
16	Kecamatan Bukit Raya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	53.000.000,00	52.883.900,00	99,78	0,00
18	Kecamatan Petak Malai	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		72.182.963.412,19	67.448.604.554,73	93,44	105.242.194.176,61



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
470.172.900,00	465.602.972,00	235.131.200,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp470.172.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp465.602.972,00 atau 99,02%. Terdapat kenaikan realisasi Belanja sebesar Rp230.471.772,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	443.172.900,00	438.602.972,00	98,97	235.131.200,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		470.172.900,00	465.602.972,00	99,02	235.131.200,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan	443.172.900,00	438.602.972,00	98,97	235.131.200,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		470.172.900,00	465.602.972,00	99,02	235.131.200,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
94.400.000,00	94.300.000,00	347.790.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp94.400.000,00 dan direalisasikan Rp94.300.000,00 atau 99,89%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengadaan *software* pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	249.000.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	98.790.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.400.000,00	44.350.000,00	99,88	0,00
Jumlah		94.400.000,00	94.300.000,00	99,89	347.790.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
800.000.000,00	291.942.800,00	1.605.409.963,00

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp291.942.800,00 atau 36,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.44
Rincian Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)	
Uraian	Realisasi 2025
Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Setoran Retribusi Daerah PT. Insan Mulia Raya	50.000.000,00
Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran berdasarkan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. RISNADUAR, MAP	241.942.800,00
Jumlah	291.942.800,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
241.086.932.800,00	230.979.642.304,00	227.161.662.514,70

Belanja Transfer TA 2025 dianggarkan sebesar Rp241.086.932.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp230.979.642.304,00 atau 95,80% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp227.161.662.541,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.45
Belanja Transfer

(dalam rupiah)				
Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Transfer Bagi Hasil	7.500.000.000,00	7.499.999.988,00	99,99	6.446.126.714,70
Transfer Bantuan Keuangan	233.586.932.800,00	223.479.642.316,00	95,67	220.715.535.800,00
Jumlah	241.086.932.800,00	230.979.642.304,00	95,80	227.161.662.514,70

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
7.500.000.000,00	7.499.999.988,00	6.446.126.714,70

Transfer Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan direalisasikan Rp7.499.999.988,00 atau 99,99% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.46
Realisasi Transfer Bagi Hasil

(dalam rupiah)				
Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.000.000.000,00	4.999.999.993,25	99,99	4.973.382.942,25
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.500.000.000,00	2.499.999.994,75	99,99	1.472.743.772,45
Jumlah	7.500.000.000,00	7.499.999.988,00	99,99	6.446.126.714,70



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Rincian atas realisasi Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa disajikan pada **Lampiran 2**.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
233.586.932.800,00	223.479.642.316,00	220.715.535.800,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp233.586.932.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp223.479.642.316,00 atau 95,67%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (DD) yang didalamnya terbagi atas Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW, Perpudes dan Mantir Adat, serta Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang diberikan kepada Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.47
Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa	125.810.534.516,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa	96.871.107.800,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota Kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat Desa	798.000.000,00
Jumlah		223.479.642.316,00

Rincian atas realisasi Transfer Bantuan Keuangan disajikan pada **Lampiran 3**.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
54.678.265.555,97	54.259.179.609,97	56.623.488.153,98

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 berasal dari penggunaan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp54.259.179.609,97.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
0,00	0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan realisasi pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo serta pemberian pinjaman daerah. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2025 tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
0,00	3.926.908.942,50	54.678.265.555,97

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.926.908.942,50 yang mengalami penurunan sebesar Rp50.751.356.613,47 dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp54.678.265.555,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.47
Rincian SiLPA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik / (Turun)
1	Kas di Kas Daerah	234.134.451,92	47.601.787.155,20	(47.367.652.703,28)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	52.735.500,00	(52.735.500,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	180.297.589,00	900,00	180.296.689,00
4	Kas di BLUD	12.881.789,09	3.168.405.006,63	(3.155.523.217,54)
5	Kas di Bendahara BOS	1.051.347.171,74	1.113.359.385,22	(62.012.213,48)
6	Kas di Bendahara FKTP	1.170.264.651,75	75.557.741,92	1.094.706.909,83
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.277.983.289,00	2.666.419.867,00	(1.388.436.578,00)
Jumlah		3.926.908.942,50	54.678.265.555,97	(50.751.356.613,47)

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi SiLPA dan SAL Akhir.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. SAL Awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp54.678.265.555,97 dan Rp56.595.994.999,98.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2025	Tahun 2024
54.259.179.609,97	56.623.488.153,98

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp54.259.179.609,97 dan Rp56.623.488.153,98.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	Tahun 2025 3.926.908.942,50	Tahun 2024 54.678.265.555,97
-------	---	--------------------------------	---------------------------------

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan. SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.926.908.942,50 dan Rp54.678.265.555,97.

5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2025 (419.085.946,00)	Tahun 2024 27.493.154,00
-------	--	--------------------------------	-----------------------------

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi atas SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp419.085.946,00) dan Rp27.493.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Koreksi Sisa Dana BOS	0,00	27.493.154,00
2	Koreksi SiLPA - Kas di Bendahara BOS Reguler SMPN 1 dan SMPN 5 Katingan Hilir	2.063.154,00	0,00
3	Koreksi SiLPA - Kas di Bendahara BOP PAUD Swasta yang masih tercatat pada SiLPA 2024	(421.149.100,00)	0,00
Jumlah		(419.085.946,00)	27.493.154,00

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2025 3.926.908.942,50	Tahun 2024 54.678.265.555,97
-------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.926.908.942,50 dan Rp54.678.265.555,97.

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintahan Kabupaten Katingan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan saldo Aset sebesar Rp3.453.580.525.516,45. Kewajiban sebesar Rp18.733.161.709,19 dan Ekuitas sebesar Rp3.434.847.363.807,26.

5.3.1	Aset	31 Desember 2025 3.453.580.525.516,45	31 Desember 2024 3.428.072.450.255,13
-------	------	--	--

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.453.580.525.516,45 atau mengalami penambahan sebesar Rp25.508.075.261,32 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.428.072.450.255,13 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.1
Rincian Aset

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
Aset Lancar	77.649.667.666,60	111.328.735.850,97	(33.679.068.184,37)
Investasi Jangka Panjang	98.462.782.165,66	98.462.782.165,66	0,00
Aset Tetap	3.150.382.649.310,89	3.089.410.407.772,84	60.972.241.538,05
Aset Lainnya	127.085.426.373,30	128.870.524.465,66	(1.785.098.092,36)
Jumlah	3.453.580.525.516,45	3.428.072.450.255,13	25.508.075.261,32

5.3.1.1	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		77.649.667.666,60	111.328.735.850,97

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas serta aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.649.667.666,60 yang mengalami penurunan sebesar Rp33.679.068.184,37 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp111.328.735.850,97 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
Kas di Kas Daerah	234.134.451,92	47.601.787.155,20	(47.367.652.703,28)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	52.735.500,00	(52.735.500,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	180.297.589,00	900,00	180.296.689,00
Kas di BLUD	12.881.789,09	3.168.405.006,63	(3.155.523.217,54)
Kas di Bendahara BOS	1.051.347.171,74	1.113.359.385,22	62.012.213,48
Kas di Bendahara FKTP	1.170.264.651,75	75.557.741,92	1.094.706.909,83
Kas Dana BOK Puskesmas	1.277.983.289,00	2.666.419.867,00	(1.388.436.578,00)
Piutang Pajak Daerah	12.441.876.514,00	9.279.720.022,00	3.162.156.492,00
Piutang Retribusi daerah	42.878.641,00	44.378.641,00	(1.500.000,00)
Piutang lain-lain PAD yang sah	1.493.127.305,39	1.989.484.094,00	(496.356.788,61)
Piutang Transfer antar Daerah	14.924.594.624,00	12.405.915.204,00	(2.518.679.420,00)
Piutang Lainnya	2.430.785.343,75	4.079.368.385,31	(1.648.583.041,56)
Penyisihan Piutang	(14.054.930.616,88)	(5.626.270.107,69)	(8.428.660.509,199)
Persediaan	56.444.426.912,84	34.477.874.056,38	21.966.552.856,46
Jumlah	77.649.667.666,60	111.328.735.850,97	(33.679.068.184,37)

5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		234.134.451,92	47.601.787.155,20

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah terdiri Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp234.134.451,92 yang mengalami penurunan sebesar Rp47.367.652.703,28 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp47.601.787.155,20 dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

Uraian/Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Naik / (Turun)
Nomor Rekening 1050101000005 atas nama RKUD Kab. Katingan	234.134.451,92	47.601.787.155,20	99,51	(47.367.652.703,28)
Jumlah	234.134.451,92	47.601.787.155,20	99,51	(47.367.652.703,28)

Berdasarkan tabel diatas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp234.134.451,92 berbeda dengan saldo di Rekening Kas Daerah Nomor 1050101000005 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp278.534.451,92, yakni terdapat selisih sebesar Rp44.400.000,00. Adapun penjelasan selisih tersebut dikarenakan Bank kurang posting nilai SP2D dengan nomor 62.06/04.0/000104/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebesar Rp44.400.000,00. Atas hal tersebut telah disesuaikan oleh Bank Kalteng pada tanggal 05 Januari 2026

Saldo Kas di Kas Daerah disajikan senilai Rp234.134.451,92, saldo tersebut seluruhnya merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Rincian Kas di Kas Daerah per sumber dana disajikan pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	52.735.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp52.735.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp52.735.500,00 merupakan saldo pada Dinas Kesehatan yakni pada Bendahara Penerimaan RS Pratama Tumbang Samba yang merupakan penerimaan atas klaim rawat inap dan klaim persalinan atas Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Saldo Kas tersebut telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah (RKUD) melalui dua kali penyetoran yaitu pada tanggal 27 Februari 2025 senilai Rp51.018.500,00 dan tanggal 12 Maret 2025 senilai Rp1.717.000,00.
- Terdapat penerimaan pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp320.613.209. Atas hal tersebut, telah dilakukan tindak lanjut melalui penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah pada Tahun 2026.

5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		180.297.589,00	900,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp180.297.589,00 dan Rp900,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.4
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	Kec. Katingan Hilir	0,00	900,00	(900,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	65.852.302,00	0,00	0,00
4	Kec. Sanaman Mantikei	89.445.287,00	0,00	0,00
Jumlah		180.297.589,00	900,00	(900,00)

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 pada Kecamatan Katingan Hilir merupakan saldo atas sisa Tambahan Uang (TU) yang sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 14 Januari 2025 sesuai dengan STS Nomor 62.06/07.0/000001/tyl/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR2/2/2025 senilai Rp900,00.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 pada tiga SKPD senilai Rp180.297.589,00 merupakan Sisa Uang Persediaan Tahun 2025 yang terlambat disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan baru disetorkan pada Tahun 2026 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BPPD per 31 Desember 2025 senilai Rp25.000.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 Januari 2026 berdasarkan STS Nomor a006200007/105/a0062 senilai Rp25.000.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 senilai Rp65.852.302,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Januari 2026 berdasarkan STS Nomor 001300024/105/g0011 senilai Rp65.852.302,00
 - Kecamatan Sanaman Mantikei
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sanaman Mantikei per 31 Desember 2025 senilai Rp89.445.287,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Mei 2026 berdasarkan STS Nomor a010900034/104/a0109 senilai Rp89.445.287,00

5.3.1.1.4 Kas di BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	12.881.789,09	3.168.405.006,63

Kas di BLUD merupakan saldo Kas pada BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.881.789,09 dan Rp3.168.405.006,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.5
Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik / (Turun)
Saldo Kas pada Bank Kalteng Nomor 105-003-000001514-8	4.219.676,09	3.168.405.006,63	(3.164.185.330,54)
Saldo Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan	8.662.113,00	52.735.500,00	(44.073.387,00)
Jumlah	12.881.789,09	3.221.140.506,63	(3.208.258.717,54)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat penurunan saldo Kas di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan sebesar Rp3.208.258.717,54 dari tahun sebelumnya. Perubahan yang signifikan pada saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dikarenakan terdapat Kas di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.32/632 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pemindahan Sebagian Dana Kas Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan melalui pemindahbukuan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp2.000.000.000,00

Atas Kas di BLUD yang dipinjam tersebut, telah disetorkan kembali ke rekening BLUD RSUD Mas Amsyar pada tanggal 5 Januari 2026 senilai Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Cek No GKG323684.

Selain itu, Laporan Keuangan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Buntaran & Lisawati dan memperoleh Opini Wajar sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor Independen Buntaran & Lisawati dengan Nomor 00026/2.0915/AU.5/11/0892-1/1/IV/2026 tanggal 8 April 2026. (Laporan disajikan pada **Lampiran 5**).

Adapun, mutasi Kas di Bendahara BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.5
Saldo Kas di BLUD Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Bulan	Pendapatan	Belanja	Saldo
Saldo Awal				3.168.405.006,63
1	Januari	882.765.698,00	0,00	4.051.170.704,63
2	Februari	2.153.541.235,00	1.147.415.021,00	5.057.296.918,63
3	Maret	4.390.008.334,00	3.841.659.555,55	5.605.645.697,08
4	April	1.773.042.354,00	0,00	7.378.688.051,08
5	Mei	1.900.762.095,00	3.965.986.139,83	5.313.464.006,25
6	Juni	1.389.493.485,00	2.801.434.274,13	3.901.523.217,12
7	Juli	2.835.628.135,00	1.588.978.753,32	5.148.172.598,80
8	Agustus	1.735.809.647,00	1.253.276.051,90	5.630.706.193,90
9	September	3.043.693.780,00	2.729.056.447,64	5.945.343.526,26
10	Oktober	2.151.616.799,00	482.866.129,00	7.614.094.196,26
11	November	1.965.363.610,00	1.782.425.734,39	7.797.032.071,87
12	Desember	1.828.563.574,00	9.612.713.856,78	12.881.789,09
Jumlah		26.050.288.746,00	29.205.811.963,54	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2025

1.051.347.171,74

31 Desember 2024

1.113.359.385,22

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.051.347.171,74 dan Rp1.113.359.385,22. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.012.213,48 dari saldo tahun sebelumnya. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 merupakan saldo pada 202 SD Negeri, 75 SMP Negeri, 20 PAUD Negeri dan 1 BOP kesetaraan serta Bantuan Sosial Pendidikan pada Tahun 2016 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Rincian Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
Dana BOS Afirmasi						
- SDN	267.702.078,00		267.702.078,00	0,00	0,00	267.702.078,00
- SMPN	2.313.950,00		2.313.950,00	0,00	0,00	2.313.950,00
Dana BOS Kinerja						
- SDN	45.519.429,00		45.519.429,00	765.000.000,00	642.677.500,00	167.841.929,00
- SMPN	105.508.068,00		105.508.068,00	540.750.000,00	577.940.200,00	68.317.868,00
Dana BOS Reguler						
- SDN	81.645.365,24		81.645.365,24	18.567.737.932,00	18.537.584.853,20	111.798.444,04
- SMPN	164.870.512,78	2.063.154,00	166.933.666,78	9.666.835.480,00	9.423.185.126,28	410.584.020,50
BOS PAUD	445.761.100,00	(421.149.100,00)	24.612.000,00	2.712.732.000,00	2.714.594.000,00	22.750.000,00
BOS Pendidikan Kesetaraan	0,00			36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
Bansos Pendidikan	38.882,20		38.882,20	0,00	0,00	38.882,20
Jumlah	1.113.359.385,22	(419.085.946,00)	694.273.439,22	34.760.404.412,00	34.403.330.679,48	1.051.347.171,74

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat koreksi SILPA Tahun sebelumnya senilai Rp419.085.946,00 yang merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara BOS SMPN senilai Rp2.063.154,00 (SMPN 1 Katingan Hilir senilai Rp414.000,00 dan SMPN 5 Katingan Hilir senilai Rp1.649.154,00) serta koreksi atas Saldo Kas di Bendahara BOS PAUD senilai Rp421.149.100,00 yang merupakan saldo Kas di Bendahara BOS PAUD Swasta.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per sekolah per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran 6.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2025

1.170.264.651,75

31 Desember 2024

75.557.741,92

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.170.264.651,75 dan Rp75.557.741,92. Saldo Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.094.706.909,83 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pagu anggaran belanja pada DPA tidak sebanding dengan Transferan yang diterima dari BPJS sehingga belanja pada FKTP tidak dapat terealisasi dengan maksimal

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo Kas yang terdapat pada Bank Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2025, realisasi Pendapatan senilai



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Rp8.886.917.851,00 dan Belanja senilai Rp7.792.210.941,17 dengan rincian pada 17 FKTP sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Rincian Kas di Bendahara FKTP
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama FKTP	Nomor rekening	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)
1	UPTD Kesehatan P Bahandang	1050102001480	15.627,04	312.155.925,00	275.640.086,43	36.531.465,61
2	UPTD Kesehatan Baun Bango	1050102001485	45,74	382.010.651,00	332.257.674,02	49.753.022,72
3	UPTD Kesehatan Mendawai	1080102000028	428.266,49	345.681.896,00	313.521.448,73	32.588.713,76
4	UPTD Kesehatan Pegatan 1	10801020000031	9.547.684,17	489.034.018,00	421.569.913,70	77.011.788,47
5	UPTD Kesehatan Pegatan 2	1080102000011	30.023.055,97	453.076.211,00	429.550.039,88	53.549.227,09
6	UPTD Kesehatan Kasongan	1050102001482	79.614,90	652.975.075,00	537.362.909,33	115.691.780,57
7	UPTD Kesehatan Kasongan 2	1050102001483	434.397,39	584.476.240,00	506.829.200,00	78.081.437,39
8	UPTD Kesehatan Kereng Pangi	1050102001490	254,73	825.331.596,00	739.779.159,00	85.552.691,73
9	UPTD Kesehatan Pendahara	1050102001481	11.477,42	534.640.089,00	473.474.153,69	61.177.412,73
10	UPTD Kesehatan Buntut Bali	1050102001479	383.482,06	433.534.509,00	385.249.954,24	48.668.036,82
11	UPTD Kesehatan T Samba	1040102000102	111.813,44	1.112.200.681,00	951.403.191,11	160.909.303,33
12	UPTD Kesehatan T Kaman	1040102000100	11.506.575,15	590.795.007,00	481.773.327,76	120.528.254,39
13	UPTD Kesehatan T Hiran	1040102000106	25.483,98	293.312.612,00	230.670.625,66	62.667.470,32
14	UPTD Kesehatan T Sanamang	1040102000104	21.671.000,90	446.613.690,00	395.343.506,00	72.941.184,90
15	UPTD Kesehatan T Kajamei	1040102000105	727.014,41	207.179.564,00	187.327.087,09	20.579.491,32
16	UPTD Kesehatan T Baraoi	1040102000103	591.099,25	193.768.568,00	173.780.643,53	20.579.023,72
17	RS Pratama Tumbang Samba	1040102000102	848,88	1.030.131.519,00	956.678.021,00	73.454.346,88
JUMLAH			75.557.741,92	8.886.917.851,00	7.792.210.941,17	1.170.264.651,75

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2025

1.277.983.289,00

31 Desember 2024

2.666.419.867,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.277.983.289,00 dan Rp2.666.419.867,00. Saldo Kas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.388.436.578,00 dari saldo Kas tahun sebelumnya. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo Kas yang terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI). Rincian mutasi saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada 16 (enam belas) Puskesmas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Rincian Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Saldo
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	PEGATAN I	1590066367	139.794.595,00	860.205.405,00	965.894.066	34.105.934
2	PEGATAN II	1591065998	289.939.384,00	710.060.616,00	769.799.788	230.200.212
3	MENDAWAI	1590066323	146.773.009,00	853.226.991,00	954.918.502	45.081.498
4	BAUN BANGO	1590066378	264.081.347,00	685.918.653,00	822.309.182	127.690.818
5	PETAK BAHANDANG	1590066301	120.475.341,00	779.524.659,00	858.102.728	41.897.272
6	KASONGAN	1590066276	185.339.629,00	614.660.371,00	694.976.740	105.023.260
7	KERENG PANGI	1590066243	74.219.427,00	725.780.573,00	774.801.743	25.198.257
8	KASONGAN II	1590066265	314.260.189,00	285.739.811,00	553.564.546	46.435.454



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Saldo
9	PENDAHARA	1590066312	97.694.428,00	702.305.572,00	732.258.736	67.741.264
10	BUNTUT BALI	1590066298	102.678.555,00	697.321.445,00	687.029.331	112.970.669
11	TUMBANG SAMBA	1590066345	116.513.250,00	883.486.750,00	952.092.000	47.908.000
12	TUMBANG KAMAN	1590066334	124.652.042,00	675.347.958,00	710.670.940	89.329.060
13	TUMBANG BARAOI	1590066356	255.631.915,00	644.368.085,00	731.413.876	168.586.124
14	TUMBANG HIRAN	1590066389	260.524.788,00	639.475.212,00	800.852.467	99.147.533
15	TUMBANG SENAMANG	1590066287	102.611.415,00	897.388.585,00	995.006.651	4.993.349
16	TUMBANG KAJAMEI	1590066254	71.230.553,00	786.664.447,00	826.220.415	31.674.585
Jumlah			2.666.419.867,00	11.441.475.133,00	12.829.911.711	1.277.983.289

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	12.441.876.514,00	9.279.720.022,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp12.441.86.514,00 dan Rp9.279.720.022,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.162.156.492,00 dari saldo tahun sebelumnya. Saldo Piutang Pajak Daerah merupakan tagihan pajak kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Pajak Hotel	9.085.000,00	0,00	0,00	9.085.000,00
Piutang Pajak Restoran	100.568.849,00	0,00	0,00	100.568.849,00
Piutang Pajak Hiburan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Piutang Pajak Reklame	6.809.073,00	0,00	0,00	6.809.073,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	928.172.414,00	992.758.407,00	928.172.414,00	992.758.407,00
Piutang PBB-P2	8.227.834.686,00	1.262.404.655,00	211.746.156,00	9.278.493.185,00
Piutang BPHTB	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	2.046.912.000,00	0,00	2.046.912.000,00
Jumlah	9.279.720.022,00	4.302.075.062,00	1.139.918.570,00	12.441.876.514,00

Adapun kelompok Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2025 berdasarkan kualitas piutang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang Pajak	Kategori Piutang				Jumlah Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Pajak Hotel				9.085.000,00	9.085.000,00
2	pajak restoran				100.568.849,00	100.568.849,00
3	Pajak Hiburan				3.500.000,00	3.500.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	992.758.407,00				992.758.407,00
5	Pajak Reklame				6.809.073,00	6.809.073,00
6	PBB P2	6.312.023,28	185.230.007,30	491.572.036,00	5.180.644.385,00	9.278.493.185,00
7	BPHTB				3.750.000,00	3.750.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian Piutang Pajak	Kategori Piutang				Jumlah Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.046.912.000,00				2.046.912.000,00

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel merupakan tagihan atas Pajak Hotel atas 29 Wajib Pajak (WP) yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Rincian Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2025
1.	2014	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	2015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.	2016	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
4.	2020	7.190.000,00	0,00	0,00	7.190.000,00
Jumlah		9.085.000,00	0,00	0,00	9.085.000,00

Adapun rincian Piutang Pajak Hotel per WP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Rincian Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Nama Objek Pajak	Nama WP	Saldo per 31 Desember 2025
1.	1.00000887.05.05	LOSMEN AMAN	KURYADI	1.920.000,00
2.	1.00003603.05.09	HOTEL ZAHRA	H. LASMAN	650.000,00
3.		LOSMEN AL-FATAH	H. GAJALI	600.000,00
4.	1.00000341.05.05	LOSMEN ITAH	YANITO, SP	500.000,00
5.	1.00000338.05.05	LOSMEN TALENTA	CILIK TANJUNG	150.000,00
6.	1.00003604.05.05	LOSMEN SEJAHTERA	H. RUSDI	100.000,00
7.	1.00003907.05.05	LOSMEN BERLIAN	RUDIANSYAH	75.000,00
8.		LOSMEN SEJAHTERA	H. RUSDI	100.000,00
9.		LOSMEN TARA	TANDUN	1.350.000,00
10.		LOSMEN TIYO AMANDA	AGUS	1.800.000,00
11.		LOSMEN GENERASI	SUPEL	100.000,00
12.		LOSMEN PUTRA SIBITAN	HOTMAN	50.000,00
13.		LOSMEN CITRA KANDUANG	HJ. SALBIAH	600.000,00
14.		LOSMEN KLISNA	H. ASANG TRIASHA	300.000,00
15.	1.00007393.10.01	LOSMEN AZKADINA	FARIDAH	250.000,00
16.		LOSMEN LINDA	MARLIANSYAH	300.000,00
17.		LOSMEN SEDERHANA	NORDIAH	240.000,00
Jumlah				9.085.000,00

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran merupakan hak Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul dari pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, warung, atau jasa boga/catering atas penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan yang belum dibayarkan oleh 688 wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut, adapun rincian Piutang Pajak Restoran per WP per 31 desember 2025 disajikan pada **Lampiran 7**.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.11
Piutang Pajak Restoran

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	2012	1.449.200,00	0,00	0,00	1.449.200,00
2.	2013	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
3.	2014	5.421.649,00	0,00	0,00	5.421.649,00
4.	2015	2.875.500,00	0,00	0,00	2.875.500,00
5.	2016	32.744.000,00	0,00	0,00	32.744.000,00
6.	2017	17.905.000,00	0,00	0,00	17.905.000,00
7.	2018	18.270.000,00	0,00	0,00	18.270.000,00
8.	2019	4.555.000,00	0,00	0,00	4.555.000,00
9.	2020	16.870.000,00	0,00	0,00	16.870.000,00
Jumlah		100.568.849,00	0,00	0,00	100.568.849,00

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan merupakan hak pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul dari kegiatan hiburan dengan lokasi di Wilayah Kabupaten Katingan, atas kewajiban penyeteroran pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh 2 wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Piutang Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	2015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	2017	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Jumlah		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Adapun rincian Piutang Pajak Hiburan per WP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang Pajak Hiburan per WP

(dalam rupiah)

No.	Nama WP	Nama Objek Pajak	Saldo per 31 Desember 2025
1.	JEFFRY SUPRIADI	Pajak Hiburan	
2.	KEJUDRA MOTOPRIX PUTARAN I	Pajak Hiburan	
Jumlah			3.500.000,00

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame merupakan hak pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul dari penyelenggaraan reklame, atas kewajiban penyeteroran pajak reklame yang belum dibayarkan oleh 4 wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	2013	5.650.323,00	0,00	0,00	5.650.323,00
2.	2014	1.158.750,00	0,00	0,00	1.158.750,00
Jumlah		6.809.073,00	0,00	0,00	6.809.073,00

Adapun rincian Piutang Pajak Reklame per WP disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.15
Piutang Pajak Reklame per WP

(dalam rupiah)

No.	Nama WP	Nama Objek Pajak	Saldo per 31 Desember 2025
1.	SUHERMAN	Pajak Reklame	4.031.301,00
2.	RILIUS INDRAWAN,SH	Pajak Reklame	1.620.022,00
3.	SUPER	Pajak Reklame	690.000,00
4.	PAGER	Pajak Reklame	468.750,00
Jumlah			6.809.073,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Surat pihak PLN Nomor 0297/KEU.01.06/F13000000/2026 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) Bulan Desember 2025, Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan hak pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul dari kegiatan hiburan, atas kewajiban penyetoran Pajak Penerangan Jalan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 atas penggunaan tenaga listrik yang dimanfaatkan untuk penerangan jalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Piutang Pajak Penerangan jalan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	PPJ PLN	928.172.414,00	992.758.407,00	928.172.414,00	992.758.407,00
Jumlah		928.172.414,00	992.758.407,00	928.172.414,00	992.758.407,00

f. Piutang PBB-P2

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan hak pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi serta bangunan yang berada di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Piutang Pajak PBB-P2

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	2012	1.378.233.006,00	0,00	5.170.656,00	1.373.062.350,00
2.	2013	490.602.566,00	0,00	2.571.066,00	488.031.500,00
3.	2014	346.321.682,00	0,00	1.524.300,00	344.797.382,00
4.	2015	303.737.138,00	0,00	2.808.001,00	300.929.137,00
5.	2016	363.393.842,00	0,00	2.877.205,00	360.516.637,00
6.	2017	497.922.387,00	0,00	5.229.613,00	492.692.774,00
7.	2018	606.259.729,00	0,00	6.560.252,00	599.699.477,00
8.	2019	820.677.548,00	0,00	6.285.312,00	814.392.236,00
9.	2020	415.431.898,00	0,00	8.909.006,00	406.522.892,00
10.	2021	450.301.289,00	0,00	12.591.555,00	437.709.734,00
11.	2022	561.141.159,00	0,00	15.706.821,00	545.434.338,00
12.	2023	831.209.991,00	0,00	30.913.620,00	800.296.371,00
13.	2024	1.162.602.451,00	0,00	110.598.749,00	1.052.003.702,00
14.	2025	0,00	1.262.404.655,00	0,00	1.262.404.655,00
Jumlah		8.227.834.686,00	1.262.404.655,00	211.746.156,00	9.278.493.185,00

g. Piutang BPHTB

Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), merupakan hak pemerintah Kabupaten Katingan untuk menagih pajak yang timbul atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemberian hak baru dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang belum dibayarkan oleh 3 wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2025 :



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.18
Piutang BPHTB

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025
1.	2019	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.	2020	750.000,00	0,00	750.000,00
Jumlah		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

Adapun rincian Piutang BPHTB per WP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Piutang BPHTB per WP

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Nama WP	Nama Objek Pajak	Saldo per 31 Desember 2025
1.	62112100040015000	PRIMUS RUSMIN	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000,00
2.	621121000400151000	RICKY DARMAWAN	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000,00
3.	6206200912630000	GEREJA BAPTIS INDONESIA IMANUE	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000,00
Jumlah				3.750.000,00

h. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) per 31 Desember 2025 senilai Rp2.046.912.000,00 merupakan Piutang pada Badan Pendapatan Daerah yang merupakan kekurangan penerimaan atas pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sesuai Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.13/246/BAPENDA-2/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 pada PT. Global Makmur Borneo.

5.3.1.1.9	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		42.878.641,00	44.378.641,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp42.878.641,00 dan Rp44.378.641,00. Terdapat penurunan dari saldo tahun sebelumnya senilai Rp1.500.000,00.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Badan Pendapatan Daerah, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Badan Pendapatan Daerah dengan Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.20
Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2025
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Badan Pendapatan Daerah	4.450.001,00	4.450.001,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	990.000,00	990.000,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	38.938.640,00	37.438.640,00
Jumlah		44.378.641,00	42.878.641,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Adapun kelompok Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2025 berdasarkan kualitas piutang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Kelompok Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang Retribusi	Kategori Piutang				Jumlah Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar				4.450.001,00	4.450.001,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				990.000,00	990.000,00
3.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		37.438.640,00			37.438.640,00
Jumlah		0,00	37.438.640,00	0,00	5.440.001,00	42.878.641,00

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 senilai Rp4.450.001,00 merupakan Piutang atas Pelayanan Pasar pada Blok Pasar Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah yang terdiri dari 3 Wajib Retribusi (WR) sejak Tahun 2015 yang belum melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2025.

Adapun rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per WR disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.22
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per WR

(dalam rupiah)

No.	Nama Pihak Terutang	Nama Objek Retribusi	Saldo per 31 Desember 2025
1.	EDI CANDRA	Pasar Tumbang Samba	2.500.000,00
2.	ANDRE NALELO	Pasar Tumbang Samba	650.000,00
3.	SEDEM. BADRU ZAMAN	Pasar Tumbang Sambar	650.000,00
4.	SEDEM. BADRU ZAMAN	Pasar Tumbang Samba	650.000,00
5.	SEDEM. BADRU ZAMAN	Pasar Tumbang Sambar	1,00
Jumlah			4.450.001,00

b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp990.000,00 merupakan Piutang atas Retribusi Sewa Bangunan Aula Badan Pendapatan Daerah pada 1 Wajib Retribusi (WR) sejak Tahun 2014 yang belum melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2025.

Adapun rincian Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah per WR disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah per WR

(dalam rupiah)

No.	Nama Pihak Terutang	Nama Objek Retribusi	Saldo per 31 Desember 2025
1.	FAHRUL RAZI	Retribusi Sewa Bangunan Aula	150.000,00
2.	FAHRUL RAZI	Retribusi Sewa Bangunan Aula	840.000,00
Jumlah			990.000,00

c. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan per 31 Desember 2025 senilai Rp37.438.640,00 merupakan Piutang atas Retribusi Pasar Grosir dan/ atau



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Pertokoan pada Pasar yang terdiri dari 34 WR sejak Tahun 2017 yang belum melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2025. Rincian Wajib Retribusi (WR) *by name by address* disajikan pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.493.127.305,39	1.989.484.094,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.493.127.305,39 dan Rp1.989.484.094,00. Terdapat penurunan sebesar Rp496.356.788,61 dari saldo tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Pendapatan BLUD	1.936.333.382,00	992.129.835,00	1.936.333.382,00	992.129.835,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	248.223.360,00	0,00	248.223.360,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	199.623.398,39	0,00	199.623.398,39
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	53.150.712,00	0,00	0,00	53.150.712,00
Jumlah	1.989.484.094,00	1.439.976.593,39	1.936.333.382,00	1.493.127.305,39

Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024	Naik/(Turun)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	992.129.835,00	1.936.333.382,00	(944.203.547,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	53.150.712,00	53.150.712,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.507.585,69	0,00	132.507.585,69
4	Dinas Kesehatan	67.115.812,70	0,00	67.115.812,70
5	Badan Pendapatan Daerah	248.223.360,00	0,00	248.223.360,00
	Jumlah	1.493.127.305,39	1.989.484.094,00	(496.356.788,61)

a. Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp992.129.835,00 merupakan piutang pada RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan terkait Pelayanan kepada Masyarakat tidak mampu yang tidak tercover oleh Pelayanan BPJS Kesehatan

Rincian Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Piutang Pendapatan BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	YANKESKIN 2022	416.417.489,00	0,00	416.417.489,00	0,00
2	YANKESKIN 2024	1.519.915.893,00	0,00	1.519.915.893,00	0,00
3	YANKESKIN 2025	0,00	992.129.835,00	0,00	992.129.835,00
	Jumlah	1.936.333.382,00	992.129.835,00	1.936.333.382,00	992.129.835,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

b. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp248.223.360,00 merupakan piutang atas denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Kewajiban membayar Pajak Daerah dan opsen Pajak MBLB Nomor 900.1.13/246/BAPENDA-2/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 pada PT. Global Makmur Borneo.

c. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 senilai Rp199.623.398,39 merupakan piutang dari pengembalian atas temuan BPK atas Pemeriksaan LKPD TA 2025 yang terdiri dari kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2026. Rincian atas Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 9**.

d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp53.150.712,00 merupakan Piutang kepada PT AVIASTAR sejak tahun 2014 (berdasarkan surat Dirut AVIASTAR No. 102REV/ASM/DZ/III/2014) atas Bagi Hasil Penjualan Tiket Periode Kontrak 17 November 2014 sampai dengan 17 November 2015. Diketahui berdasarkan informasi dari Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah PT AVIASTAR sudah tidak beroperasi lagi pada Tahun 2025.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	14.924.594.624,00	12.405.915.204,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp14.924.594.624,00 dan Rp12.405.915.204,00. Terdapat penurunan sebesar Rp2.518.679.420,00 dari saldo tahun sebelumnya.

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan:

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/452/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III (Tiga) kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang telah disalurkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 6 Maret 2026 berdasarkan STS Nomor 62.06/41.0/001982/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025, 62.06/41.0/001981/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 senilai Rp4.814.080.511,00, 62.06/41.0/000014/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/3/2026 senilai Rp7.739.482,00, 62.06/41.0/000014/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/3/2026 senilai Rp4.814.080.511,00 dan 62.06/41.0/000013/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/3/2026 senilai Rp7.739.482,00;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/101/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV (Empat) Kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan pada Tahun 2026 yang telah disalurkan ke



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Kas Daerah pada tanggal 4 Mei 2026 berdasarkan STS Nomor 62.06/41.0/000035/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2026 senilai Rp10.084.809.250,00 dan Nomor 62.06/41.0/000034/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2026 senilai Rp17.965.381,00; dan

- c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/1067.M/BKAD/2025 tentang Pemberian Bantuan Bencana Alam kepada Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh melalui Mekanisme Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp200.000.000,00.

Adapun rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.27
Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo Akhir
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Kendaraan Bermotor	2.158.440.940,00	2.158.440.940,00	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.974.318.968,00	2.974.318.968,00	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.236.222.826,00	7.236.222.826,00	14.898.889.761,00	14.898.889.761,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	36.932.470,00	36.932.470,00	25.704.863,00	25.704.863,00
Jumlah	12.405.915.204,00	12.405.915.204,00	14.924.594.624,00	14.924.594.624,00

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.430.785.343,75	4.079.368.385,31

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp2.430.785.343,75 dan Rp4.079.368.385,31. Terdapat penurunan sebesar Rp1.648.583.041,56 dari saldo tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.28
Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo Tahun 2025
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	2.185.834.214,00	0,00	0,00	2.185.834.214,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan	1.893.534.171,31	1.648.583.041,56	0,00	244.951.129,75



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Tahun 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo Tahun 2025
Bendahara atau Pejabat Lain				
Jumlah	4.079.368.385,31	1.648.583.041,56	0,00	2.430.785.343,75

a. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2025 senilai Rp2.185.834.214,00 merupakan saldo atas kewajiban pengembalian dari beberapa bendahara pemerintah Kabupaten Katingan atas beberapa kasus kerugian daerah pada Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir
SY	2008	129.118.851,00	0,00	0,00	129.118.851,00
Rt	2006	31.547.677,00	0,00	0,00	31.547.677,00
Ys	2018	1.415.694.683,00	0,00	0,00	1.415.694.683,00
AbD	2015	609.473.003,00	0,00	0,00	609.473.003,00
Jumlah		2.185.834.214,00	0,00	0,00	2.185.834.214,00

b. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp244.951.129,75 yang terdiri dari:

- 1) Bagian Lancar TGR atas Sdr. Rsnd yang merupakan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Pariwisata atas kasus kerugian pada Tahun 2023 yaitu kehilangan kendaraan dinas roda 2 (dua) senilai Rp20.951.128,57 serta bagian lancar atas TGR atas Penyertaan modal pada Kelompok Nelayan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2006 senilai Rp224.000.000,00 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2025; dan
- 2) Bagian Lancar TGR yang merupakan Pengembalian atas Temuan BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 yakni kelebihan pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp1.648.583.042,74 yang telah dibayar pada Tahun 2025 senilai Rp1.648.583.041,56, sehingga masih terdapat saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp1,18 dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.30
Bagian Lancar TGR yang merupakan Pengembalian atas Temuan BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Paket Pekerjaan	Kurang Volume Pekerjaan	Pembayaran	Sisa
	Dinas Kesehatan			
1.	Pembangunan Rumah Sakit Katingan Kuala	876.492.948,47	876.492.948,47	0,00
2.	Pembangunan Gedung Puskesmas Pendahara	233.013.529,32	233.013.529,00	0,32
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas Kereng Pangi	190.200.856,86	190.200.856,00	0,86
4.	Pembangunan Penambahan ruang CSSD Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba	70.372.958,23	70.372.958,23	0,00
5.	Pembangunan Pekerjaan Gedung Rawat Inap (KRIS)	198.169.678,15	198.169.678,15	0,00
6.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pegatan II	8.598.133,98	8.598.133,98	0,00
7.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Mendawai	6.860.211,28	6.860.211,28	0,00
8.	Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic Drug	29.065.261,01	29.065.261,01	0,00
	Satpol PP Damkar			
1.	Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran	24.394.755,98	24.394.755,98	0,00
2.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Satpol PP	11.414.709,46	11.414.709,46	0,00
Jumlah		1.648.583.042,74	1.648.583.041,56	1,18

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang	31 Desember 2025 (14.054.930.616,88)	31 Desember 2024 (5.626.270.107,69)
--------------------------------------	---	--

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai (Rp14.054.930.616,88) dan (Rp5.626.270.107,69) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.3.31
Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024	Naik/(Turun)
Penyisihan Piutang Pajak	(11.493.446.568,45)	(5.501.011.402,83)	(5.992.435.165,62)
Penyisihan Piutang Retribusi	(28.306.665,50)	(22.866.664,50)	(5.440.001,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(102.392.040,36)	(102.392.040,36)	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(2.430.785.342,57)	0,00	(2.430.785.342,57)
Jumlah	(14.054.930.616,88)	(5.626.270.107,69)	(8.428.660.509,19)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.32
Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualifikasi

(dalam rupiah)

Uraian	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
Penyisihan Piutang Pajak	11.275.815,31	185.230.007,3	491.572.036	5.304.357.307	5.992.435.165,61
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	5.440.001,00	5.440.001,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	2.430.785.342,57	2.430.785.342,57
Jumlah	11.275.815,31	185.230.007,30	491.572.036,00	8.428.660.509,19	8.428.660.509,19

Adapun rincian mutasi Penyisihan Piutang berdasarkan Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualifikasi Berdasarkan PD

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/(Turun)
Penyisihan Piutang Pajak		(11.493.446.568,45)	(5.501.011.402,83)	5.992.435.165,62
Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen	Badan Pendapatan Daerah	(14.575.000,00)	(5.490.000,00)	9.085.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya	Badan Pendapatan Daerah	(47.345.000,00)	(23.060.000,00)	24.285.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Warung dan Sejenisnya	Badan Pendapatan Daerah	(142.177.898,00)	(67.483.949,00)	74.693.949,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Badan Pendapatan Daerah	(3.179.800,00)	(1.589.900,00)	1.589.900,00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Badan Pendapatan Daerah	(7.000.000,00)	(3.500.000,00)	3.500.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Badan Pendapatan Daerah	(13.618.146,00)	(6.809.073,00)	6.809.073,00
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Sumber Lain	Badan Pendapatan Daerah	(9.604.654,11)	(4.640.862,07)	4.963.792,04
Penyisihan Piutang PBBP2	Badan Pendapatan Daerah	(11.252.571.070,34)	(5.385.062.618,76)	5.867.508.451,58
Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	Badan Pendapatan Daerah	(3.375.000,00)	(3.375.000,00)	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(28.306.665,50)	(22.866.664,50)	(5.440.001,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	Badan Pendapatan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	(8.900.001,50)	(4.450.000,50)	(4.450.001,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/(Turun)
	dan Perdagangan			
Penyisihan Piutang retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(920.664,00)	(920.664,00)	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(16.506.000,00)	(16.506.000,00)	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(1.980.000,00)	(990.000,00)	(990.000,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(102.392.040,36)	(102.392.040,36)	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(53.150.712,00)	(53.150.712,00)	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan		(49.241.328,36)	(49.241.328,36)	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(2.430.785.342,57)	0,00	(2.430.785.342,57)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(2.185.834.214,00)	0,00	(2.185.834.214,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(244.951.128,57)	0,00	244.951.128,57
Jumlah		(14.054.930.616,88)	(5.626.270.107,69)	(8.428.660.509,19)

5.3.1.1.14 Persediaan

31 Desember 2025

56.444.426.912,84

31 Desember 2024

34.477.874.056,38

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp56.444.426.912,84 dan Rp34.477.874.056,38. Terdapat kenaikan senilai Rp21.966.552.856,46 dari saldo tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.34
Rincian Persediaan Per Jenis

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025	Naik/ Turun
1	Bahan	320.459.773,73	12.438.604.465,51	12.401.135.559,74	357.928.679,50	37.468.905,77
2	Suku Cadang	87.762.500,00	681.815.227,00	681.815.227,00	87.762.500,00	0,00
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.184.015.726,20	32.202.276.799,00	32.484.900.309,20	901.392.216,00	(282.623.510,20)
4	Obat-Obatan	10.043.334.989,72	29.367.368.896,09	27.552.196.248,08	11.858.507.637,73	1.815.172.648,01
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	22.827.885.566,73	27.971.635.649,18	8.144.172.594,22	42.655.348.621,69	19.827.463.054,96
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga	0,00	339.989.458,00	19.260.000,00	320.729.458,00	320.729.458,00
7	Natura dan Pakan	14.415.500,00	4.353.503.396,96	4.105.161.097,04	262.757.799,92	248.342.299,92
8	Persediaan Dalam Proses	0,00	681.006.075,00	681.006.075,00	0,00	0,00
9	Komponen	0,00	758.340.955,00	758.340.955,00	0,00	0,00
10	Pipa	0,00	34.211.900,00	34.211.900,00	0,00	0,00
Jumlah		34.477.874.056,38	108.828.752.821,74	86.862.199.965,28	56.444.426.912,84	21.966.552.856,46

Penjelasan:

- Persediaan Obat-Obatan per 31 Desember 2025 senilai Rp11.858.567.637,73 termasuk saldo Persediaan Obat-Obatan pada Apotek dan gudang di Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan dokumen penerimaan dan pengeluaran obat, Berita Acara *Stock Opname* per 31 Desember 2025 dan dokumen pendukung lainnya sehingga tidak dapat ditelusuri saldo per 31 Desember senilai Rp1.385.459.753,73, yang terdiri dari:
 - Saldo Persediaan pada apotek dan jejaring senilai Rp764.981.736,04; dan
 - Saldo Persediaan pada gudang Puskesmas Kasongan II senilai Rp620.478.017,69.
- Saldo Persediaan Obat-Obatan per 31 Desember 2025 senilai Rp11.858.507.637,73 merupakan persediaan obat pada 17 UPTD Puskesmas, 1 RS Pratama Tumbang Samba, 1 BLUD RSUD Mas Amsyar dan Dinas Kesehatan;
- Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2025 senilai Rp42.655.348.621,69 merupakan persediaan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 5 Perangkat Daerah yang belum dilakukan proses administrasi pemindahtanganan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.34
Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Keterangan Persediaan	Saldo Tahun 2025
1	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Peralatan dan Mesin	56.155.300,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan	13.243.881.893,96
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peralatan dan Mesin	80.530.500,00
4	Dinas Sosial	Natura	24.009.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	29.250.771.427,73
Jumlah			42.655.348.621,69



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Adapun rincian mutasi Persediaan per SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.35
Persediaan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025	Naik/ Turun (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	723.243.554,00	723.243.554,00	0,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	472.641.592,00	472.641.592,00	0,00	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	139.944.100,00	2.240.723.293,00	2.145.755.499,50	234.911.893,50	94.967.793,50
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	610.830.640,00	610.830.640,00	0,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	274.564.000,00	1.099.265.778,00	1.285.465.778,00	88.364.000,00	-186.200.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	0,00	769.156.584,00	769.156.584,00	0,00	0,00
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	11.597.800,00	933.395.169,00	939.719.369,00	5.273.600,00	-6.324.200,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	926.593.051,00	926.593.051,00	0,00	0,00
9	Dinas Kesehatan (APBD,BOK,KAPITAS + HIBAH)	4.194.126.985,19	20.275.158.914,23	19.489.970.286,14	4.979.315.613,28	785.188.628,09
10	Dinas Kesehatan (UPT) Puskesmas dll	2.323.452.751,62	9.325.217.518,54	8.008.325.714,32	3.640.344.555,83	1.316.891.804,22
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	118.200.000,00	2.341.083.588,00	1.871.420.130,00	587.863.458,00	469.663.458,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	736.222.007,00	736.222.007,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	757.964.657,00	757.964.657,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	91.033.500,00	3.393.536.975,00	3.393.536.975,00	91.033.500,00	0,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.108.498.537,00	13.754.126.495,68	6.618.743.138,72	13.243.881.893,96	7.135.383.356,96
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	755.220.946,00	755.220.946,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	714.652.000,00	714.652.000,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.756.000,00	678.718.712,00	683.474.712,00	0,00	-4.756.000,00
19	Dinas Pendidikan	0,00	2.012.394.423,00	2.012.394.423,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	4.198.652.096,00	4.142.496.796,00	56.155.300,00	56.155.300,00
21	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	1.261.027.331,00	1.261.027.331,00	0,00	0,00
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.018.631.029,73	13.155.586.705,00	525.222.307,00	29.648.995.427,73	12.630.364.398,00
23	Dinas Sosial	0,00	1.157.934.404,00	1.109.667.714,00	48.266.690,00	48.266.690,00
24	Inspektorat	0,00	387.626.741,00	387.626.741,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Bukit Raya	0,00	209.684.000,00	209.684.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Kamipang	0,00	278.480.700,00	278.480.700,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Katingan Hilir	0,00	850.271.372,00	850.271.372,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	0,00	215.253.125,00	215.253.125,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Katingan Kuala	0,00	209.932.500,00	209.932.500,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Katingan Tengah	0,00	509.085.598,00	509.085.598,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Marikit	0,00	346.895.100,00	346.895.100,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Mendawai	0,00	203.859.900,00	203.859.900,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Petak Malai	0,00	314.998.950,00	314.998.950,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Keterangan	Saldo Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2025	Naik/ Turun (Rp)
34	Kecamatan Pulau Malan	0,00	330.743.000,00	330.743.000,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	0,00	325.340.568,00	325.340.568,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Tasik Payawan	0,00	222.994.000,00	222.994.000,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	0,00	255.696.800,00	255.696.800,00	0,00	0,00
38	RSUD Mas Amsyar	0,00	224.094.433,00	224.094.433,00	0,00	0,00
39	RSUD Mas Amsyar (BLUD)	3.724.883.176,66	12.677.203.958,28	12.772.016.974,40	3.630.070.160,54	-94.813.016,12
40	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	927.155.581,00	927.155.581,00	0,00	0,00
41	Sekretariat Daerah	468.186.176,20	5.455.206.712,00	5.733.442.068,20	189.950.820,00	-278.235.356,20
42	Sekretariat DPRD	0,00	2.590.883.350,00	2.590.883.350,00	0,00	0,00
Jumlah		34.477.874.056,40	108.828.752.821,73	86.862.199.965,28	56.444.426.912,84	21.966.552.856,45

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

98.462.782.165,66

98.462.782.165,66

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp98.462.782.165,66 dan Rp98.462.782.165,66. Tidak terdapat perubahan atas saldo Investasi Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.36
Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	402.109.620,00	402.109.620,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	98.060.672.545,66	98.060.672.545,66	0,00	0,00
Jumlah	98.462.782.165,66	98.462.782.165,66	0,00	0,00

5.3.1.2.1

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2025

31 Desember 2024

402.109.620,00

402.109.620,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp402.109.620,00 merupakan investasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun 2006 berdasarkan perjanjian MoU. Diketahui, terdapat potensi tidak tertagih atas penyertaan modal kelompok pembudidaya ikan dan nelayan ini sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan lelang jaminan atas sebuah bidang tanah (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 593.1/031/BAPT-KPHu-I/PEM, dan melalui Surat Tugas Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan pada Tahun 2018. Hingga Tahun 2025, telah dilakukan survey terhadap bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut dan telah siap untuk diproses lelang melalui KPKNL.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2025

31 Desember 2024

98.060.672.545,66

98.060.672.545,66

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

2. PT. Katingan Mandiri Persada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 18;
3. PT. Jaminan Kredit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 45;
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2017 tanggal; 28 Agustus 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan.

Tabel 5.3.37
Investasi Jangka Panjang Permanen

(dalam rupiah)

Nama Badan Usaha	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penambahan Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Akumulasi Kerugian s/d Tahun Lalu	Labai/Rugi Tahun berjalan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Modal Hibah	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng	90.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.850.000.000,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan	14.061.448.703,74	0,00	(12.949.520.388,00)	0,00	0,00	2.207.681.000,00	3.319.609.315,74
PD. Katingan Jaya Mandiri	11.950.000.000,00	0,00	(11.261.637.282,81)	0,00	0,00	0,00	688.362.717,19
PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PT. Katingan Mandiri Persada (PT. KMP)	7.000.000.000,00	0,00	(4.797.299.487,27)	0,00	0,00	0,00	2.202.700.512,73
Jumlah	124.861.448.703,74	0,00	(29.008.457.158,08)	0,00	0,00	2.207.681.000,00	98.060.672.554,66

Untuk penyajian dan penilaian Investasi Jangka Panjang Permanen dilakukan dengan metode ekuitas dan biaya dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Metode biaya

a) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Katingan belum menambah penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sehingga saldo penyertaan modal tercatat sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp90.850.000.000,00.

b) PT. Jaminan Kredit Daerah

Penyertaan Modal pada PT Jamkrida sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tidak ada perubahan karena Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memberikan Penyertaan Modal kembali kepada PT Jamkrida pada Tahun 2025.

2) Metode ekuitas

a) PD Katingan Jaya Mandiri

Saldo Investasi Permanen pada PD Katingan Jaya Mandiri tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2014 karena perusahaan ini pada dasarnya telah



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

berubah status dan berganti nama menjadi PT Katingan Mandiri Persada berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018. Pemkab Katingan belum melakukan rekonsiliasi antara nilai ekuitas PD Katingan Jaya Mandiri per 31 Desember 2014 sebesar Rp688.362.717,19 dengan Aset PT Katingan Mandiri Persada.

b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2025 PDAM Kabupaten Katingan tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dikarenakan terdapat permasalahan internal manajemen sehingga PDAM sempat tidak beroperasi. Atas tidak dapat tersusunnya Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025 Berdasarkan Surat plt.Direktur Nomor 15/SP/PDAM-KTN/IV/2026 tanggal 8 April 2026 tentang Surat Pernyataan PDAM.

c) PT. Katingan Mandiri Persada

Penyertaan Modal pada PT Katingan Mandiri Persada tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur tanggal 6 Februari 2026 diketahui pada Tahun 2025 PT KMP tidak menyusun laporan keuangan dikarenakan sudah tidak memiliki biaya operasional perusahaan.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.150.382.649.310,89	3.089.410.407.772,84

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.150.382.649.310,89 mengalami kenaikan sebesar Rp60.972.241.538,05 dengan persentase kenaikan 1,97% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)					
No	Uraian	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	Tanah	671.506.020.866,00	3.620.444.877,87	1.510.564.280,91	673.615.901.462,96
2	Peralatan Dan Mesin	660.187.609.726,00	91.277.825.004,38	18.613.859.798,82	732.851.574.931,56
3	Gedung Dan Bangunan	1.406.370.078.514,28	144.122.042.515,83	39.024.605.615,77	1.511.467.515.414,34
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.944.155.593.953,59	80.951.904.834,24	2.305.564.090,63	3.022.801.934.697,20
5	Aset Tetap Lainnya	219.627.963.642,21	3.557.774.482,00	36.670.000,00	223.149.068.124,21
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.731.522.071,99	303.226.049,00	2.095.917.300,00	41.938.830.820,99
Jumlah Nilai Perolehan		5.945.578.788.774,07	323.833.217.763,32	63.587.181.086,13	6.205.824.825.451,26
7	Akumulasi Penyusutan	(2.856.168.381.001,23)	(201.574.326.902,79)	(2.300.531.763,65)	(3.055.442.176.140,37)
Jumlah Aset Tetap		3.089.410.407.772,84	122.258.890.860,53	61.286.649.322,48	3.150.382.649.310,89



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2025

31 Desember 2024

673.615.901.462,96

671.506.020.866,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp673.615.901.462,96 mengalami kenaikan sebesar Rp2.109.880.596,96 dengan persentase kenaikan sebesar 0,31% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.39
Rincian Tanah berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)				
No.	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.136.372.412,00	1.136.372.412,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.564.000,00	129.564.000,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	177.776.747,87	1.155.000.000,00	(977.223.252,13)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	510.048.000,00	510.048.000,00	0,00
7	BLUD RSUD Mas Amsyar	10.161.511.000,00	10.161.511.000,00	0,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.538.068.500,00	2.854.568.500,00	683.500.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
10	Dinas Kesehatan	3.645.881.863,00	3.642.084.213,00	3.797.650,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.011.045.310,00	5.871.045.310,00	140.000.000,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	344.300.000,00	344.300.000,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1.902.308.810,00	1.886.648.810,00	15.660.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	5.276.681.075,00	5.276.681.075,00	0,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.388.664.459,00	148.388.664.459,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	265.000.000,00	25.000.000,00	240.000.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pendidikan	28.366.459.635,96	28.057.737.169,00	308.722.466,96
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	13.489.468.008,00	13.166.636.328,00	322.831.680,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.285.100.500,00	2.285.100.500,00	0,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.503.786.090,00	4.503.786.090,00	0,00
23	Dinas Sosial	4.665.000.000,00	3.545.000.000,00	1.120.000.000,00
24	Inspektorat	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
25	Kecamatan Bukit Raya	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
26	Kecamatan Kamipang	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
27	Kecamatan Katingan Hilir	421.288.000,00	421.288.000,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	120.106.000,00	120.106.000,00	0,00
29	Kecamatan Katingan Kuala	784.110.400,00	784.110.400,00	0,00
30	Kecamatan Katingan Tengah	135.814.000,00	135.814.000,00	0,00
31	Kecamatan Marikit	148.996.000,00	148.996.000,00	0,00
32	Kecamatan Mendawai	150.975.000,00	150.975.000,00	0,00
33	Kecamatan Petak Malai	25.189.000,00	25.189.000,00	0,00
34	Kecamatan Pulau Malan	303.720.000,00	303.720.000,00	0,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	329.875.000,00	329.875.000,00	0,00
36	Kecamatan Tasik Payawan	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
37	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.606.242.800,00	1.210.874.000,00	395.368.800,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	898.386.000,00	898.386.000,00	0,00
39	Sekretariat Daerah	431.694.402.852,13	431.837.179.600,00	(142.776.747,87)
40	Sekretariat DPRD	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00
Jumlah		673.615.901.462,96	671.506.020.866,00	2.109.880.596,96

Adapun, mutasi Tanah pada Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.40
Mutasi Tanah Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Tanah	671.506.020.866,00	0,00	2.342.008.130,00	232.127.533,04	673.615.901.462,96	2.109.880.596,96
Jumlah Nilai Perolehan		671.506.020.866,00	0,00	2.342.008.130,00	232.127.533,04	673.615.901.462,96	2.109.880.596,96

Saldo Awal	671.506.020.866,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	671.506.020.866,00
Penambahan	
Belanja Modal Tanah Tahun 2025	683.500.000,00
Penambahan dari Hibah	1.518.508.130,00
Reklas dari Aset Lain-lain	140.000.000,00
Jumlah Penambahan	2.342.008.130,00
Pengurangan	
Penghapusan	232.127.533,04
Jumlah Pengurangan	232.127.533,04
Saldo Akhir Tanah	673.615.901.462,96

Tabel 5.3.41
Penambahan dari Belanja Modal Tanah Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Ganti Rugi Tanah Sport Center	683.500.000,00
Jumlah			683.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.42
Penambahan dari Pendapatan Hibah Tanah Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	4.647.650,00
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Balai Penyuluh KB	240.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tanah SMPN 7 Katingan Hilir	540.000.000,00
4.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Dermaga Kereng Pakahi	338.491.680,00
5.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Tanah Non Persil Lainnya	395.368.800,00
Jumlah			1.518.508.130,00

Tabel 5.3.43
Penambahan dari Reklasifikasi Aset Lain-Lain Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	140.000.000,00
Jumlah			140.000.000,00

Tabel 5.3.44
Pengurangan dari Penghapusan Tanah Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Hibah Tanah untuk Pemerintah Desa Makmur Utama Kecamatan Katingan Kuala	231.277.533,04
2.	Dinas Kesehatan	Hibah Tanah untuk Pemerintah Desa Tumbang tangoi	850.000,00
Jumlah			232.127.533,04

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
732.851.574.931,56	660.187.609.726,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp732.851.574.931,56 dan mengalami kenaikan sebesar Rp72.663.965.205,56 dengan persentase kenaikan 11,01% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.45
Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.883.648.644,44	8.286.497.580,44	1.597.151.064,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.627.932.533,08	3.488.227.933,08	139.704.600,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.581.125.082,25	29.141.159.682,25	2.439.965.400,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.509.440.957,00	17.453.447.494,00	1.055.993.463,00
5	Badan Pendapatan Daerah	8.866.904.888,32	8.083.667.488,32	783.237.400,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.327.172.921,30	12.463.775.921,30	863.397.000,00
7	BLUD RSUD Mas Amsyar	127.876.158.612,36	109.883.449.012,36	17.992.709.600,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	7.072.354.775,30	6.920.544.775,30	151.810.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.506.971.940,18	5.077.222.940,18	1.429.749.000,00
10	Dinas Kesehatan	146.333.060.079,46	130.558.794.942,46	15.774.265.137,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.000.963.022,64	13.671.668.782,64	329.294.240,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.253.874.454,35	5.933.438.958,35	320.435.496,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	4.635.977.903,44	4.379.309.703,44	256.668.200,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	35.281.096.309,12	29.601.296.219,12	5.679.800.090,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.182.278.179,00	17.997.963.619,00	1.184.314.560,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.961.760.016,68	3.729.940.016,68	231.820.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.994.477.946,00	6.816.812.946,00	177.665.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.713.877.990,13	5.058.475.740,13	655.402.250,00
19	Dinas Pendidikan	109.511.632.869,85	96.096.492.977,29	13.415.139.892,56
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	24.140.823.110,00	22.263.846.675,00	1.876.976.435,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.910.593.502,02	8.292.560.398,02	618.033.104,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	9.427.625.572,90	8.620.259.572,90	807.366.000,00
23	Dinas Sosial	3.254.493.947,38	3.081.685.147,38	172.808.800,00
24	Inspektorat	4.814.459.621,44	3.893.835.321,44	920.624.300,00
25	Kecamatan Bukit Raya	1.192.774.200,00	1.104.981.200,00	87.793.000,00
26	Kecamatan Kamipang	2.133.845.380,00	2.014.709.380,00	119.136.000,00
27	Kecamatan Katingan Hilir	2.732.272.622,00	2.489.987.962,00	242.284.660,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	1.399.673.770,00	1.317.922.770,00	81.751.000,00
29	Kecamatan Katingan Kuala	1.803.696.333,34	1.916.071.333,34	(112.375.000,00)
30	Kecamatan Katingan Tengah	1.977.787.700,00	1.888.894.700,00	88.893.000,00
31	Kecamatan Marikit	1.795.519.402,94	960.386.402,94	835.133.000,00
32	Kecamatan Mendawai	913.754.758,34	835.874.758,34	77.880.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	1.233.598.150,00	1.233.598.150,00	0,00
34	Kecamatan Pulau Malan	1.334.966.066,66	1.275.176.066,66	59.790.000,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.559.829.290,00	819.281.060,00	740.548.230,00
36	Kecamatan Tasik Payawan	788.340.050,00	746.509.450,00	41.830.600,00
37	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.553.944.512,00	1.432.249.512,00	121.695.000,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25.495.181.201,15	25.061.674.579,15	433.506.622,00
39	Sekretariat Daerah	46.282.206.123,88	44.033.278.061,88	2.248.928.062,00
40	Sekretariat DPRD	10.985.480.492,61	12.262.640.492,61	(1.277.160.000,00)
Jumlah		732.851.574.931,56	660.187.609.726,00	72.663.965.205,56



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Adapun mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.46
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Peralatan Dan Mesin	660.187.609.726,00	0,00	80.147.890.566,38	7.483.925.360,82	732.851.574.931,56	72.663.965.205,56
	Jumlah Nilai Perolehan	660.187.609.726,00	0,00	80.147.890.566,38	7.483.925.360,82	732.851.574.931,56	72.663.965.205,56

Saldo Awal			660.187.609.726,00		
Koreksi Saldo Awal			0,00		
Saldo Awal setelah koreksi			660.187.609.726,00		
Penambahan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.019.432.124,00			
	Belanja/Beban Barang dan Jasa	692.914.200,00			
	Reklas Barang Antar KIB	1.739.852.716,64			
	Penambahan dari Hibah	5.463.924.524,74			
	Penambahan dari Utang Belanja Tahun 2025	1.231.767.001,00			
	Jumlah Penambahan		80.147.890.566,38		
Pengurangan	Penghapusan	2.058.848.000,04			
	Ekstrakomptabel	1.101.046.241,62			
	Reklas Barang Antar KIB	32.570.000,00			
	Reklas Aset Tetap ke Persediaan	2.386.357.790,16			
	Reklas menjadi Beban Barang dan Jasa	1.905.103.329,00			
Jumlah Pengurangan			7.483.925.360,82		
Saldo Akhir			732.851.574.931,56		

Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Penambahan berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 yang termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi FKTP pada Dinas Kesehatan serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPKD	Nilai (Rp)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.341.056.064,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.704.600,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.977.583.900,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	351.177.525,00
5.	Badan Pendapatan Daerah	635.532.400,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan	576.047.000,00
7.	BLUD RSUD Mas Amsyar	17.509.532.525,00
8.	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	134.340.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	879.259.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	SKPKD	Nilai (Rp)
10.	Dinas Kesehatan	14.817.615.136,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	337.603.000,00
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	297.855.496,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	256.668.200,00
14.	Dinas Lingkungan Hidup	3.288.200.090,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.901.780.350,00
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	223.770.000,00
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	177.665.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	360.402.250,00
19.	Dinas Pendidikan	9.987.205.887,00
20.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	557.531.435,00
21.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	366.142.104,00
22.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	545.266.000,00
23.	Dinas Sosial	172.808.800,00
24.	Inspektorat	938.094.300,00
25.	Kecamatan Bukit Raya	51.500.000,00
26.	Kecamatan Kamipang	119.136.000,00
27.	Kecamatan Katingan Hilir	259.484.110,00
28.	Kecamatan Katingan Hulu	81.751.000,00
29.	Kecamatan Katingan Kuala	44.970.000,00
30.	Kecamatan Katingan Tengah	62.200.000,00
31.	Kecamatan Marikit	338.350.000,00
32.	Kecamatan Mendawai	85.580.000,00
33.	Kecamatan Petak Malai	0,00
34.	Kecamatan Pulau Malan	79.140.000,00
35.	Kecamatan Sanaman Mantikei	365.186.230,00
36.	Kecamatan Tasik Payawan	87.340.600,00
37.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	121.695.000,00
38.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	474.556.622,00
39.	Sekretariat Daerah	1.077.444.000,00
40.	Sekretariat DPRD	998.257.500,00
Jumlah		71.019.432.124,00

Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	19.425.000,00
2.	BLUD RSUD Mas Amsyar	213.182.000,00
3.	Dinas Pendidikan	452.244.200,00
4.	Kecamatan Katingan Hulu	938.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.125.000,00
Jumlah		692.914.200,00

Penambahan dari Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

Penambahan Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.48
Penambahan dari Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.399.240.000,20	Dari KIB D	Ke KIB B
2.	Dinas Pendidikan	7.070.000,00	Dari KIB E	Ke KIB B
		333.542.716,44	Dari KIB C	Ke KIB B
Jumlah		1.739.852.716,64		

Penambahan dari Pendapatan Hibah Tahun 2025

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah kepada Kabupaten Katingan pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Penambahan dari Pendapatan Hibah Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	4.800.924.524,74
2.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	663.000.000,00
Jumlah		5.463.924.524,74

1. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.800.924.524,74 merupakan Hibah Peralatan dan Mesin berupa peralatan pendukung proses belajar mengajar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Papan Tulis Interaktif; dan
2. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan dan Perikanan senilai Rp663.000.000,00 merupakan Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Bus Ukuran Sedang untuk Angkutan Sekolah dari Kementerian Perhubungan.

Penambahan Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja Tahun 2025

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Utang Belanja Tahun 2025 pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.50
Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	977.267.001,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.500.000,00
Jumlah		1.231.767.001,00

Pengurangan dari Penghapusan pada Tahun 2025

Pengurangan Peralatan dan Mesin dari proses penghapusan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.51
Pengurangan dari Penghapusan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.848.000,04
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	33.000.000,00
3.	Sekretariat DPRD	1.746.000.000,00
Jumlah		2.058.848.000,04

1. Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR senilai Rp279.848.000,04 merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin berupa lampu tenaga surya dikarenakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada instansi vertikal;
2. Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Satpol PP senilai Rp33.000.000,00 merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan beroda dua dikarenakan telah diselesaikannya proses pelunasan tuntutan ganti rugi atas kehilangan kendaraan beroda dua; dan
3. Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.746.000.000,00 merupakan penghapusan peralatan dan mesin berupa kendaraan beroda empat unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikarenakan proses penjualan kendaraan perorangan dinas secara langsung;

Pengurangan Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel Tahun 2025

Pengurangan Peralatan dan Mesin yang menjadi ekstrakomptabel pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.52
Pengurangan Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	405.000,00
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.650.000,00
3.	BLUD RSUD Mas Amsyar	2.300.000,00
4.	Dinas Kesehatan	2.742.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.308.760,00
6.	Dinas Pendidikan	964.470.031,62
7.	Kecamatan Katingan Hilir	17.199.450,00
8.	Kecamatan Katingan Hulu	938.000,00
9.	Kecamatan Marikit	17.010.000,00
10.	Kecamatan Mendawai	7.700.000,00
11.	Kecamatan Pulau Malan	19.350.000,00
12.	Kecamatan Sanaman Mantikei	338.000,00
13.	Kecamatan Tasik Payawan	45.510.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.125.000,00
Jumlah		1.101.046.241,62

Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.53

Pengurangan Akibat Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Dinas Kesehatan	25.500.000,00	Dari KIB B	Ke KIB C
2.	Dinas Pendidikan	7.070.000,00	Dari KIB B	Ke KIB E
Jumlah		32.570.000,00		

Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Persediaan

Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi ke persediaan merupakan Peralatan dan Mesin berupa lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang secara substansi merupakan barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga (dihibahkan), namun secara administrasi dokumen hibah belum selesai dilaksanakan oleh Dinas PUPR senilai Rp2.386.357.790,16.

Pengurangan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 pada dua SKPD dikarenakan merupakan realisasi Belanja Modal - Pemeliharaan Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.54

Pengurangan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1.	BLUD RSUD Mas Amsyar	26.704.925,00
2.	Dinas Pendidikan	1.878.398.404,00
Jumlah		1.905.103.329,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

1.511.467.515.414,34

1.406.370.078.514,28

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.511.467.515.414,34 mengalami kenaikan sebesar Rp105.097.436.900,06 dengan persentase kenaikan 7,47% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.55

Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan SKPD

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	458.204.026.559,32	429.334.504.611,31	28.869.521.948,01
2	Dinas Kesehatan	317.874.183.289,92	270.555.251.566,09	47.318.931.723,83
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	46.513.884.056,99	31.617.596.556,99	14.896.287.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.026.437.456,88	19.462.403.689,90	(435.966.233,02)
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	119.234.765.312,46	119.793.553.230,89	(558.787.918,43)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.946.247.392,05	2.946.247.392,05	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.729.786.451,53	17.947.321.558,53	782.464.893,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.700.190.850,00	4.114.727.050,00	585.463.800,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
9	Dinas Sosial	13.471.821.176,00	9.216.511.176,00	4.255.310.000,00
10	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	40.127.833.189,63	39.830.016.021,63	297.817.168,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.741.715.200,00	8.392.915.200,00	348.800.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	26.392.122.542,81	26.079.207.542,81	312.915.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.368.731.480,00	4.368.731.480,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.185.222.490,97	5.210.688.524,97	974.533.966,00
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	6.778.740.320,00	6.304.790.320,00	473.950.000,00
16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	41.232.288.213,79	41.032.914.563,79	199.373.650,00
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	53.199.949.743,18	52.689.299.743,18	510.650.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.612.768.809,00	28.353.474.823,00	259.293.986,00
19	Sekretariat Daerah	102.090.605.640,90	106.423.703.548,90	(4.333.097.908,00)
20	Sekretariat DPRD	26.857.395.911,00	26.652.826.411,00	204.569.500,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.145.161.391,60	8.145.161.391,60	0,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	5.428.803.950,00	5.428.803.950,00	0,00
23	Kecamatan Kamipang	3.821.501.500,00	3.598.976.500,00	222.525.000,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	1.054.825.000,00	1.054.825.000,00	0,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	5.228.608.094,00	5.004.708.650,00	223.899.444,00
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.981.528.264,00	2.832.542.650,00	148.985.614,00
27	Kecamatan Pulau Malan	1.054.960.979,00	1.054.960.979,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	2.570.335.500,00	2.393.245.500,00	177.090.000,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	5.367.390.900,00	986.690.900,00	4.380.700.000,00
30	Kecamatan Marikit	722.098.200,00	722.098.200,00	0,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	1.054.569.860,00	1.054.569.860,00	0,00
32	Kecamatan Mendawai	1.714.511.500,00	1.714.511.500,00	0,00
33	Kecamatan Bukit Raya	922.676.200,00	922.676.200,00	0,00
34	Kecamatan Petak Malai	3.747.502.711,00	3.747.502.711,00	0,00
35	Inspektorat	8.808.582.300,00	7.174.332.300,00	1.634.250.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	14.445.064.690,00	14.445.064.690,00	0,00
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.100.004.986,00	14.780.800.536,00	2.319.204.450,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.917.197.441,00	6.917.197.441,00	0,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	53.932.940.688,85	54.303.479.372,18	(370.538.683,33)
40	Badan Pendapatan Daerah	21.160.535.172,46	19.761.245.172,46	1.399.290.000,00
Jumlah		1.511.467.515.414,34	1.406.370.078.514,28	105.097.436.900,06

Adapun mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.56
Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Gedung Dan Bangunan	1.406.370.078.514,28	0,00	129.790.921.901,83	24.693.485.001,77	1.511.467.515.414,34	105.097.436.900,06
Jumlah Nilai Perolehan		1.406.370.078.514,28	0,00	129.790.921.901,83	24.693.485.001,77	1.511.467.515.414,34	105.097.436.900,06



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Saldo Awal		1.406.370.078.514,28
Koreksi Saldo Awal		0,00
Saldo Awal setelah koreksi		1.406.370.078.514,28
Penambahan		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.725.356.633,99	
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	7.624.668.330,38	
Penambahan Bukan Pengadaan/Hibah	5.346.532.921,46	
Reklas Barang antar KIB	2.121.417.300,00	
Penambahan dari Utang Belanja Tahun 2025	2.972.946.716,00	
Jumlah Penambahan		129.790.921.901,83
Pengurangan		
Penghapusan	5.237.882.742,61	
Reklas Barang Antar KIB	10.109.983.114,44	
Reklas ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	67.115.812,70	
Reklas ke Aset Lain-Lain	697.605.003,00	
Reklas menjadi Persediaan	8.330.984.029,02	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Beban Barang dan Jasa	249.914.300,00	
Jumlah Pengurangan		24.693.485.001,77
Saldo Akhir		1.511.467.515.414,34

Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Penambahan berasal dari Belanja Modal dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.57
Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.785.000.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	585.463.800,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	129.050.000,00
4.	BLUD RSUD Mas Amsyar	14.607.414.300,00
5.	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	537.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.425.000,00
7.	Dinas Kesehatan	51.396.714.251,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	364.804.600,00
9.	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	473.950.000,00
10.	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. dan Perdagangan	199.478.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	312.915.000,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.645.104.996,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	974.533.966,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	348.800.000,00
15.	Dinas Pendidikan	22.207.435.742,99
16.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	59.980.000,00
17.	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	223.150.000,00
18.	Dinas Sosial	21.651.049,00
19.	Inspektorat	1.634.250.000,00
20.	Kecamatan Kamipang	222.525.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
21.	Kecamatan Katingan Hilir	159.299.444,00
22.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	43.475.000,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	782.464.893,00
24.	Sekretariat Daerah	4.788.552.092,00
25.	Sekretariat DPRD	24.919.500,00
Jumlah		111.725.356.633,99

Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025

Penambahan berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada tujuh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.58
Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	434.404.450,00
2.	BLUD RSUD Mas Amsyar	534.187.500,00
3.	Dinas Kesehatan	4.486.273.212,38
4.	Dinas Pendidikan	1.826.186.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	99.367.168,00
6.	Kecamatan Katingan Hilir	64.600.000,00
7.	Sekretariat DPRD	179.650.000,00
Jumlah		7.624.668.330,38

Penambahan dari Hibah pada Tahun 2025

Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Katingan dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.59
Penambahan dari Hibah pada Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	5.169.442.921,46
2.	Kecamatan Katingan Tengah	177.090.000,00
Jumlah		5.346.532.921,46

1. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.169.442.921,46 merupakan Hibah Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Pendidikan di Wilayah Kabupaten Katingan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Program Revitalisasi; dan
2. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Katingan Tengah senilai Rp177.090.000,00 merupakan Hibah Gedung dan Bangunan berupa bangunan non permanen bangunan blok pasar dari masyarakat di wilayah Kecamatan Katingan Tengah.

Penambahan dari Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

Penambahan Gedung dan bangunan berasal dari reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.60
Penambahan dari Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.800.000,00	Dari KIB F	Ke KIB C
2	Dinas Kesehatan	25.500.000,00	Dari KIB B	Ke KIB C
		1.961.217.300,00	Dari KIB F	Ke KIB C
3.	Sekretariat Daerah	34.900.000,00	Dari KIB F	Ke KIB C
Jumlah		2.121.417.300,00		

Penambahan Gedung dan Bangunan dari Utang Belanja Tahun 2025

Penambahan Gedung dan Bangunan dari Utang Belanja Tahun 2025 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.61
Penambahan Gedung dan Bangunan dari Utang Belanja Tahun 2025
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	1.358.451.716,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.745.000,00
3.	Sekretariat Daerah	813.750.000,00
Jumlah		2.972.946.716,00

Pengurangan akibat Penghapusan Tahun 2025

Pengurangan Gedung dan Bangunan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada empat SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.62
Pengurangan akibat Penghapusan Tahun 2025
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	1.697.743.940,85
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.550.832.200,00
3.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	430.518.683,33
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	558.787.918,43
Jumlah		5.237.882.742,61

1. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.450.150.600,00 merupakan penghapusan akibat sebab lain, yakni proses pembongkaran Puskesmas Kereng Pangi yang dalam kondisi rusak dan dilakukan pembangunan kembali serta Hibah Gedung Pustu Tumbang Tangoi senilai Rp247.593.340,85 kepada Pemerintah Desa Tumbang Tangoi;
2. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.550.832.200,00 merupakan penghapusan akibat proses pemindahtanganan melalui hibah Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pengadilan Negeri Kasongan dan Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA di Kabupaten Katingan;
3. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan dan Perikanan senilai Rp430.518.683,33 merupakan penghapusan akibat proses pemindahtanganan melalui hibah Bangunan Dermaga Penyebrangan kepada Pemerintah Desa Tumbang Tungku dan Pemerintah Desa Tumbang Geragu untuk objek Bangunan Dermaga Penyebrangan;
4. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp558.787.918,43 merupakan penghapusan akibat proses pemindahtanganan melalui hibah Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Katingan;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

Pengurangan Gedung dan bangunan akibat reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan rincian berikut:

Tabel 5.3.63
Pengurangan akibat Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Badan Pendapatan Daerah	59.450.000,00	Dari KIB C	Ke KIB F
2.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	26.350.000,00	Dari KIB C	Ke KIB D
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.425.000,00	dari KIB C	Ke KIB F
4.	Dinas Kesehatan	9.446.759.999,00	Dari KIB C	Ke KIB D
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	104.350,00	Dari Kib C	Ke KIB D
6.	Dinas Pendidikan	333.542.716,44	Dari KIB C	Ke KIB B
7.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	24.700.000,00	Dari KIB C	Ke KIB F
8.	Dinas Sosial	21.651.049,00	Dari KIB C	Ke KIB F
Jumlah		10.109.983.114,44		

Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Pengurangan Gedung dan Bangunan ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp67.115.812,70 merupakan akibat Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD Tahun 2025 yang merupakan kelebihan pembayaran dari kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2026.

Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain - Lain

Pengurangan akibat reklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada Tahun 2025 berupa Bangunan pustu/polindes yang dalam kondisi rusak pada Dinas Kesehatan senilai Rp697.605.003,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.64
Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

No	Lokasi Unit SKPD	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Poskesdes Mekar Tani	Rusak	62.800.000,00	22.608.000,00	40.192.000,00
2.	Pustu Parupuk	Rusak	3.468.000,00	1.456.560,00	2.011.440,00
3.	Polindes Luwuk Kanan	Rusak	1.560.000,00	686.400,00	873.600,00
4.	Polindes Hampalam	Rusak	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.	Polindes Tumbang Banjang	Rusak	2.444.703,00	1.075.669,32	1.369.033,68
6.	Pustu UPT SP.II Pulau Malan	Rusak	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
7.	Pustu UPT SP.I Pulau Malan	Rusak	2.750.000,00	1.980.000,00	770.000,00
8.	Pengawasan Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00
9.	Perencanaan Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	10.587.500,00	0,00	10.587.500,00
10.	Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	147.203.800,00	29.996.334,00	117.207.466,00
11.	Pustu Manduing Lama	Rusak	116.850.000,00	0,00	116.850.000,00
12.	Polindes Tewang Panjang	Rusak	1.536.000,00	675.840,00	860.160,00
13.	Polindes Kuluk Habuhus	Rusak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.	Pustu Tumbang Hiran Seberang	Rusak	230.200.000,00	82.872.000,00	147.328.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Lokasi Unit SKPD	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
15.	Pustu Tumbang Tabulus	Rusak	100.500.000,00	80.400.000,00	20.100.000,00
16.	Polindes Kampung Keramat	Rusak	3.000.000,00	2.640.000,00	360.000,00
Jumlah			697.605.003,00	224.390.803,32	473.214.199,68

Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Persediaan

Pengurangan Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi ke Persediaan dikarenakan secara substansi merupakan Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan/dihibahkan kepada pihak lain namun dokumen hibah secara administrasi belum dilaksanakan pada Dinas PUPR senilai Rp8.330.984.029,02.

Pengurangan menjadi Beban Barang dan Jasa

Pengurangan yang menjadi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 pada BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan senilai Rp249.914.300,00.

5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.022.801.934.697,20	2.944.155.593.953,59

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.022.801.934.697,20 mengalami kenaikan sebesar Rp78.646.340.743,61 dengan persentase kenaikan 2,67% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.944.155.593.953,59 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.3.65
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	2.402.999.625,56	2.400.499.625,56	2.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	22.225.607.830,02	12.736.335.582,40	9.489.272.247,62
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	1.650.450.900,00	1.650.450.900,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.640.660.553.063,32	2.575.313.510.342,24	65.347.042.721,08
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	195.304.333.647,17	194.950.383.647,17	353.950.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	449.003.750,00	449.003.750,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	836.207.500,00	836.207.500,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.217.387,00	316.386.250,00	333.831.137,00
9	Dinas Sosial	1.110.103.000,00	1.110.103.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	45.198.177.325,00	45.198.177.325,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	904.601.600,00	904.601.600,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.174.667.095,00	8.174.667.095,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	939.171.588,00	939.171.588,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	332.345.415,25	332.345.415,25	0,00
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	775.341.700,00	775.341.700,00	0,00
16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	905.398.017,00	852.409.767,00	52.988.250,00
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.532.011.934,00	3.259.502.184,00	272.509.750,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.359.850.116,00	9.359.850.116,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(turun)
19	Sekretariat Daerah	7.807.115.311,00	7.807.115.311,00	0,00
20	Sekretariat DPRD	2.795.958.815,00	2.795.958.815,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.184.802.639,00	2.602.154.639,00	582.648.000,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	4.473.709.750,00	3.895.709.750,00	578.000.000,00
23	Kecamatan Kamipang	32.458.700,00	32.458.700,00	0,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	1.909.124.223,00	1.408.784.223,00	500.340.000,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.075.618.107,00	1.756.568.107,00	319.050.000,00
26	Kecamatan Katingan Tengah	2.620.622.342,91	2.286.970.855,00	333.651.487,91
27	Kecamatan Marikit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	2.630.850.544,50	2.364.343.444,50	266.507.100,00
29	Kecamatan Bukit Raya	230.534.500,00	230.534.500,00	0,00
30	Kecamatan Mendawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
31	Kecamatan Petak Malai	68.264.000,00	68.264.000,00	0,00
32	Inspektorat	1.512.170.441,28	1.512.170.441,28	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	1.986.703.725,00	1.986.703.725,00	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.332.824.648,69	45.118.774.598,69	214.050.050,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.540.213.992,00	1.540.213.992,00	0,00
36	Dinas Perhubungan dan Perikanan	7.709.412.596,00	7.709.412.596,00	0,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.449.508.868,50	1.449.508.868,50	0,00
Jumlah		3.022.801.934.697,20	2.944.155.593.953,59	78.646.340.743,61

Adapun mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.66
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Mutasi Tahun 2025				31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.944.155.593.953,59	0,00	80.951.904.834,24	2.305.564.090,63	3.022.801.934.697,20	78.646.340.743,61
Jumlah Nilai Perolehan		2.944.155.593.953,59	0,00	80.951.904.834,24	2.305.564.090,63	3.022.801.934.697,20	78.646.340.743,61

Saldo Awal		2.944.155.593.953,59
Koreksi Saldo Awal		0,00
Saldo Awal setelah koreksi		2.944.155.593.953,59
Penambahan	Belanja Modal	67.448.604.554,73
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	199.100.000,00
	Kapitalisasi Jasa Konsultansi	142.233.538,62
	Penambahan JIJ dari Utang	3.688.752.391,89
	Belanja Tahun 2025	
	Reklas Antar KIB	9.473.214.349,00
Jumlah Penambahan		80.951.904.834,24
Pengurangan	Reklas antar KIB	1.399.240.000,20
	Reklas ke Piutang Lain-Lain	
	PAD yang Sah	132.507.585,69
	Reklas ke aset lain - lain	773.816.504,74
Jumlah Pengurangan		2.305.564.090,63
Saldo Akhir		3.022.801.934.697,20



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.67
Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	214.050.050,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333.831.137,00
3.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	246.159.750,00
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	52.883.900,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.864.133.129,82
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	582.648.000,00
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	353.950.000,00
8.	Kecamatan Katingan Hilir	303.740.000,00
9.	Kecamatan Katingan Hulu	266.507.100,00
10.	Kecamatan Katingan Kuala	578.000.000,00
11.	Kecamatan Katingan Tengah	333.651.487,91
12.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	319.050.000,00
Jumlah		67.448.604.554,73

Penambahan dari Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Penambahan berasal dari kapitalisasi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.68
Penambahan dari Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	2.500.000,00
2.	Kecamatan Katingan Hilir	196.600.000,00
Jumlah		199.100.000,00

Penambahan dari Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Tahun 2025

Penambahan berasal dari kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Penambahan dari Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	42.512.248,62
2.	Kecamatan Katingan Hilir	99.721.290,00
Jumlah		142.233.538,62

Penambahan dari Utang Belanja Tahun 2025

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Utang Belanja Tahun 2025 pada Dinas PUPR senilai Rp3.688.752.391,89.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Penambahan dari Reklasifikasi antar kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari reklasifikasi antar KIB pada Tahun 2025 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.70
Penambahan dari Reklasifikasi antara KIB Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	26.350.000,00	Dari KIB C	Ke KIB D
2.	Dinas Kesehatan	9.446.759.999,00	Dari KIB C	Ke KIB D
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	104.350,00	Dari KIB C	Ke KIB D
Jumlah		9.473.214.349,00		

Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada Tahun 2025

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada Dinas PUPR senilai Rp773.816.504,74 yang merupakan temuan Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2025 yakni kelebihan pembayaran dari kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebagaimana tersaji pada **Lampiran 10**.

Pengurangan dari Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp132.507.585,69 yang merupakan Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD Tahun 2025 yang merupakan kelebihan pembayaran dari kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2026.

Pengurangan dari Reklasifikasi antar kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025:

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat dari reklasifikasi ke KIB B - Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR senilai Rp1.399.240.000,20 yang merupakan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.

5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		223.149.068.124,21	219.627.963.642,21

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp223.149.068.124,21 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.521.104.482,00 dengan persentase kenaikan 1,60% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.71
Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	38.028.829.754,15	34.505.125.272,15	3.523.704.482,00
2	Dinas Kesehatan	306.750.000,00	306.750.000,00	0,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	34.965.000,00	34.965.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.838.408.300,00	157.838.408.300,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	18.349.440.676,06	18.349.440.676,06	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	410.193.844,00	410.193.844,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.225.900,00	101.225.900,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	224.396.450,00	224.396.450,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.393.700,00	25.393.700,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.338.030,00	140.338.030,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	29.999.400,00	29.999.400,00	0,00
13	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.032.989.500,00	2.017.989.500,00	15.000.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	969.299.000,00	998.899.000,00	(29.600.000,00)
15	Sekretariat Daerah	2.762.469.220,00	2.762.469.220,00	0,00
16	Sekretariat DPRD	334.831.250,00	334.831.250,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
18	Inspektorat Daerah	22.966.000,00	22.966.000,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.429.300,00	40.429.300,00	0,00
22	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.333.270.800,00	1.333.270.800,00	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	98.692.000,00	98.692.000,00	0,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Jumlah		223.149.068.124,21	219.627.963.642,21	3.521.104.482,00

Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Mutasi Tahun 2025				31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Aset Tetap Lainnya	219.627.963.642,21	0,00	3.557.774.482,00	36.670.000 ,00	223.149.068.124,21	3.521.104.482,00
Jumlah Nilai Perolehan		219.627.963.642,21	0,00	3.557.774.482,00	36.670.000 ,00	223.149.068.124,21	3.521.104.482,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Aset Tetap Lainnya			
Saldo Awal			219.627.963.642,21
Koreksi Saldo Awal			0,00
Saldo Awal setelah koreksi			219.627.963.642,21
Penambahan	Belanja Modal	465.602.972,00	
	Beban Barang dan Jasa BOS	3.085.101.510,00	
	Jumlah Penambahan		3.550.704.482,00
Pengurangan	Penghapusan	29.600.000,00	
Jumlah Pengurangan			29.600.000,00
Saldo Akhir			223.149.068.124,21

Pertambahan – Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 :

Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.73
Pertambahan-Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00
2.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	15.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan	438.602.972,00
Jumlah		465.602.972,00

Pertambahan – Kapitalisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2025

Penambahan berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.085.101.510,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025.

Pengurangan akibat Penghapusan pada Tahun 2025

Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp29.600.000,00 yang merupakan aset tetap lainnya berupa buku umum dan dihapuskan karena kondisi sudah tidak dapat digunakan lagi.

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		41.938.830.820,99	43.731.522.071,99

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.938.830.820,99 dan mengalami penurunan dengan persentase 4,10% atau sebesar Rp1.792.691.251,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.74
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	44.442.142,67	44.442.142,67	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.436.575.160,00	3.397.792.460,00	(1.961.217.300,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.423.229.568,99	22.423.229.568,99	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.292.264.306,23	2.292.264.306,23	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.422.000,00	675.422.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	218.469.000,00	218.469.000,00	0,00
7	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	106.842.900,00	106.842.900,00	0,00
8	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	13.191.300.694,10	13.191.300.694,10	0,00
9	Sekretariat Daerah	476.201.000,00	511.101.000,00	(34.900.000,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	717.370.000,00	717.370.000,00	0,00
11	Kecamatan Petak Malai	13.838.000,00	13.838.000,00	0,00
12	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00
13	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.900.000,00	109.700.000,00	(99.800.000,00)
15	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	39.600.000,00	14.900.000,00	24.700.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	59.450.000,00	0,00	59.450.000,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.425.000,00	0,00	197.425.000,00
18	Dinas Sosial	21.651.049,00	0,00	21.651.049,00
Jumlah		41.938.830.820,99	43.731.522.071,99	(1.792.691.251,00)

Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.75
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			31 Desember 2025	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.731.522.071,99	0,00	303.226.049,00	2.095.917.300,00	41.938.830.820,99	(1.792.691.251,00)
Jumlah Nilai Perolehan		43.731.522.071,99	0,00	303.226.049,00	2.095.917.300,00	41.938.830.820,99	(1.792.691.251,00)

Saldo Awal	43.731.522.071,99
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	43.731.522.071,99
Penambahan	
Reklas Barang Antar KIB	303.226.049,00
Jumlah Penambahan	303.226.049,00
Pengurangan	
Reklasifikasi	2.095.917.300,00
Jumlah Pengurangan	2.095.917.300,00
Saldo Akhir	41.938.830.820,99



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Penambahan akibat Reklasifikasi pada Tahun 2025

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat reklasifikasi antar KIB pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.76
Penambahan akibat Reklasifikasi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Badan Pendapatan Daerah	59.450.000,00	Dari KIB C	Ke KIB F
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.425.000,00	Dari KIB C	Ke KIB F
3.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	24.700.000,00	Dari KIB C	Ke KIB F
4.	Dinas Sosial	21.651.049,00	Dari KIB C	Ke KIB F
Jumlah		303.226.049,00		

Pengurangan akibat Reklasifikasi pada Tahun 2025

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat reklasifikasi antar KIB pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.77
Pengurangan akibat Reklasifikasi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan Mutasi	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.800.000,00	Ke KIB F	Ke KIB C
2.	Dinas Kesehatan	1.961.217.300,00	Ke KIB F	Ke KIB C
3.	Sekretariat Daerah	34.900.000,00	Ke KIB F	Ke KIB C
Jumlah		2.095.917.300,00		

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(3.055.442.176.140,37)	(2.856.168.381.001,23)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.055.442.176.140,37) dan mengalami kenaikan sebesar (Rp199.273.795.139,14) atau 6,98% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.78
Rincian Akumulasi Penyusutan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Naik)/Turun
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(11.093.062.309,24)	(10.025.576.954,13)	(1.067.485.355,11)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(4.221.092.588,32)	(3.934.959.915,62)	(286.132.672,70)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(37.133.276.433,60)	(32.589.899.536,75)	(4.543.376.896,85)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.327.962.073,99)	(15.309.871.360,97)	(2.018.090.713,02)
5	Badan Pendapatan Daerah	(13.677.886.675,04)	(13.653.241.261,02)	(24.645.414,02)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(16.616.292.184,62)	(15.707.663.750,83)	(908.628.433,79)
7	BLUD RSUD Mas Amsyar	(94.604.594.174,99)	(79.837.812.823,21)	(14.766.781.351,78)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Naik)/Turun
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(20.277.357.002,05)	(18.726.060.686,88)	(1.551.296.315,17)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.522.624.633,44)	(5.928.237.374,04)	(594.387.259,40)
10	Dinas Kesehatan	(138.571.965.166,80)	(115.103.666.248,19)	(23.468.298.918,61)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(27.927.538.085,78)	(26.880.038.955,51)	(1.047.499.130,27)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(7.640.301.937,60)	(7.133.584.004,08)	(506.717.933,52)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	(13.439.240.989,61)	(12.305.566.233,58)	(1.133.674.756,03)
14	Dinas Lingkungan Hidup	(38.380.908.296,62)	(35.074.113.141,40)	(3.306.795.155,22)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.064.758.214.210,38)	(1.978.111.799.496,89)	(86.646.414.713,49)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.026.889.378,38)	(4.680.264.387,90)	(346.624.990,48)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(8.812.138.359,78)	(8.347.952.716,33)	(464.185.643,45)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.986.371.031,58)	(5.780.059.248,11)	(1.206.311.783,47)
19	Dinas Pendidikan	(173.526.702.993,90)	(154.158.080.986,19)	(19.368.622.007,71)
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(38.334.776.274,45)	(35.390.501.481,50)	(2.944.274.792,95)
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(36.862.968.054,74)	(31.627.006.556,71)	(5.235.961.498,03)
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(117.570.492.211,04)	(102.120.161.953,60)	(15.450.330.257,44)
23	Dinas Sosial	(6.706.158.452,80)	(5.055.535.885,76)	(1.650.622.567,04)
24	Inspektorat	(5.982.258.592,54)	(5.256.075.950,36)	(726.182.642,18)
25	Kecamatan Bukit Raya	(1.472.493.034,35)	(1.363.491.969,89)	(109.001.064,46)
26	Kecamatan Kamipang	(2.712.789.751,42)	(2.500.628.345,95)	(212.161.405,47)
27	Kecamatan Katingan Hilir	(3.660.368.300,92)	(3.123.827.602,86)	(536.540.698,06)
28	Kecamatan Katingan Hulu	(2.564.453.661,18)	(2.232.663.904,71)	(331.789.756,47)
29	Kecamatan Katingan Kuala	(3.861.477.542,63)	(3.561.155.520,21)	(300.322.022,42)
30	Kecamatan Katingan Tengah	(3.412.968.515,36)	(3.092.075.277,22)	(320.893.238,14)
31	Kecamatan Marikit	(1.350.498.146,65)	(1.070.038.261,23)	(280.459.885,42)
32	Kecamatan Mendawai	(1.248.000.825,66)	(1.155.104.347,99)	(92.896.477,67)
33	Kecamatan Petak Malai	(1.905.197.604,72)	(1.775.249.882,22)	(129.947.722,50)
34	Kecamatan Pulau Malan	(1.411.852.345,38)	(1.308.194.230,61)	(103.658.114,77)
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	(1.585.827.870,01)	(704.520.479,71)	(881.307.390,30)
36	Kecamatan Tasik Payawan	(1.012.896.448,57)	(953.393.629,27)	(59.502.819,30)
37	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(2.528.138.863,77)	(2.074.195.463,66)	(453.943.400,11)
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(22.137.557.211,65)	(19.647.749.839,04)	(2.489.807.372,61)
39	Sekretariat Daerah	(72.896.165.067,48)	(69.028.401.149,79)	(3.867.763.917,69)
40	Sekretariat DPRD	(19.680.418.839,33)	(19.839.960.187,31)	(159.541.347,98)
Jumlah		(3.055.442.176.140,37)	(2.856.168.381.001,23)	(199.273.795.139,14)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Dengan rincian Akumulasi Penyusutan per Objek sebagai berikut:

Tabel 5.3.79
Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2025	(dalam rupiah) Naik/ (Turun)
		Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
Akumulasi Penyusutan	(2.856.168.381.001,23)	(829.191.032,95)	200.706.619.869,64	2.262.015.763,45	(3.055.442.176.140,37)	199.273.795.139,14
Jumlah Nilai Perolehan	(2.856.168.381.001,23)	(829.191.032,95)	200.706.619.869,64	2.262.015.763,45	(3.055.442.176.140,37)	199.273.795.139,14

Saldo Awal		(2.856.168.381.001,23)
Koreksi Saldo Awal		0,00
Saldo Awal setelah koreksi		(2.856.168.381.001,23)
Penambahan		
Reklas Penyusutan Barang Antar KIB	(1.767.500,00)	
Koreksi Penyusutan Beban Penyusutan Tahun Berkenaan	(829.191.032,95)	
	(200.704.852.369,64)	
Jumlah Penambahan		(201.535.810.902,59)
Pengurangan		
Penghapusan Reklas Ke Aset Lain-lain	(1.901.499.743,97)	
Reklas Ke Persediaan	(224.390.803,32)	
	(136.125.216,16)	
Jumlah Pengurangan		(2.262.015.763,45)
Saldo Akhir		(3.055.442.176.140,37)

Penambahan akibat Reklasifikasi penyusutan antar KIB pada Tahun 2025:

Penambahan penyusutan akibat reklasifikasi antar KIB pada Tahun 2025 merupakan reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.767.500,00 dari KIB E ke KIB B, untuk objek aset tetap berupa laptop sesuai informasi Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan.

Penambahan akibat koreksi penyusutan pada Tahun 2025:

Penambahan penyusutan akibat koreksi penyusutan pada Tahun 2025, secara akumulasi koreksi penyusutan senilai Rp829.191.032,95, merupakan koreksi pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) akibat proses pengelompokan aset tetap pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.80
Penambahan akibat Koreksi Penyusutan Tahun 2025

No.	SKPD	(dalam rupiah) Nilai (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(213.483.227,90)
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(329.746,29)
3.	BLUD RSUD Mas Amsyar	(5.840.800,00)
4.	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(17.380.456,19)
5.	Dinas Kesehatan	(121.316.685,21)
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.167.370,11
7.	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. dan Perdagangan	(45.474.740,08)
8.	Dinas Lingkungan Hidup	(9.604.755,18)
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(401.957.140,66)
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(45.484.732,78)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
11	Dinas Pendidikan	(5.057.900,01)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	167.720,01
13	Inspektorat	156.486,31
14	Kecamatan Katingan Hulu	20.934.400,00
15	Kecamatan Katingan Kuala	1.054.250,00
16	Kecamatan Katingan Tengah	2.690.799,40
17	Kecamatan Sanaman Mantikei	(932.000,00)
18	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	6.198.125,52
Jumlah		(829.191.032,95)

Penambahan beban penyusutan pada Tahun 2025:

Penambahan penyusutan akibat proses penyusutan tahun berkenaan pada Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan penyusutan metode garis lurus, per tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.81
Penambahan beban Penyusutan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(994.199.640,82)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(286.132.672,70)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(5.005.252.740,39)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.565.802.171,59)
5	Badan Pendapatan Daerah	(1.198.271.499,73)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan	(866.485.576,65)
7	BLUD RSUD Mas Amsyar	(14.673.855.980,35)
8	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(1.529.548.358,98)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(515.745.830,83)
10	Dinas Kesehatan	(24.444.728.057,96)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.079.989.047,74)
12	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	(503.492.219,23)
13	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. dan Perdagangan	(1.088.200.015,95)
14	Dinas Lingkungan Hidup	(3.037.818.971,47)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(86.384.358.419,89)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(338.574.990,48)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(464.185.643,45)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.118.684.193,55)
19	Dinas Pendidikan	(19.264.069.321,97)
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(2.823.751.697,86)
21	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(5.199.977.069,46)
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(15.424.230.878,68)
23	Dinas Sosial	(455.895.767,04)
24	Inspektorat	(730.706.628,49)
25	Kecamatan Bukit Raya	(103.816.350,17)
26	Kecamatan Kamipang	(212.161.405,47)
27	Kecamatan Katingan Hilir	(536.540.698,06)
28	Kecamatan Katingan Hulu	(352.724.156,47)
29	Kecamatan Katingan Kuala	(458.721.272,42)
30	Kecamatan Katingan Tengah	(327.999.323,25)
31	Kecamatan Marikit	(207.060.885,42)
32	Kecamatan Mendawai	(92.896.477,67)
33	Kecamatan Petak Malai	(129.947.722,50)
34	Kecamatan Pulau Malan	(103.658.114,77)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

35	Kecamatan Sanaman Mantikei	(307.079.390,30)
36	Kecamatan Tasik Payawan	(59.502.819,30)
37	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(434.818.978,27)
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(2.516.714.515,47)
39	Sekretariat Daerah	(4.250.233.855,69)
40	Sekretariat DPRD	(1.617.019.009,15)
Jumlah		(200.704.852.369,64)

Pengurangan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025:

Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan Aset Tetap pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.82
Pengurangan akibat Proses Penghapusan Tahun 2025

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(470.283.592,66)
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(45.918.488,04)
3.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(108.121.904,91)
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(11.175.758,37)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(18.857.142,86)
6	Sekretariat DPRD	(1.247.142.857,13)
Jumlah		(1.901.499.743,97)

1. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan dengan total nilai Rp470.283.592,66 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan sebagai bagian dari penghapusan aset tetap akibat proses hibah gedung dan bangunan untuk Pemerintah Desa Tumbang tangoi dan penghapusan akibat proses pembongkaran Puskesmas Kereng Pangi;
2. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total nilai Rp45.918.488,04 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan akibat proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada instansi vertikal di Wilayah Kabupaten Katingan dan penghapusan akibat proses hibah lampu penerangan jalan umum tenaga surya;
3. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan dan Perikanan dengan total nilai Rp108.121.904,91 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan akibat proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Desa Tumbang Tungku dan Pemerintah Desa Tumbang Geragu untuk objek Bangunan Dermaga Penyebrangan;
4. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan dengan total nilai Rp11.175.758,37 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan akibat proses pemindahtanganan gedung dan bangunan dalam bentuk hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Katingan;
5. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan total nilai Rp18.857.142,86 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan akibat penghapusan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan beroda dua dikarenakan telah diselesaikannya proses pelunasan tuntutan ganti rugi atas kehilangan kendaraan beroda dua; dan
6. Pengurangan nilai penyusutan akibat proses penghapusan pada Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD dengan total nilai Rp1.247.142.857,13 merupakan akumulasi penyusutan yang dihapuskan akibat penghapusan peralatan dan mesin berupa kendaraan beroda empat unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui proses penjualan kendaraan perorangan dinas secara langsung.



Pengurangan akibat reklasifikasi pada Tahun 2025:

Pengurangan penyusutan akibat reklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada Tahun 2025 merupakan bagian dari reklasifikasi aset tetap berupa Bangunan pustu/polindes yang dalam kondisi rusak pada Dinas Kesehatan yang reklas ke aset lain-lain dengan nilai penyusutan yang berkurang senilai Rp224.390.803,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.83
Pengurangan akibat Reklasifikasi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Lokasi Unit SKPD	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Poskesdes Mekar Tani	Rusak	62.800.000,00	22.608.000,00	40.192.000,00
2.	Pustu Parupuk	Rusak	3.468.000,00	1.456.560,00	2.011.440,00
3.	Polindes Luwuk Kanan	Rusak	1.560.000,00	686.400,00	873.600,00
4.	Polindes Hampalam	Rusak	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.	Polindes Tumbang Banjang	Rusak	2.444.703,00	1.075.669.32	1.369.033,68
6.	Pustu UPT SP.II Pulau Malan	Rusak	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
7.	Pustu UPT SP.I Pulau Malan	Rusak	2.750.000,00	1.980.000,00	770.000,00
8.	Pengawasan Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00
9.	Perencanaan Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	10.587.500,00	0,00	10.587.500,00
10.	Rehab Pustu Manduing Lama	Rusak	147.203.800,00	29.996.334,00	117.207.466,00
11.	Pustu Manduing Lama	Rusak	116.850.000,00	0,00	116.850.000,00
12.	Polindes Tewang Panjang	Rusak	1.536.000,00	675.840,00	860.160,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Lokasi Unit SKPD	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
13.	Polindes Kuluk Habuhus	Rusak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.	Pustu Tumbang Hiran Seberang	Rusak	230.200.000,00	82.872.000,00	147.328.000,00
15.	Pustu Tumbang Tabulus	Rusak	100.500.000,00	80.400.000,00	20.100.000,00
16.	Polindes Kampung Keramat	Rusak	3.000.000,00	2.640.000,00	360.000,00
Jumlah			697.605.003,00	224.390.803,32	473.214.199,68

Pengurangan penyusutan akibat proses reklasifikasi ke persediaan pada Tahun 2025 :

Merupakan akibat dari pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dilakukan reklasifikasi ke persediaan berupa lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang secara substansi merupakan barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga (dihibahkan), namun secara administrasi dokumen hibah belum selesai dilaksanakan oleh Dinas PUPR, sehingga proses tersebut mengurangi nilai penyusutan senilai Rp136.125.216,16.

5.3.1.4	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		127.085.426.373,30	128.870.524.465,66

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.085.426.373,30 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.785.098.092,36 dengan persentase penurunan 1,39% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp128.870.524.465,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.84
Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(turun)
Tagihan Jangka Panjang	707.380.077,00	707.380.077,00	0,00
Aset Tak Berwujud	8.581.344.130,00	8.487.044.130,00	94.300.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.410.284.130,00)	(6.963.677.297,50)	(446.606.832,54)
Aset Lain-Lain	128.664.964.913,90	127.391.201.556,16	1.273.763.357,74
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.457.978.617,60)	(3.262.933.000,00)	(195.045.617,60)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.511.509.000,00	(2.511.509.000,00)
J u m l a h	127.085.426.373,30	128.870.524.465,66	(1.785.098.092,36)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

707.380.077,00

707.380.077,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp707.380.077,00 yang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.85
Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	580.127.577,00	0,00	0,00	580.127.577,00
Tagihan Penjualan Angsuran	127.252.500,00	0,00	0,00	127.252.500,00
J u m l a h	707.380.077,00	0,00	0,00	707.380.077,00

1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp580.127.577,00 merupakan bagian tidak lancar dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan tagihan kelebihan pembayaran gaji atas pensiunan pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
2. Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp127.252.500,00 merupakan saldo tagihan atas Penjualan Angsuran berupa Kredit Ternak (Sapi) dan Kredit Kendaraan (Traktor) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang tidak diperoleh angsuran pembayarannya selama tahun 2025.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025

31 Desember 2024

8.581.344.130,00

8.487.044.130,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.581.344.130,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.300.000,00 dari saldo tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.86
Rincian Aset Tidak Berwujud Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	626.415.800,00	626.415.800,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.213.685.000,00	1.213.685.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.910.000,00	118.910.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.482.874.500,00	2.482.874.500,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.388.000,00	64.388.000,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.570.000,00	37.570.000,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	286.620.000,00	286.620.000,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.805.000,00	94.455.000,00	44.350.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	107.675.000,00	107.675.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	31.093.500,00	31.093.500,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	101.166.000,00	101.166.000,00	0,00
15	Sekretariat DPRD	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.170.000,00	104.170.000,00	0,00
17	Kecamatan Katingan Kuala	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00
18	Inspektorat Daerah	229.040.000,00	229.040.000,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	527.750.000,00	527.750.000,00	0,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	429.766.330,00	379.816.330,00	49.950.000,00
22	Dinas Perhubungan dan Perikanan	304.350.000,00	304.350.000,00	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	1.027.700.000,00	1.027.700.000,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	599.800.000,00	599.800.000,00	0,00
Jumlah		8.581.344.130,00	8.487.044.130,00	94.300.000,00

Adapun Penambahan Aset Tidak Berwujud berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp49.950.000,00 dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp44.350.000,00 berupa software.

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	128.664.964.913,90	127.391.201.556,16

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp128.664.964.913,90 mengalami kenaikan sebesar Rp1.273.763.357,74 dari saldo tahun sebelumnya. Aset Lain-Lain terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat, barang tidak ditemukan, atau barang tersebut tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.87
Aset Lain lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025	Naik/(Turun)
				Penambahan	Pengurangan		
1	Aset Lain-Lain	127.391.201.556,16	0,00	1.612.421.507,74	338.658.150,00	128.664.964.913,90	1.273.763.357,74
Jumlah		127.391.201.556,16	0,00	1.612.421.507,74	338.658.150,00	128.664.964.913,90	1.273.763.357,74

Adapun ringkasan mutasi Aset Lain-lain dapat disajikan dalam tabel berikut.

Saldo Awal	127.391.201.556,16
Koreksi Saldo Awal	0,00
Jumlah Penambahan	127.391.201.556,16
Penambahan :	
Reklas ke Aset Lain Lain	1.472.421.507,74
Jumlah Pengurangan	1.472.421.507,74
Pengurangan:	
Penghapusan	57.658.150,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Reklas Ke KIB A Dinas Pertanian	140.000.000,00	
		198.658.150,00
Saldo Akhir		128.664.964.913,90

Penambahan akibat Reklasifikasi pada Tahun 2025:

Penambahan aset lain-lain akibat proses reklasifikasi pada perangkat daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Kesehatan terdapat proses reklasifikasi aset tetap dari KIB C Gedung dan Bangunan ke Aset Lain - Lain senilai Rp697.605.003,00 berupa Bangunan pustu/polindes yang dalam kondisi rusak pada Dinas Kesehatan; dan
2. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-Lain senilai Rp773.816.504,74 yang merupakan temuan Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2025 yakni kelebihan pembayaran dari kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebagaimana tersaji pada **Lampiran 10**.

Pengurangan akibat Penghapusan pada Tahun 2025

Merupakan proses penghapusan aset lain-lain pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, senilai Rp57.658.150,00 berupa kendaraan beroda dua sebanyak 2 unit dikarenakan telah diselesaikannya proses pelunasan tuntutan ganti rugi atas kehilangan kendaraan beroda dua tersebut.

Pengurangan akibat Reklasifikasi antar KIB Tahun 2025

Merupakan proses reklasifikasi aset lain-lain berupa tanah yang setelah dilakukan oleh identifikasi Pengurus Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan objek tanah kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sehingga selanjutnya dilakukan proses reklasifikasi dari aset lain-lain ke KIB A Tanah.

5.3.1.4.4	Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Aset Tidak Berwujud	(7.410.284.130,00)	(6.963.677.297,50)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp7.410.284.130,00) mengalami kenaikan sebesar Rp446.606.832,50 dari saldo tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.88
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			31 Desember 2025	Naik/(Turun)
		Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.963.677.297,50)	(50.400.000,00)	396.206.832,50	0,00	(7.410.284.130,00)	446.606.832,50
Jumlah	(6.963.677.297,50)	(50.400.000,00)	396.206.832,50	0,00	(7.410.284.130,00)	446.606.832,50

Adapun mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat Koreksi saldo awal senilai Rp50.400.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dikarenakan pada Tahun



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

2024 terdapat perubahan kode barang dari 1.3.5.03.01.06.001 Kajian menjadi 1.3.5.03.01.05.001 Software sehingga berpengaruh terhadap penyesuaian masa manfaat yang mengakibatkan penyesuaian amortisasi senilai Rp.2.200.000,00 dan terdapat penyesuaian beban senilai Rp48.200.000,00 karena terdapat item barang yang belum dilakukan penyusutan sepenuhnya; dan

2. Penambahan dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 senilai Rp396.206.832,50 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.89
Penambahan dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(57.804.082,50)
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(11.250.000,00)
3.	Badan Pendapatan Daerah	(102.850.000,00)
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan	(48.200.000,00)
5.	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(59.980.000,00)
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(11.087.500,00)
7.	Dinas Lingkungan Hidup	(24.925.000,00)
8.	Dinas Pendidikan	(276.500,00)
9.	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(76.087.500,00)
10.	Sekretariat DPRD	(3.746.250,00)
Jumlah		(396.206.832,50)

5.3.1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(3.457.978.617,60)	(3.262.933.000,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.457.978.617,60). Terdapat kenaikan sebesar Rp195.045.617,60 dari saldo tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3.90
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD	Penambahan	Pengurangan	Saldo (Rp)
Saldo Awal				
Penyesuaian akibat proses reklasifikasi Bangunan pustu/polindes yang dalam kondisi rusak	Dinas Kesehatan	224.390.803,32	0,00	224.390.808,32
Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Kendaraan Beroda Dua sebanyak Dua Unit	Satpol PP	0,00	(29.345.185,72)	(29.345.185,72)
Jumlah		224.390.803,32	(29.345.185,72)	195.045.622,60

5.3.1.4.6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	2.511.509.000,00

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah dengan menyimpan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo TDF per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.511.509.000,00. Terdapat pencairan dana TDF pada Tahun 2025 yang telah diterima Kas Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Nomor 62.06/41.0/000058/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 11 April 2025 senilai Rp2.511.506.000,00, Nomor 62.06/41.0/000059/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 11 April 2025 senilai Rp2.000,00 dan Nomor 62.06/41.0/001483/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025 tanggal 11 April 2025 senilai Rp1.000,00.

5.3.2	Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		18.733.161.709,19	19.812.253.125,90

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.733.161.709,19 mengalami penurunan sebesar Rp1.079.091.416,71 dari saldo Kewajiban tahun sebelumnya dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.91
Kewajiban

(dalam rupiah)			
Jenis Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	18.733.161.709,19	19.812.253.125,90	1.079.091.416,71
Jumlah	18.733.161.709,19	19.812.253.125,90	1.079.091.416,71

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		18.733.161.709,19	19.812.253.125,90

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.733.161.709,19 mengalami penurunan sebesar Rp1.079.091.416,71 dari saldo Kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp19.812.253.125,90 yang merupakan Utang Belanja.

5.3.2.1.1	Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		18.733.161.709,19	19.812.253.125,90

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.733.161.709,19 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.3.92
Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pegawai	5.685.009.442,40	(76.088.027,07)	5.608.921.415,33	5.684.388.120,99	6.101.763.326,22	5.191.546.210,10
2	Utang Belanja Barang Jasa	670.884.643,90	0,00	670.884.643,90	10.385.687.165,09	670.884.643,90	10.385.687.165,09
3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	3.149.468.717,00	0,00	3.149.468.717,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	6.459.617,00	0,00	6.459.617,00	0,00	0,00	6.459.617,00
4	Utang Belanja Bantuan Keuangan	13.449.899.422,60	0,00	13.449.899.422,60	0,00	13.449.899.422,60	0,00
Jumlah		19.812.253.125,90	(76.088.027,07)	19.736.165.098,83	19.219.544.003,08	20.222.547.392,72	18.733.161.708,19

Penjelasan:

1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai terdiri atas Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.191.546.209,40 berupa Utang jasa medik yang masih belum dibayarkan kepada para pegawai BLUD RSUD Mas Amsyar sampai dengan 31 Desember 2025. Terdapat koreksi pengurangan saldo awal Utang dikarenakan klaim yang diajukan tidak sepenuhnya di realisasikan oleh BPJS dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal			5.685.009.442,40
Koreksi Saldo Awal Utang			(76.088.027,00)
Saldo Awal setelah koreksi			5.608.921.415,40
Penambahan	Pengakuan Utang Pegawai BLUD	5.684.388.120,00	
Jumlah Penambahan			5.684.388.120,00
Pengurangan	Pengakuan Pembayaran hutang Pegawai BLUD	6.101.763.326,00	
Jumlah Pengurangan			6.101.763.326,00
Saldo Akhir			5.191.546.209,40

2. Utang Belanja Barang Jasa

Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp10.385.687.165,09 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa pada 5 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.93
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Utang (Rp)
1	BLUD Mas Amsyar Kasongan	507.405.803,20
2	Inspektorat Daerah	138.950.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.943.811.044,89
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	4.673.740.317,00
5	Dinas Kesehatan	121.780.000,00
Jumlah		10.385.687.165,09



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Adapun mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	670.884.643,90
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	670.884.643,90
Penambahan	Penambahan Utang Barang dan Jasa 10.385.687.165,09
Jumlah Penambahan	10.385.687.165,09
Pengurangan	Pembayaran Utang Barang dan Jasa 670.884.643,90
Jumlah Pengurangan	670.884.643,90
Saldo Akhir	10.385.687.165,09

3. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal sebesar Rp3.149.468.717,00 merupakan pengakuan atas Utang Belanja Modal pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jariptangan Tahun 2025 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.94
Rincian Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian Utang	SKPD	Nilai Utang (Rp)
1	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rumah Negara Golongan II	Sekretariat Daerah	813.750.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Dinas Kesehatan	350.000.000,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Umum	Dinas Kesehatan	60.249.998,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Dinas Kesehatan	23.000.000,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Dinas Kesehatan	22.799.999,00
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Anak	Dinas Kesehatan	6.850.001,00
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan Umum Lainnya	Dinas Kesehatan	296.864.501,00
8	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Dinas Kesehatan	38.400.002,00
9	Utang Belanja Modal Peralatan dan	Dinas Kesehatan	159.562.500,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian Utang	SKPD	Nilai Utang (Rp)
	Mesin - Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia		
10	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Mikrobiologi	Dinas Kesehatan	19.540.000,00
11	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rumah Negara Golongan III	Dinas Kesehatan	1.184.032.716,00
12	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pagar	Dinas Kesehatan	174.419.000,00
Jumlah			3.149.468.717,00

4. Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp6.459.617,00 merupakan saldo Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 yang tidak tersalur akibat kegagalan transfer SP2D karena Pemerintah Desa tersebut tidak melaporkan adanya perubahan rekening Bank penampungan.

Rincian Utang Belanja Modal disajikan pada **Lampiran 11**.

5.3.3	Ekuitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.434.847.363.807,26	3.408.260.197.129,23

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.434.847.363.807,26 dan mengalami kenaikan sebesar Rp26.587.166.678,03 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yakni sebesar Rp3.408.260.197.129,23.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut :

1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian Laporan Operasional tahun 2025 mengalami perubahan format dengan laporan tahun sebelumnya akibat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

5.4.1	Pendapatan – LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.202.276.471.190,75	1.326.397.471.963,32

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan dalam pengakuannya Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.202.276.471.190,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Pendapatan – LO

<i>(dalam rupiah)</i>			
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah – LO	90.711.032.998,61	69.122.031.232,46	21.589.001.766,15
Pendapatan Transfer – LO	1.089.565.164.755,00	1.228.472.383.092,00	(138.907.218.337,00)
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	22.000.273.437,14	28.803.057.638,86	(6.802.784.201,72)
Jumlah	1.202.276.471.190,75	1.326.397.471.963,32	(124.121.000.772,57)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		90.711.032.998,61	69.122.031.232,46

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp90.711.032.998,61 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Daerah - LO	49.335.604.054,30	23.036.240.118,80	26.299.363.935,50
Retribusi Daerah - LO	33.562.269.255,00	11.714.213.964,00	21.848.055.291,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83	-1.151.188.568,06
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	4.384.837.896,54	29.792.066.788,83	-25.407.228.892,29
Jumlah	90.711.032.998,61	69.122.031.232,46	21.589.001.766,15

5.4.1.1.1 Pajak Daerah – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

49.335.604.054,30

23.036.240.118,80

Pendapatan Pajak Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam periode TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah – LO Per SKPD

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Sekretariat Daerah	7.123.764.950,50	8.922.316.161,00	(1.798.551.210,50)
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
Badan Pendapatan Daerah	42.198.522.555,80	14.113.923.957,80	28.084.598.598,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.011.548,00	0,00	8.011.548,00
Jumlah	49.335.604.054,30	23.036.240.118,80	26.299.363.935,50

Tabel 5.4.4
Pendapatan Pajak Daerah – LO Per Objek
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Hotel - LO	125.618.200,00	124.991.500,00	626.700,00
Pajak restoran- LO	1.572.863.403,80	1.848.338.212,80	(275.474.809,00)
Pajak Hiburan - LO	652.500,00	100.000,00	552.500,00
Pajak Reklame - LO	183.068.969,00	251.540.145,00	(68.471.176,00)
Pajak penerangan Jalan - LO	94.739.583,00	8.677.637.056,00	(8.582.897.473,00)
Pajak Air Tanah - LO	19.241.864,00	4.028.970,00	15.212.894,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	76.897.300,00	345.623.880,00	(268.726.580,00)
Pajak mineral bukan logam dan batuan - LO	9.121.281.496,50	8.673.435.396,00	447.846.100,50
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan - LO	2.462.483.781,00	2.219.886.121,00	242.597.660,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)- LO	1.318.528.938,00	890.658.838,00	427.870.100,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	10.618.686.154,00	0,00	10.618.686.154,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.545.360.694,00	0,00	9.545.360.694,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	14.196.181.171,00	0,00	14.196.181.171,00
Jumlah	49.335.604.054,30	23.036.240.118,80	26.299.363.935,50

Terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah – LO	49.335.604.054,30
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	46.173.447.562,30
Selisih LO – LRA	3.162.156.492,00
Penjelasan Selisih:	
Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan - Bapenda	64.585.993,00
Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Bapenda	1.050.658.499,00
Pengakuan Piutang Pajak MBLB - Bapenda	2.046.912.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	3.162.156.492,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

33.562.269.255,00

11.714.213.964,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari retribusi daerah dalam periode Tahun Anggaran 2025. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah - LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Retribusi Daerah – LO Per Objek

(dalam rupiah)

Objek	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	28.609.571.149,00	6.742.589.175,00	21.866.981.974,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	135.759.000,00	120.292.000,00	15.467.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO	89.955.000,00	94.100.000,00	(4.145.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.420.000,00	27.750.000,00	(23.330.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.370.427.962,00	2.568.064.490,00	(197.636.528,00)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	733.112.000,00	602.917.000,00	130.195.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Objek	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Retribusi tempat khusus parkir - LO	53.421.000,00	41.355.000,00	12.066.000,00
Retribusi pelayanan kepelabuhan - LO	35.055.000,00	43.385.000,00	(8.330.000,00)
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga- LO	329.345.000,00	370.809.000,00	(41.464.000,00)
Retribusi penjualan produksi usaha daerah - LO	181.140.600,00	208.425.000,00	(27.284.400,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.020.062.544,00	894.527.299,00	125.535.245,00
Jumlah	33.562.269.255,00	11.714.213.964,00	21.848.055.291,00

Tabel 5.4.7
Retribusi Daerah – LO berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

Perangkat daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan	93.800.000,00	107.700.000,00	(13.900.000,00)
Dinas Kesehatan	3.639.752.832,00	6.821.067.034,00	(3.181.314.202,00)
BLUD RSUD Mas Amsyar	25.106.085.199,00	0,00	25.106.085.199,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.509.777.544,00	1.556.121.299,00	(46.343.755,00)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	169.200.000,00	167.450.000,00	1.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	504.570.500,00	513.412.000,00	(8.841.500,00)
Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. dan Perdagangan	615.988.000,00	581.525.000,00	34.463.000,00
Dinas Kebudayaan. Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	414.990.000,00	437.156.000,00	(22.166.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	148.090.600,00	121.625.000,00	26.465.600,00
Sekretariat Daerah	63.158.000,00	87.644.000,00	(24.486.000,00)
Kecamatan Katingan Kuala	20.256.000,00	20.800.000,00	(544.000,00)
Kecamatan Kamipang	19.670.000,00	20.170.000,00	(500.000,00)
Kecamatan Tasik Payawan	16.930.000,00	22.700.000,00	(5.770.000,00)
Kecamatan Katingan Hilir	17.500.000,00	21.000.000,00	(3.500.000,00)
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	23.640.000,00	34.140.000,00	(10.500.000,00)
Kecamatan Pulau Malan	14.800.000,00	10.500.000,00	4.300.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	91.700.000,00	55.400.000,00	36.300.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Perangkat daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Kecamatan Sanaman Mantikei	18.900.000,00	23.100.000,00	(4.200.000,00)
Kecamatan Marikit	18.717.000,00	22.222.000,00	(3.505.000,00)
Kecamatan Katingan Hulu	20.750.000,00	20.500.000,00	250.000,00
Kecamatan Mendawai	28.680.000,00	25.406.400,00	3.273.600,00
Kecamatan Bukit Raya	13.569.000,00	20.107.500,00	(6.538.500,00)
Kecamatan Petak Malai	17.199.080,00	9.931.890,00	7.267.190,00
Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	87.550.000,00	118.250.000,00	(30.700.000,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.868.000,00	20.800.000,00	61.068.000,00
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	18.100.000,00	17.100.000,00	1.000.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	27.850.000,00	(1.150.000,00)
Dinas Komunikasi. Informatika. Persandian dan Statistik	13.300.000,00	7.700.000,00	5.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah	187.540.000,00	216.818.000,00	(29.278.000,00)
Dinas Perhubungan dan Perikanan	559.487.500,00	606.017.841,00	(46.530.341,00)
Jumlah	33.562.269.255,00	11.714.213.964,00	21.848.055.291,00

Terdapat kenaikan secara signifikan dari TA 2025 yang pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp21.848.055.291,00 dari saldo tahun sebelumnya dikarenakan terdapat reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Retribusi.

Terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		33.562.269.255,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA		34.507.972.802,00
Selisih LO – LRA		(945.703.547,00)
Penjelasan Selisih:		
A. Penambahan Retribusi Daerah LO:		
Pelunasan Piutang Retribusi Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(1.500.000,00)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	63.000,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	25.061.985.199,00	
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	44.100.000,00	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	50.000.000,00	
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	1.000.000,00	25.155.648.199,00
B. Pengurangan Retribusi Daerah LRA:		



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	63.000,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.006.188.746,00	
Retribusi Penyewaan Bangunan	44.100.000,00	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00	
Retribusi Penyewaan Bangunan	1.000.000,00	26.101.356.746,00
C. Jumlah Penjelasan Selisih (A-B)=C		(945.703.547,00)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kekayaan Daerah yang	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83
Dipisahkan – LO		

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO merupakan pengakuan pendapatan dari penyertaan modal/investasi daerah dalam periode TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83	(1.151.188.568,06)
Jumlah	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83	(1.151.188.568,06)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 sebesar Rp3.428.321.792,77 merupakan pendapatan Dividen atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah senilai Rp3.416.545.356,00 dan CV. Jamkrida Kalteng senilai Rp11.776.436,77.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	4.384.837.896,54	29.792.066.788,83

Lain-Lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	510.460.552,00	693.098.840,00	(182.638.288,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	32.366.277,00	4.286.637.389,00	(4.254.271.112,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	72.061.557,15	18.857.142,86	53.204.414,29
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	654.477.446,92	147.548.498,61	506.928.948,31
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	307.545.483,00	57.624.046,00	249.921.437,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	226.693.761,00	175.787.507,00	50.906.254,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	510.460.552,00	693.098.840,00	(182.638.288,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	32.366.277,00	4.286.637.389,00	(4.254.271.112,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	72.061.557,15	18.857.142,86	53.204.414,29
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	2.575.336.597,47	4.649.026.307,36	(2.073.689.709,89)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LO	5.896.222,00	0,00	5.896.222,00
Pendapatan dari BLUD - LO	0,00	19.763.487.058,00	(19.763.487.058,00)
Jumlah	4.384.837.896,54	29.792.066.788,83	(25.407.228.892,29)

Terdapat selisih antara Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
selisih antara Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Lain-Lain PAD yang Sah – LO	4.384.837.896,54
Lain-Lain PAD yang Sah – LRA	6.205.680.378,10
Selisih LO – LRA	(1.820.842.481,56)
Penjelasan Selisih:	
Pengembalian Pengembalian Volume Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024/2025 Pada Dinas Kesehatan	(1.583.708.315,11)
Pengembalian Pengembalian Volume Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024/2025 Pada BLUD RSUD Mas Amsyar	(29.065.261,01)
Pengembalian Pengembalian Volume Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024/2025 Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(35.809.465,44)
Pelunasan Piutang YANKESKIN 2022	(416.417.489,00)
Pelunasan Piutang YANKESKIN 2024	(1.519.915.893,00)
Penambahan Piutang YANKESKIN 2025	992.129.835,00
Koreksi Defisit Penjualan Kendaraan Setwan	(420.482.800,00)
Reklasifikasi Pendapatan BLUD RSUD Mas Amsyar ke Retribusi Pelkes	(25.041.711.727,00)
Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	248.223.360,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.985.915.274,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.820.842.481,56)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

1.089.565.164.755,00

1.228.472.383.092,00

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer - LO diuraikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.12
Pendapatan Transfer – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.041.074.388.496,00	1.171.740.006.468,00	(130.665.617.972,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	48.490.776.259,00	56.732.376.624,00	(8.241.600.365,00)
Jumlah	1.089.565.164.755,00	1.228.472.383.092,00	(138.907.218.337,00)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2025 31 Desember 2024

1.041.074.388.496,00 1.171.740.006.468,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp130.665.617.972,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.171.740.006.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Perimbangan - LO	1.041.074.388.496,00	1.165.849.461.468,00	(124.775.072.972,00)
Jumlah	1.041.074.388.496,00	1.165.849.461.468,00	(124.775.072.972,00)

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan - LO

31 Desember 2025 31 Desember 2024

1.041.074.388.496,00 1.165.849.461.468,00

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.041.074.388.496,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Dana Perimbangan – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	183.679.104.100,00	180.237.736.000,00	3.441.368.100,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	644.050.930.713,00	672.273.960.026,00	(28.223.029.313,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	82.775.069.237,00	186.604.733.257,00	(103.829.664.020,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	130.569.284.446,00	126.733.032.185,00	3.836.252.261,00
JUMLAH	1.041.074.388.496,00	1.165.849.461.468,00	(124.775.072.972,00)

Dana Bagi Hasil - LO terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Sumber Daya Alam (SDA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Dana Bagi Hasil – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	29.270.908.100,00	22.464.445.000,00	6.806.463.100,00
DBH Pajak Penghasilan - LO	5.093.438.000,00	4.593.895.000,00	499.543.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau - LO	0,00	1.000,00	(1.000,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH SDA Minyak Bumi - LO	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00
DBH SDA Gas Bumi - LO	56.668.000,00	0,00	56.668.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	2.525.077.000,00	(42.704.000,00)	2.567.781.000,00
DBH SDA Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IIUPH) - LO	0,00	454.820.000,00	(454.820.000,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	133.155.410.000,00	127.412.050.000,00	5.743.360.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	6.347.736.000,00	10.817.689.000,00	(4.469.953.000,00)
DBH-SDA Perikanan - LO	1.154.337.000,00	1.551.238.000,00	(396.901.000,00)
DBH Sawit	6.070.100.000,00	12.986.302.000,00	(6.916.202.000,00)
JUMLAH	183.679.104.100,00	180.237.736.000,00	3.441.368.100,00

Terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Selisih antara Dana Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Dana Bagi Hasil – LO		183.679.104.100,00
Dana Bagi Hasil – LRA		186.190.613.100,00
Selisih LO – LRA		(2.511.509.000,00)
Penjelasan Selisih:		
Pencairan TDF DBH SDA IIUPJ	(2.000,00)	
Pencairan TDF DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	(2.511.506.000,00)	
Pencairan TDF DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	(1.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(2.511.509.000,00)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU Tahun 2025 sebesar Rp644.050.930.713,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.16
Dana Alokasi Umum – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
DAU - LO	502.450.388.684,00	464.843.810.000,00	37.606.578.684,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	33.442.744.029,00	30.553.332.026,00	2.889.412.003,00
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pendidikan - LO	65.241.836.000,00	84.959.849.000,00	(19.718.013.000,00)
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Kesehatan - LO	41.515.962.000,00	51.449.946.000,00	(9.933.984.000,00)
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	0,00	39.067.023.000,00	(39.067.023.000,00)
JUMLAH	644.050.930.713,00	672.273.960.026,00	(28.223.029.313,00)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBD. yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dikategorikan ke dalam Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang realisasinya pada tahun 2025 sebesar Rp213.344.353.683,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.17
Dana Alokasi Khusus – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LO	1.272.725.548,00	974.202.126,00	298.523.422,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LO	0,00	8.650.239.494,00	(8.650.239.494,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LO	212.305.202,00	7.072.209.850,00	(6.859.904.648,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LO	81.290.038.487,00	2.300.000.000,00	78.990.038.487,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LO	0,00	89.346.000,00	(89.346.000,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LO	0,00	6.428.726.500,00	(6.428.726.500,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan - LO	0,00	18.311.945.705,00	(18.311.945.705,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LO	0,00	783.000.000,00	(783.000.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LO	0,00	141.995.063.582,00	(141.995.063.582,00)
DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	30.705.022.412,00	29.579.274.779,00	1.125.747.633,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	1.305.750.000,00	1.125.000.000,00	180.750.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	56.714.246.757,00	49.380.187.000,00	7.334.059.757,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	1.065.220.000,00	2.389.750.000,00	(1.324.530.000,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD - LO	12.849.244.376,00	20.156.536.000,00	(7.307.291.624,00)
DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	0,00	2.088.628.950,00	(2.088.628.950,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan- LO	2.311.430.000,00	1.736.860.000,00	574.570.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LO	8.398.297.759,00	4.032.516.895,00	4.365.780.864,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas - LO	11.441.475.133,00	0,00	11.441.475.133,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	0,00	495.302.068,00	(495.302.068,00)
DAK Non Fisik-BOKB-KB - LO	2.177.821.009,00	3.670.484.800,00	(1.492.663.791,00)
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas- LO	0,00	12.078.491.693,00	(12.078.491.693,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan - LO	478.245.000,00	0,00	478.245.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler - LO	2.697.732.000,00	0,00	2.697.732.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja - LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja - LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian - LO	364.800.000,00	0,00	364.800.000,00
Jumlah	213.344.353.683,00	313.337.765.442,00	(99.993.411.759,00)

5.4.1.2.1.2 Insentif Fiskal

31 Desember 2025

31 Desember 2024

0.00

5.890.545.000,00

Penerimaan Insentif Fiskal – LO tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

48.490.776.259,00

56.732.376.624,00

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2025 sebesar Rp48.490.776.259.00 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.18
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)			
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil - LO	47.692.776.259,00	56.732.376.624,00	(9.039.600.365,00)
Bantuan Keuangan - LO	798.000.000,00	0,00	798.000.000,00
JUMLAH	48.490.776.259,00	56.732.376.624,00	(8.241.600.365,00)

3.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	47.692.776.259,00	56.732.376.624,00

Pendapatan Bagi Hasil – LO merupakan realisasi pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Pendapatan Bagi Hasil – LO

(dalam rupiah)			
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	66.594.589,00	7.786.120.856,00	(7.719.526.267,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	81.754.132,00	14.868.642.320,00	(14.786.888.188,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	37.259.464.209,00	24.063.785.160,00	13.195.679.049,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan - LO	67.133.233,00	151.605.084,00	(84.471.851,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	10.217.830.096,00	9.862.223.204,00	355.606.892,00
JUMLAH	47.692.776.259,00	56.732.376.624,00	(9.039.600.365,00)

Pendapatan Bagi Hasil – LO mengalami penurunan sebesar Rp9.039.600.365,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp56.732.376.624,00.

Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.20
Pendapatan Bagi Hasil – LO

(dalam rupiah)	
Uraian	Nilai
Pendapatan Bagi Hasil – LO	47.692.776.259,00
Pendapatan Bagi Hasil – LRA	45.174.096.839,00
Selisih LO – LRA	2.518.679.420,00
Penjelasan Selisih:	
Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(2.158.440.940,00)
Pelunasan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(2.974.318.968,00)
Pelunasan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(7.236.222.826,00)
Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(36.932.470,00)
Pengakuan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TW 50%III dan TW IV 2025/2026 serta	14.898.889.761,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
penyesuaian dengan PKS dengan Pemprov atas bantuan ke 3 Provinsi		
Pengakuan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TW 50%III dan TW IV 2025/2026 serta penyesuaian dengan PKS dengan Pemprov atas bantuan ke 3 Provinsi	25.704.863,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		2.518.679.420,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.4.1.2.2 Bantuan Keuangan - LO	798.000.000,00	0,00

Bantuan Keuangan – LO merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp798.000.000.00 diperuntukan untuk bantuan khusus damang dan lain-lain.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	22.000.273.437,14	28.803.057.638,86

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah – LO dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.21
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2025

(dalam daerah)			
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah - LO	12.788.456.251,44	21.119.408.328,86	(8.330.952.077,42)
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	9.211.817.185,70	7.683.649.310,00	1.528.167.875,70
Jumlah	22.000.273.437,14	28.803.057.638,86	(6.802.784.201,72)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO pada Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp6.802.784.201,72 dari tahun 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	12.788.456.251,14	21.119.408.328,86

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp12.788.456.251,14 mengalami penurunan sebesar Rp8.330.952.077,42 dibandingkan dengan pendapatan hibah Tahun 2024 sebesar Rp21.119.408.328.86 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.22
Pendapatan Hibah - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	663.000.000,00	0,00	663.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	3.682.129.095,86	(3.682.129.095,86)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	12.125.456.251,14	17.437.279.233,00	(5.311.822.981,56)
Jumlah	12.788.456.251,44	21.119.408.328,86	(8.330.952.077,42)

Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2025 ada mencatat penerimaan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp663.000.000,00. penerimaan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp0.00 dan penerimaan hibah dari badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp12.125.456.251,44.

Tabel 5.4.23
Pendapatan Hibah – LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	482.852.580,00	378.281.230,00	104.571.350,00
3	Dinas Kesehatan	4.647.650,00	3.475.065.095,86	(3.470.417.445,86)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	207.064.000,00	(207.064.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	17.058.998.003,00	(17.058.998.003,00)
6	Dinas Pendidikan	10.487.005.541,44	0,00	10.487.005.541,44
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. serts Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
8	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.001.491.680,00	0,00	1.001.491.680,00
9	Kecamatan Katingan Tengah	177.090.000,00	0,00	177.090.000,00
10	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	395.368.800,00	0,00	395.368.800,00
Jumlah		12.788.456.251,44	21.119.408.328,86	(8.330.952.077,42)

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA. 2024 sebesar Rp8.330.952.077,42. Penyebab selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA tahun 2025 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Pendapatan Hibah – LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Pendapatan Hibah – LO	12.788.456.251,44
Pendapatan Hibah – LRA	482.852.580,00
Selisih LO – LRA	12.305.603.671,44
Penjelasan Selisih:	
Terdapat Pendapatan Hibah Barang Berbentuk Barang pada Perangkat Daerah :	
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	395.368.800,00
Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.001.491.680,00
Kecamatan Katingan Tengah	177.090.000,00
Dinas Kesehatan	4.647.650,00
Dinas Pendidikan	10.487.005.541,11



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	240.000.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		12.305.603.671,44

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

31 Desember 2025

9.211.817.185,70

31 Desember 2024

7.683.649.310,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan – LO Tahun 2025 sebesar Rp9.211.817.185,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.528.167.875,70 dibandingkan dengan pendapatan hibah Tahun 2024 sebesar Rp7.683.649.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.25
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan - LO
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LO	8.886.917.851,00	7.683.649.310,00	1.203.268.541,00
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	324.899.334,70	0,00	324.899.334,70
Jumlah	9.211.817.185,70	7.683.649.310,00	1.528.167.875,70

Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2025 ada mencatat penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan atas pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LO sebesar Rp8.886.917.851,0 dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO sebesar Rp324.899.334,70.

Tabel 5.4.26
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan Berdasarkan SKPD
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2025
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I	489.034.018,00
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II	453.076.211,00
UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai	345.681.896,00
UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango	382.010.651,00
UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang	312.155.925,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan	652.975.075,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II	584.476.240,00
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng Pangi	825.331.596,00
UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara	534.640.089,00
UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali	433.534.509,00
UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba	1.112.200.681,00
UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman	590.795.007,00
UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran	293.312.612,00
UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi	193.768.568,00
UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang	446.613.690,00
UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei	207.179.564,00
RSUD Pratama Tumbang Samba	1.030.131.519,00
Kontribusi dari Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	324.899.334,70
Total	9.211.817.185,70



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.2 Beban

31 Desember 2025

31 Desember 2024

1.170.115.174.274,10

1.244.534.278.291,03

Beban merupakan beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp1.170.115.174.274,10 dan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.244.534.278.291,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.27

Beban

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Operasi	877.002.963.906,56	943.706.300.892,21	(66.703.336.985,65)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	201.101.059.202,14	191.625.025.498,52	9.476.033.703,62
Beban Transfer	91.719.208.365,40	107.597.541.937,30	(15.878.333.571,90)
Beban Tidak Terduga	291.942.800,00	1.605.409.963,00	(1.313.467.163,00)
Jumlah	1.170.115.174.274,10	1.244.534.278.291,03	(74.419.104.016,93)

Tabel 5.4.28

Beban Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	254.175.399.674,42	337.468.436.635,60	(83.293.036.961,18)
2	Dinas Kesehatan	241.161.309.317,89	236.382.209.560,38	4.779.099.757,51
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.614.034.746,11	98.452.590.930,75	6.944.456.319,36
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	23.522.661.469,74	27.566.682.782,01	(4.044.021.312,27)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.223.079.892,47	24.051.384.300,60	(1.828.304.408,13)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.765.767.552,59	9.210.637.626,06	(1.444.870.073,47)
7	Dinas Sosial	6.785.674.084,04	7.350.452.713,24	(564.778.629,20)
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.665.943.243,46	14.886.250.620,36	(1.220.307.376,90)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.688.274.855,45	11.923.604.614,79	(1.235.329.759,34)
10	Dinas Lingkungan Hidup	17.085.533.618,47	16.963.540.987,25	121.992.631,22
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.556.396.680,83	6.335.248.769,01	(778.852.088,18)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.529.356.330,48	7.421.624.392,09	(892.268.061,61)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	15.928.506.468,86	14.479.950.884,15	1.448.555.584,71
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	10.388.179.767,23	11.910.060.170,81	(1.521.880.403,58)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.332.859.516,95	7.634.525.775,16	(301.666.258,21)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.553.312.983,55	7.877.685.803,84	(1.324.372.820,29)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	16.017.872.884,98	12.989.115.001,22	3.028.757.883,76
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.584.558.038,74	15.373.432.857,41	(1.788.874.818,67)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
19	Sekretariat Daerah	55.466.274.513,89	59.145.374.518,29	(3.679.100.004,40)
20	Inspektorat	12.674.601.528,49	11.867.916.249,04	806.685.279,45
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.709.531.508,65	10.688.979.519,01	(2.979.448.010,36)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	194.616.001.488,35	145.300.697.258,28	49.315.304.230,07
23	Badan Pendapatan Daerah	15.309.368.980,35	11.462.842.149,41	3.846.526.830,94
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.745.857.638,32	9.718.264.807,40	(2.972.407.169,08)
25	Sekretariat DPRD	43.490.365.284,02	46.461.712.458,08	(2.971.347.174,06)
26	Kecamatan Katingan Kuala	3.881.051.969,42	4.140.016.841,38	(258.964.871,96)
27	Kecamatan Mendawai	2.664.955.232,67	2.738.728.795,68	(73.773.563,01)
28	Kecamatan Kamipang	2.996.084.580,47	3.521.218.005,37	(525.133.424,90)
29	Kecamatan Tasik Payawan	2.844.425.266,30	3.075.916.451,27	(231.491.184,97)
30	Kecamatan Katingan Hilir	5.381.164.323,06	6.191.485.557,24	(810.321.234,18)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3.998.322.551,27	4.553.519.415,01	(555.196.863,74)
32	Kecamatan Pulau Malan	3.356.223.450,77	3.545.002.459,76	(188.779.008,99)
33	Kecamatan Katingan Tengah	4.374.658.997,25	4.869.097.039,41	(494.438.042,16)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	2.992.388.601,30	3.174.078.015,28	(181.689.413,98)
35	Kecamatan Marikit	2.706.380.686,42	2.654.091.535,00	52.289.151,42
36	Kecamatan Katingan Hulu	3.373.716.129,47	4.078.460.596,48	(704.744.467,01)
37	Kecamatan Petak Malai	1.977.561.942,50	2.452.948.285,22	(475.386.342,72)
38	Kecamatan Bukit Raya	1.960.750.264,17	2.462.821.908,91	(502.071.644,74)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.016.768.210,70	34.153.672.000,78	(26.136.903.790,08)
	Jumlah	1.170.115.174.274,10	1.244.534.278.291,03	(74.419.104.016,93)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.4.2.1 Beban Operasi	877.002.963.906,56	943.706.300.892,21

Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial dan Beban Penyisihan Piutang. Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp877.002.963.906,56 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp943.706.300.892,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.29
Beban Operasi – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pegawai	526.478.939.222,30	506.026.335.266,22	20.452.603.956,08
Beban Barang	69.201.664.797,53	92.660.992.310,38	(23.459.327.512,85)
Beban Jasa	103.144.742.171,36	129.817.088.548,20	(26.672.346.376,84)
Beban Pemeliharaan	14.309.736.579,93	21.604.124.775,46	(7.294.388.195,53)
Beban Perjalanan Dinas	64.765.990.399,00	104.648.189.326,00	(39.882.198.927,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.486.190.259,00	2.857.820.219,00	628.370.040,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	27.381.313.770,48	0,00	27.381.313.770,48
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.829.911.711,00	108.395.818,00	12.721.515.893,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	14.294.805.250,67	2.366.327.363,10	11.928.477.887,57
Beban Subsidi	1.093.601.700,00	2.536.412.800,00	(1.442.811.100,00)
Beban Hibah	29.829.178.078,10	78.042.667.295,06	(48.213.489.216,96)
Beban Bantuan Sosial	1.758.229.458,00	2.440.000.000,00	(681.770.542,00)
Beban Penyisihan Piutang	8.428.660.509,19	597.947.170,79	7.830.713.338,40
Jumlah	877.002.963.906,56	943.706.300.892,21	(66.703.336.985,65)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.30
Beban Operasi Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	234.911.053.852,45	317.686.271.834,36	(82.775.217.981,91)
2	Dinas Kesehatan	202.042.725.279,58	200.746.887.156,66	1.295.838.122,92
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.229.676.326,22	17.035.365.337,04	1.194.310.989,18
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	8.098.430.591,06	11.960.357.715,17	(3.861.927.124,11)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	19.706.365.377,00	21.529.930.860,00	(1.823.565.483,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.199.965.381,00	7.105.042.983,00	(905.077.602,00)
7	Dinas Sosial	6.329.778.317,00	6.905.650.026,00	(575.871.709,00)
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.465.966.174,00	9.710.723.962,00	(1.244.757.788,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.224.089.212,00	11.340.222.282,00	(1.116.133.070,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.022.789.647,00	14.355.215.793,00	(332.426.146,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.029.563.350,00	6.057.742.233,00	(1.028.178.883,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.190.781.340,00	7.119.536.399,00	(928.755.059,00)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	13.028.667.271,00	11.649.538.314,00	1.379.128.957,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.884.687.548,00	11.394.633.654,00	(1.509.946.106,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	6.244.659.501,00	6.562.749.589,00	(318.090.088,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.434.628.790,00	6.956.875.454,00	(1.522.246.664,00)
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	14.428.344.526,00	11.366.923.096,00	3.061.421.430,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.504.568.991,00	14.105.966.082,00	(1.601.397.091,00)
19	Sekretariat Daerah	51.215.235.397,20	54.956.798.873,35	(3.741.563.476,15)
20	Inspektorat	11.943.894.900,00	11.330.637.618,00	613.257.282,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.794.845.932,00	9.912.245.231,00	(3.117.399.299,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	97.667.527.186,43	31.594.826.254,02	66.072.700.932,41
23	Badan Pendapatan Daerah	14.008.247.480,62	10.198.066.296,61	3.810.181.184,01
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.693.853.915,00	8.880.660.294,00	(3.186.806.379,00)
25	Sekretariat DPRD	41.791.225.682,00	44.696.523.256,00	(2.905.297.574,00)
26	Kecamatan Katingan Kuala	3.422.330.697,00	3.732.500.469,00	(310.169.772,00)
27	Kecamatan Mendawai	2.572.058.755,00	2.662.733.318,00	(90.674.563,00)
28	Kecamatan Kamipang	2.783.923.175,00	3.328.791.836,00	(544.868.661,00)
29	Kecamatan Tasik Payawan	2.784.922.447,00	3.016.583.627,00	(231.661.180,00)
30	Kecamatan Katingan Hilir	4.844.623.625,00	5.731.399.330,00	(886.775.705,00)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3.563.503.573,00	4.161.824.868,00	(598.321.295,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	3.252.565.336,00	3.453.569.345,00	(201.004.009,00)
33	Kecamatan Katingan Tengah	4.046.659.674,00	4.542.786.181,00	(496.126.507,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	2.685.309.211,00	3.025.689.171,00	(340.379.960,00)
35	Kecamatan Marikit	2.499.319.801,00	2.577.924.321,00	(78.604.520,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
36	Kecamatan Katingan Hulu	3.020.991.973,00	3.741.181.364,00	(720.189.391,00)
37	Kecamatan Petak Malai	1.847.614.220,00	2.307.292.777,00	(459.678.557,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	1.856.933.914,00	2.372.540.273,00	(515.606.359,00)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.730.635.538,00	33.892.093.419,00	(26.161.457.881,00)
Jumlah		877.002.963.906,56	943.706.300.892,21	(66.703.336.985,65)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2025

31 Desember 2024

526.478.939.222,30

506.026.335.266,22

Beban Pegawai – LO merupakan bagian dari realisasi Beban dalam TA 2025. beban pegawai pada TA 2025 sebesar Rp526.478.939.222,30 mengalami kenaikan sebesar Rp20.452.603.956,08 dibandingkan dengan realisasi beban pegawai pada TA 2024 yakni sebesar Rp 506.026.335.266,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.31
Beban Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	341.718.458.119,36	304.228.869.824,00	37.611.531.709,36
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	90.725.364.436,00	105.190.234.411,00	(14.448.773.820,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.628.711.133,00	74.446.577.157,00	(3.817.866.024,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.127.722.414,00	11.841.294.027,00	286.428.387,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	137.438.503,00	0,00	137.438.503,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	601.600.000,00	530.200.000,00	71.400.000,00
Beban Belanja Pegawai BLUD	10.539.644.616,94	9.789.159.847,22	750.484.769,72
Jumlah	526.478.939.222,30	506.026.335.266,22	20.452.603.956,08

Tabel 5.4.32
Beban Pegawai Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	192.132.113.534,00	263.389.872.132,00	(71.257.758.598,00)
2	Dinas Kesehatan	104.921.334.170,94	96.521.733.642,22	8.399.600.528,72
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.371.119.933,00	4.821.626.899,00	549.493.034,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	3.546.448.205,00	3.084.039.816,00	462.408.389,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.668.873.392,00	5.096.966.493,00	5.571.906.899,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.118.631.063,00	2.604.071.870,00	514.559.193,00
7	Dinas Sosial	2.740.850.745,00	2.568.956.958,00	171.893.787,00
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.473.220.843,00	3.329.881.135,00	143.339.708,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.695.138.837,00	4.664.331.702,00	30.807.135,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.642.292.003,00	3.897.250.071,00	1.745.041.932,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.043.111.171,00	2.587.293.664,00	455.817.507,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.137.980.012,00	3.171.573.666,00	(33.593.654,00)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	4.634.522.923,00	3.556.686.334,00	1.077.836.589,00
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	4.152.205.096,00	3.937.926.709,00	214.278.387,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.245.966.091,00	3.012.499.067,00	233.467.024,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.144.223.578,00	2.923.686.534,00	220.537.044,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.550.997.577,00	3.099.860.996,00	451.136.581,00
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.075.647.676,00	7.548.340.594,00	527.307.082,00
19	Sekretariat Daerah	14.490.270.275,00	13.718.508.759,00	771.761.516,00
20	Inspektorat Daerah	5.580.657.942,00	5.864.079.893,00	(283.421.951,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.599.255.636,00	3.727.816.545,00	(128.560.909,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	82.752.349.067,36	13.844.721.783,00	68.907.627.284,36
23	Badan Pendapatan Daerah	4.307.656.942,00	3.774.292.541,00	533.364.401,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.853.693.635,00	2.791.916.122,00	61.777.513,00
25	Sekretariat DPRD	16.013.707.356,00	14.934.136.864,00	1.079.570.492,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	2.189.290.697,00	2.190.925.469,00	(1.634.772,00)
27	Kecamatan Mendawai	1.644.872.755,00	1.543.115.768,00	101.756.987,00
28	Kecamatan Kamipang	1.989.055.675,00	1.835.680.456,00	153.375.219,00
29	Kecamatan Tasik Payawan	2.003.547.815,00	1.949.244.314,00	54.303.501,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	3.136.572.363,00	3.261.608.925,00	(125.036.562,00)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.669.803.135,00	2.905.361.688,00	(235.558.553,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	2.319.842.836,00	2.417.284.776,00	(97.441.940,00)
33	Kecamatan Katingan Tengah	2.554.292.239,00	2.589.652.127,00	(35.359.888,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.664.030.881,00	1.706.278.137,00	(42.247.256,00)
35	Kecamatan Marikit	1.442.505.763,00	1.374.154.048,00	68.351.715,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	2.010.168.471,00	2.099.890.836,00	(89.722.365,00)
37	Kecamatan Petak Malai	827.878.570,00	765.038.262,00	62.840.308,00
38	Kecamatan Bukit Raya	838.711.214,00	949.143.973,00	(110.432.759,00)
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.296.099.105,00	1.966.885.698,00	329.213.407,00
Jumlah		526.478.939.222,30	506.026.335.266,22	20.452.603.956,08

Terdapat selisih antara Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.33
Selisih antara Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Beban Pegawai – LO	526.478.939.222,30
Belanja Pegawai – LRA	526.896.314.427,53
Selisih LO – LRA	(417.375.205,23)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025	5.684.388.120,99
Pelunasan Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025	(6.101.763.326,22)
Jumlah Penjelasan Selisih	(417.375.205,23)

5.4.2.1.2 Beban Barang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

69.201.664.797,53

92.660.992.310,38

Realisasi Beban Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp69.201.664.797,53 mengalami penurunan sebesar Rp23.459.327.512,85 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp92.660.992.310,38.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.34
Beban Barang
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	69.201.664.797,53	92.660.992.310,38	(23.459.327.512,85)
Jumlah		69.201.664.797,53	92.660.992.310,38	(23.459.327.512,85)

Tabel 5.4.35
Beban Barang Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	3.436.654.236,66	5.219.474.323,00	(1.782.820.086,34)
2	Dinas Kesehatan	16.085.531.025,45	33.876.695.788,21	(17.791.164.762,76)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.800.962.038,72	2.650.663.723,00	4.150.298.315,72
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	569.727.307,00	1.411.136.632,82	(841.409.325,82)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.129.919.581,00	1.043.402.007,00	86.517.574,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	676.073.690,00	1.114.556.550,00	(438.482.860,00)
7	Dinas Sosial	1.157.655.114,00	1.023.159.011,00	134.496.103,00
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	746.226.866,00	1.241.406.780,00	(495.179.914,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.087.177.000,00	1.576.408.757,00	(489.231.757,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.531.498.975,00	2.922.891.769,00	608.607.206,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	938.387.051,00	1.463.303.844,00	(524.916.793,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.041.524.446,00	1.039.699.975,00	1.824.471,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2.134.436.756,00	4.568.323.112,00	(2.433.886.356,00)
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	926.390.007,00	986.661.012,00	(60.271.005,00)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	411.367.410,00	319.111.072,00	92.256.338,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	734.979.712,00	1.136.150.967,00	(401.171.255,00)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga	1.460.398.369,00	1.146.798.128,00	313.600.241,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	894.040.372,00	2.912.836.963,00	(2.018.796.591,00)
19	Sekretariat Daerah	8.760.819.430,20	7.992.864.129,35	767.450.039,85
20	Inspektorat Daerah	574.895.241,00	591.222.700,00	(16.327.459,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	837.151.584,00	1.304.573.416,00	(467.421.832,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.220.087.238,50	2.272.926.684,00	(52.334.184,50)
23	Badan Pendapatan Daerah	1.364.479.778,00	1.613.536.947,00	(249.057.169,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	959.934.514,00	1.584.534.023,00	(624.599.509,00)
25	Sekretariat DPRD	3.907.355.050,00	4.515.059.551,00	(607.704.501,00)
26	Kecamatan Katingan Kuala	613.687.500,00	456.976.260,00	156.711.240,00
27	Kecamatan Mendawai	318.477.900,00	292.901.850,00	25.576.050,00
28	Kecamatan Kamipang	328.382.700,00	474.197.838,00	(145.815.138,00)
29	Kecamatan Tasik Payawan	251.386.000,00	305.725.400,00	(54.339.400,00)
30	Kecamatan Katingan Hilir	1.072.403.272,00	1.248.630.136,00	(176.226.864,00)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	341.397.800,00	328.429.900,00	12.967.900,00
32	Kecamatan Pulau Malan	437.873.000,00	321.272.400,00	116.600.600,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	668.635.598,00	670.924.750,00	(289.152,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	384.870.568,00	438.731.842,00	(53.861.274,00)
35	Kecamatan Marikit	398.383.100,00	335.071.894,00	63.311.206,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	388.993.125,00	501.271.625,00	(112.278.500,00)
37	Kecamatan Petak Malai	454.733.950,00	554.762.862,00	(100.028.912,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	328.384.000,00	323.227.000,00	5.157.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	826.383.492,00	881.470.689,00	(55.087.197,00)
Jumlah		69.201.664.797,53	92.660.992.310,38	(23.459.327.512,85)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Terdapat selisih antara Beban Barang dan Belanja Barang LRA sebesar Rp1.701.175.507,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.36
selisih antara Beban Barang dan Belanja Barang LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Beban Barang – LO	69.201.664.797,53
Belanja Barang – LRA	67.500.489.290,15
Selisih LO – LRA	1.701.175.507,38
Penjelasan Selisih:	
Beban Bahan-Bahan Kimia Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.466.850,00
Beban Bahan-Bahan Kimia Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.231.597,50)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.119.650,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah	(18.236.134,50)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.651.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Badan Keuangan dan Aset Daerah	(51.444.171,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.024.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Badan Keuangan dan Aset Daerah	(15.365.271,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.505.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Badan Keuangan dan Aset Daerah	(11.769.663,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah	68.176.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah	(39.781.512,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Badan Keuangan dan Aset Daerah	(13.553.044,50)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Badan Keuangan dan Aset Daerah	(80.530.500,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Badan Pendapatan Daerah	274.564.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Badan Pendapatan Daerah	(88.364.000,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia BLUD RSUD Mas Amsyar	153.110.173,74
Beban Bahan-Bahan Kimia BLUD RSUD Mas Amsyar	(84.542.040,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas BLUD RSUD Mas Amsyar	20.579.400,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas BLUD RSUD Mas Amsyar	(59.140.800,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD RSUD Mas Amsyar	(1.426.000,00)
Beban Obat-Obatan-Obat BLUD RSUD Mas Amsyar	1.181.848.134,54
Beban Obat-Obatan-Obat BLUD RSUD Mas Amsyar	(1.167.293.920,33)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya BLUD RSUD Mas Amsyar	2.369.345.468,37
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya BLUD RSUD Mas Amsyar	(2.317.667.400,21)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	11.597.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(5.273.600,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia Dinas Kesehatan	8.832.350,00
Beban Bahan-Bahan Kimia Dinas Kesehatan	(5.613.242,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan	(2.537.400,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Dinas Kesehatan	(1.619.050,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Dinas Kesehatan	(671.000,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Dinas Kesehatan	190.500,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas. Dinas Kesehatan	2.000.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas. Dinas Kesehatan	(2.000.000,00)	
Beban Obat-Obatan-Obat Dinas Kesehatan	2.620.396.886,02	
Beban Obat-Obatan-Obat Dinas Kesehatan	(3.337.531.557,81)	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Dinas Kesehatan	3.871.744.500,78	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Dinas Kesehatan	(5.070.988.087,71)	
Beban Natura dan Pakan-Natura Dinas Kesehatan	14.415.500,00	
Beban Natura dan Pakan-Natura Dinas Kesehatan	(238.500.609,92)	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Dinas Kesehatan	2.742.000,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	118.200.000,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(195.850.000,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(31.000.000,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(40.284.000,00)	
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(320.729.458,00)	
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.813.653,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.013.898.537,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.494.007.878,62)	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.600.000,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(32.532.196,16)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.756.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Dinas Pendidikan	840.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal Dinas Pendidikan	450.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Dinas Pendidikan	1.000.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Dinas Pendidikan	9.870.290,03	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Dinas Pendidikan	46.733.148,17	
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Dinas Pendidikan	200.000,46	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Dinas Pendidikan	1.873.000,00	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Dinas Pendidikan	500.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan Dinas Pendidikan	20.371.755,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya Dinas Pendidikan	4.178.000,00	
Beban Bahan-Bahan Kimia Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(5.280.000,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	299.244.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(392.944.000,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Disperkintan	93.700.000,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	16.242.258.147,94	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(28.773.642.545,94)	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	12.531.384.398,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Sosial	(24.009.500,00)	
Beban Natura dan Pakan-Natura Dinas Sosial	(24.257.190,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah	157.732.558,20	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah	(39.632.400,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sekretariat Daerah	164.939.094,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sekretariat Daerah	(73.304.400,00)	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sekretariat Daerah	42.500.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sekretariat Daerah	103.014.524,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sekretariat Daerah	(77.014.020,00)	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(19.425.000,00)	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20.247.988,20	
Beban Obat-Obatan-Obat	14.725.340,13	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.827.450,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		1.701.175.507,38

5.4.2.1.3 Beban Jasa

31 Desember 2025

31 Desember 2024

103.144.742.171,36

129.817.088.548,20

Realisasi Beban Jasa TA 2025 sebesar Rp103.144.742.171,36 mengalami penurunan sebesar Rp26.672.346.376,84 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp129.817.088.548,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.37
Beban Jasa - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	65.454.551.245,00	90.146.079.054,00	(24.691.527.809,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	26.959.003.180,52	26.982.540.980,83	(23.537.800,31)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.599.647.078,50	2.417.038.129,00	1.182.608.949,50
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.535.586.920,00	2.014.374.710,00	(478.787.790,00)
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	126.950.000,00	62.950.000,00	64.000.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.128.637.064,27	388.661.907,37	739.975.156,90
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.115.129.650,00	379.750.000,00	735.379.650,00
8	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.225.237.033,07	7.350.697.767,00	(4.125.460.733,93)
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	74.996.000,00	(74.996.000,00)
Jumlah		103.144.742.171,36	129.817.088.548,20	(26.672.346.376,84)

Tabel 5.4. 38
Beban Jasa berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	3.849.337.802,34	7.750.854.624,36	(3.901.516.822,02)
2	Dinas Kesehatan	39.885.574.970,52	41.665.535.223,95	(1.779.960.253,43)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.259.821.349,50	2.729.407.216,00	530.414.133,50
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	1.354.774.961,00	3.898.460.604,01	(2.543.685.643,01)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.006.437.021,00	11.677.217.768,00	(5.670.780.747,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.561.443.932,00	1.733.767.564,00	(172.323.632,00)
7	Dinas Sosial	588.540.762,00	813.567.842,00	(225.027.080,00)
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.185.036.135,00	2.969.787.025,00	(784.750.890,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.634.642.783,00	2.730.931.644,00	(96.288.861,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.764.878.077,00	5.100.560.854,00	(2.335.682.777,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	549.897.212,00	981.422.409,00	(431.525.197,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	780.033.848,00	1.139.885.022,00	(359.851.174,00)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	3.063.395.290,00	1.812.144.568,00	1.251.250.722,00
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan	3.913.845.156,00	3.783.007.650,00	130.837.506,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Persandian			
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	702.286.978,00	847.127.300,00	(144.840.322,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.843.781,00	1.229.321.594,00	(748.477.813,00)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.935.433.321,00	2.191.905.423,00	(256.472.102,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.473.230.201,00	1.713.018.396,00	(239.788.195,00)
19	Sekretariat Daerah	8.107.789.139,00	8.160.503.779,00	(52.714.640,00)
20	Inspektorat Daerah	733.748.234,00	886.795.078,00	(153.046.844,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	1.355.650.487,00	2.050.066.346,00	(694.415.859,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.610.529.389,00	8.231.636.605,88	(3.621.107.216,88)
23	Badan Pendapatan Daerah	960.658.020,00	1.857.592.149,00	(896.934.129,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	814.887.000,00	1.728.133.272,00	(913.246.272,00)
25	Sekretariat DPRD	5.725.042.768,00	6.517.745.056,00	(792.702.288,00)
26	Kecamatan Katingan Kuala	196.293.500,00	364.779.500,00	(168.486.000,00)
27	Kecamatan Mendawai	310.032.100,00	372.579.390,00	(62.547.290,00)
28	Kecamatan Kamipang	250.181.800,00	428.295.400,00	(178.113.600,00)
29	Kecamatan Tasik Payawan	279.462.932,00	322.675.903,00	(43.212.971,00)
30	Kecamatan Katingan Hilir	306.790.372,00	648.161.709,00	(341.371.337,00)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	201.497.311,00	361.502.312,00	(160.005.001,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	266.814.500,00	324.170.269,00	(57.355.769,00)
33	Kecamatan Katingan Tengah	440.326.637,00	578.988.604,00	(138.661.967,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	284.536.162,00	353.653.292,00	(69.117.130,00)
35	Kecamatan Marikit	301.943.718,00	323.997.550,00	(22.053.832,00)
36	Kecamatan Katingan Hulu	137.504.877,00	190.288.124,00	(52.783.247,00)
37	Kecamatan Petak Malai	157.200.000,00	250.100.050,00	(92.900.050,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	161.130.000,00	294.760.000,00	(133.630.000,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	553.269.645,00	802.741.432,00	(249.471.787,00)
Jumlah		103.144.742.171,36	129.817.088.548,20	(26.672.346.376,84)

Terdapat selisih antara Beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA sebesar Rp5.003.869.554,73 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. 39
Selisih antara Beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Beban Jasa – LO		103.144.742.171,36
Belanja Jasa – LRA		108.148.611.726,09
Selisih LO – LRA		(5.003.869.554,73)
Penjelasan Selisih:		
Kapitalisasi Barang Bukan Pengadaan Bangunan pada Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(49.600.000,00)	
Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(99.721.290,00)	
Utang / kewajiban Pembayaran terakhir pekerjaan 100% dari nilai kontrak lumsom atas pekerjaan konsultan penyusunan RP2KPKPK PT.KINARYA ALAM RAYA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.722.000,00	
Kapitalisasi Beban menjadi Aset Tetap pada Dinas Kesehatan	(2.802.948.450,00)	
Penambahan Sumber BOS Sekolah pada Dinas Pendidikan	(448.773.909,97)	
Penambahan Sumber Barang Jasa pada Dinas Pendidikan	(1.208.644.039,67)	
Penambahan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan	(617.541.960,33)	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	602.168.723,79	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	38.287.085,72	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	198.792.047,63	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(9.972.800,00)	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(606.406.761,88)	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(38.287.085,72)	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(31.626.552,38)	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(176.316.561,92)	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(300.000,00)	
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(5.003.869.554,73)

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2025 31 Desember 2024

14.309.736.579,93 21.604.124.775,46

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp14.309.736.579,93 mengalami penurunan sebesar Rp7.294.388.195,53 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.604.124.775,46 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Pemeliharaan - LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	965.260.617,93	1.748.592.078,56	(783.331.460,63)
2	Dinas Kesehatan	1.795.713.218,00	4.636.098.828,00	(2.840.385.610,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	763.123.613,00	1.830.772.131,90	(1.067.648.518,90)
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	228.816.000,00	299.320.000,00	(70.504.000,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	629.708.374,00	379.408.998,00	250.299.376,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	157.710.000,00	309.778.000,00	(152.068.000,00)
7	Dinas Sosial	239.343.000,00	221.791.100,00	17.551.900,00
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	147.285.988,00	258.896.823,00	(111.610.835,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	289.136.100,00	238.359.768,00	50.776.332,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.037.436.604,00	523.787.350,00	513.649.254,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162.841.201,00	140.020.000,00	22.821.201,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	172.520.000,00	127.533.568,00	44.986.432,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	313.669.913,00	493.017.001,00	(179.347.088,00)
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	202.162.014,00	244.695.255,00	(42.533.241,00)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	70.319.950,00	95.831.000,00	(25.511.050,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.262.878,00	379.920.470,00	(10.657.592,00)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	117.531.982,00	196.269.175,00	(78.737.193,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	127.043.733,00	132.316.851,00	(5.273.118,00)
19	Sekretariat Daerah	2.256.125.239,00	3.083.587.200,00	(827.461.961,00)
20	Inspektorat Daerah	836.590.797,00	472.892.118,00	363.698.679,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	163.682.476,00	467.820.468,00	(304.137.992,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	579.965.196,00	874.937.700,00	(294.972.504,00)
23	Badan Pendapatan Daerah	489.268.130,00	607.100.600,00	(117.832.470,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.209.000,00	596.525.100,00	(511.316.100,00)
25	Sekretariat DPRD	852.615.880,00	1.448.377.100,00	(595.761.220,00)
26	Kecamatan Katingan Kuala	139.945.000,00	65.150.000,00	74.795.000,00
27	Kecamatan Mendawai	110.785.000,00	130.460.000,00	(19.675.000,00)
28	Kecamatan Kamipang	33.390.000,00	169.059.700,00	(135.669.700,00)
29	Kecamatan Tasik Payawan	66.192.900,00	76.948.900,00	(10.756.000,00)
30	Kecamatan Katingan Hilir	105.282.450,00	90.387.000,00	14.895.450,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	116.005.000,00	151.893.818,00	(35.888.818,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	91.175.000,00	56.017.000,00	35.158.000,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	63.065.000,00	153.510.000,00	(90.445.000,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	37.638.000,00	72.690.000,00	(35.052.000,00)
35	Kecamatan Marikit	34.151.000,00	97.050.000,00	(62.899.000,00)
36	Kecamatan Katingan Hulu	143.810.500,00	191.919.500,00	(48.109.000,00)
37	Kecamatan Petak Malai	90.835.000,00	211.406.500,00	(120.571.500,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	103.955.000,00	142.325.000,00	(38.370.000,00)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	121.164.826,00	187.658.674,00	(66.493.848,00)
Jumlah		14.309.736.579,93	21.604.124.775,46	(7.294.388.195,53)

Terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp1.483.073.871,07 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.41
Selisih antara Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
Beban Pemeliharaan – LO		14.309.736.579,93
Belanja Pemeliharaan – LRA		15.792.810.451,00
Selisih LO – LRA		(1.483.073.871,07)
Penjelasan Selisih:		
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.458.760,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.434.200,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(3.470.290,03)	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	900.207.353,96	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.138.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(938.000,00)	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.478.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10.400.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.115.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	940.734,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	70.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	10.471.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.500.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	450.000,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	260.730.000,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.247.390.568,00)	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(748.646.527,00)	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(49.947.000,00)	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(179.650.000,00)	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(132.336.034,00)	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(96.288.500,00)	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	(196.600.000,00)	
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(93.700.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(1.483.073.871,07)

5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		64.765.990.399,00	104.648.189.326,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp64.765.990.399,00 mengalami penurunan sebesar Rp39.882.198.927,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp104.648.189.326,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Perjalanan Dinas - LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	3.903.023.058,00	9.726.327.542,00	(5.823.304.484,00)
2	Dinas Kesehatan	11.716.354.933,00	21.043.150.861,00	(9.326.795.928,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.034.649.392,00	4.351.895.241,00	(2.317.245.849,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	851.051.958,00	1.876.408.429,00	(1.025.356.471,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.271.427.009,00	3.332.935.594,00	(2.061.508.585,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	686.106.696,00	1.342.868.999,00	(656.762.303,00)
7	Dinas Sosial	1.165.888.696,00	1.698.175.115,00	(532.286.419,00)
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.244.683.877,00	1.910.752.199,00	(666.068.322,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.189.994.492,00	1.946.583.949,00	(756.589.457,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	998.953.988,00	1.870.210.749,00	(871.256.761,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	335.326.715,00	885.702.316,00	(550.375.601,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	978.323.034,00	1.500.654.168,00	(522.331.134,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	844.702.349,00	1.219.367.299,00	(374.664.950,00)
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	690.085.275,00	1.896.777.548,00	(1.206.692.273,00)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.038.525.824,00	1.036.431.150,00	2.094.674,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	705.318.841,00	1.287.795.889,00	(582.477.048,00)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	855.278.844,00	724.374.702,00	130.904.142,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	869.484.251,00	1.799.453.278,00	(929.969.027,00)
19	Sekretariat Daerah	5.977.275.216,00	7.835.641.787,00	(1.858.366.571,00)
20	Inspektorat Daerah	4.218.002.686,00	3.515.647.829,00	702.354.857,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	839.105.749,00	2.361.968.456,00	(1.522.862.707,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.488.123.492,00	2.493.849.574,00	(1.005.726.082,00)
23	Badan Pendapatan Daerah	893.749.445,00	1.712.369.641,00	(818.620.196,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	786.129.766,00	2.179.551.777,00	(1.393.422.011,00)
25	Sekretariat DPRD	15.292.504.628,00	17.281.204.685,00	(1.988.700.057,00)
26	Kecamatan Katingan Kuala	283.114.000,00	654.669.240,00	(371.555.240,00)
27	Kecamatan Mendawai	187.891.000,00	323.676.310,00	(135.785.310,00)
28	Kecamatan Kamipang	182.913.000,00	415.558.442,00	(232.645.442,00)
29	Kecamatan Tasik Payawan	184.332.800,00	361.989.110,00	(177.656.310,00)
30	Kecamatan Katingan Hilir	223.575.168,00	465.611.560,00	(242.036.392,00)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	232.300.327,00	414.637.150,00	(182.336.823,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	136.860.000,00	334.824.900,00	(197.964.900,00)
33	Kecamatan Katingan Tengah	320.340.200,00	549.710.700,00	(229.370.500,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	314.233.600,00	454.335.900,00	(140.102.300,00)
35	Kecamatan Marikit	301.736.220,00	447.650.829,00	(145.914.609,00)
36	Kecamatan Katingan Hulu	340.515.000,00	757.811.279,00	(417.296.279,00)
37	Kecamatan Petak Malai	316.966.700,00	525.985.103,00	(209.018.403,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	424.753.700,00	663.084.300,00	(238.330.600,00)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	442.388.470,00	1.448.545.726,00	(1.006.157.256,00)
Jumlah		64.765.990.399,00	104.648.189.326,00	(39.882.198.927,00)

5.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat

31 Desember 2025

3.486.190.259,00

31 Desember 2024

2.857.820.219,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp3.486.190.259,00 mengalami kenaikan sebesar Rp628.370.040,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.857.820.219,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.43
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	343.330.000,00	462.485.000,00	(119.155.000,00)
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.776.750.000,00	1.585.500.000,00	191.250.000,00
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	804.000.000,00	552.000.000,00	252.000.000,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	180.000.000,00	114.000.000,00	66.000.000,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	382.110.259,00	143.835.219,00	238.275.040,00
Jumlah		3.486.190.259,00	2.857.820.219,00	628.370.040,00

Tabel 5.4.44
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	113.000.000,00	70.500.000,00	42.500.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.400.000,00	140.190.000,00	(59.790.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	47.730.000,00	40.515.000,00	7.215.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.760.750.000,00	2.251.500.000,00	509.250.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00
7	Dinas Pendidikan	68.100.000,00	161.780.000,00	(93.680.000,00)
8	Dinas Kesehatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
9	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)
10	Sekretariat Daerah	107.610.259,00	93.835.219,00	13.775.040,00
11	Kecamatan Katingan Hilir	0,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)
12	Kecamatan Kamipang	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
13	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14	Kecamatan Marikit	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
Jumlah		3.486.190.259,00	2.857.820.219,00	628.370.040,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.2.1.7	Beban Barang dan Jasa BOSP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		27.381.313.770,48	0,00

Beban Barang dan Jasa BOSP

Tahun 2025 sebesar Rp27.381.313.770,48 mengalami kenaikan sebesar Rp27.381.313.770,48 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00. Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 disajikan berdasarkan jenis beban, sedangkan pada Tahun 2025 spesifik pada akun Beban Barang dan Jasa BOSP.

5.4.2.1.8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		12.829.911.711,00	108.395.818,00

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp12.829.911.711,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.721.515.893,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp108.395.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.45
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	PEGATAN 1	965.894.066,00	27.383.709,00	938.510.357,00
2	PEGATAN 2	769.799.788,00	0,00	769.799.788,00
3	MENDAWAI	954.918.502,00	9.676.991,00	945.241.511,00
4	BAUN BANGO	822.309.182,00	9.881.654,00	812.427.528,00
5	PETAK BAHANDANG	858.102.728,00	0,00	858.102.728,00
6	KASONGAN	694.976.740,00	21.926.019,00	673.050.721,00
7	KASONGAN 2	553.564.546,00	0,00	553.564.546,00
8	KERENG PANGI	774.801.743,00	0,00	774.801.743,00
9	PENDAHARA	732.258.736,00	0,00	732.258.736,00
10	BUNTUT BALI	687.029.331,00	0,00	687.029.331,00
11	TUMBANG SAMBA	952.092.000,00	0,00	952.092.000,00
12	TUMBANG KAMAN	710.670.940,00	26.568.998,00	684.101.942,00
13	BARAOI	731.413.876,00	0,00	731.413.876,00
14	HIRAN	800.852.467,00	0,00	800.852.467,00
15	SANAMANG	995.006.651,00	0,00	995.006.651,00
16	KAJAMEI	826.220.415,00	12.958.447,00	813.261.968,00
Jumlah		12.829.911.711,00	108.395.818,00	12.721.515.893,00

5.4.2.1.9	Beban Barang dan Jasa BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		14.294.805.250,67	2.366.327.363,10

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp14.294.805.250,67 mengalami kenaikan sebesar Rp11.928.477.887,57 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.366.327.363,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.46
Beban Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	14.294.805.250,67	2.366.327.363,10	11.928.477.887,57
Jumlah		14.294.805.250,67	2.366.327.363,10	11.928.477.887,57



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.2.1.10 Beban Subsidi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

1.093.601.700,00

2.536.412.800,00

Beban Subsidi

merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp1.093.601.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.442.811.100,00 dari realisasi subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp2.536.412.800,00. Beban Subsidi Tahun 2025 merupakan realisasi atas Beban Subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.286.412.800,00 dan pemberian subsidi melalui kegiatan pasar murah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp1.250.000.000,00.

5.4.2.1.11 Beban Hibah

31 Desember 2025

31 Desember 2024

29.829.178.078,10

78.042.667.295,06

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah swasta, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp29.829.178.078,10 mengalami penurunan sebesar Rp48.213.489.216,96 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp78.042.667.295,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.47
Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	28.598.557.839,48	(27.398.557.839,48)
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah daerah lainnya	0,00	54.284.880,00	(54.284.880,00)
3	Beban Hibah Kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan	27.312.448.078,10	22.332.145.341,14	4.980.302.736,96
4	Beban Hibah Dana BOS	0,00	25.852.859.234,44	(25.852.859.234,44)
5	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.316.730.000,00	1.204.820.000,00	111.910.000,00
Jumlah		29.829.178.078,10	78.042.667.295,06	(48.213.489.216,96)

Tabel 5.4.48
Beban Hibah berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	3.175.250.833,04	29.689.371.134,44	(26.514.120.301,40)
2	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	552.426.880,00	(52.426.880,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	547.612.160,06	1.210.992.233,34	(663.380.073,28)
4	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	6.395.704.433,00	3.937.214.672,00	2.458.489.761,00
5	Sekretariat Daerah	11.516.151.100,00	12.391.858.000,00	(875.706.900,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	80.530.500,00	338.841.107,14	(258.310.607,14)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.491.330.000,00	28.604.791.200,00	(25.113.461.200,00)
8	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	0,00	536.565.480,00	(536.565.480,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	744.393.300,00	0,00	744.393.300,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	651.000.126,14	(651.000.126,14)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250.000.000,00	129.606.462,00	120.393.538,00
12	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2.037.940.040,00	0,00	2.037.940.040,00
13	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. dan Perdagangan	420.753.247,00	0,00	420.753.247,00
14	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	669.512.465,00	0,00	669.512.465,00
Jumlah		29.829.178.078,10	78.042.667.295,06	(48.213.489.216,96)

Terdapat selisih antara Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA sebesar Rp7.381.631.687.90 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.49
Selisih Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Beban Hibah – LO	29.829.178.078,10
Belanja Hibah – LRA	37.210.809.766,00
Selisih LO – LRA	(7.381.631.687,90)
Penjelasan Selisih:	
Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Persediaan dan Pengakuan Persediaan dari Utang Belanja	(8.104.366.081,00)
Penghapusan akibat Pemberian hibah kepada MUI Kab. Katingan.	547.612.160,06
Penyesuaian Saldo Akhir pada Dinas Perhubungan dan Perikanan atas pembuatan kolam ikan	(56.155.300,00)
Hibah Tanah pada Dinas Pendidikan berupa lapangan sepak bola ke SDN 1 Padang Makmur Kecamatan Katingan Kuala	231.277.533,04
Jumlah Penjelasan Selisih	(7.381.631.687,90)

5.4.2.1.12 Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.758.229.458,00	2.440.000.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp1.758.229.458,00 mengalami penurunan sebesar Rp681.770.542,00 dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp2.440.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.50
Beban Bantuan Sosial - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	1.680.000.000,00	(1.680.000.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga	686.229.458,00	532.000.000,00	154.229.458,00
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000,00	180.000.000,00	820.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah	72.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00
	Jumlah	1.758.229.458,00	2.440.000.000,00	(681.770.542,00)

Tabel 5.4.51
Beban Bantuan Sosial – LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.000.000.000,00	180.000.000,00	820.000.000,00
2	Dinas Sosial	437.500.000,00	580.000.000,00	(142.500.000,00)
3	Sekretariat Daerah	0,00	1.680.000.000,00	(1.680.000.000,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	320.729.458,00	0,00	320.729.458,00
	Jumlah	1.758.229.458,00	2.440.000.000,00	(681.770.542,00)

5.4.2.1.13	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		8.428.660.509,19	597.947.170,79

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp8.428.660.509,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.52
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.992.435.165,62	633.174.418,61	5.359.260.747,01
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.450.001,00	1.750.000,00	2.700.001,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	990.000,00	(36.977.247,82)	37.967.247,82
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.430.785.342,57	0,00	2.430.785.342,57
Jumlah	8.428.660.509,19	597.947.170,79	7.830.713.338,40

Tabel 5.4.53
Beban Penyisihan Piutang Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	0,00	(36.977.247,82)	36.977.247,82
2	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.440.001,00	1.750.000,00	3.690.001,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.430.785.342,57	0,00	2.430.785.342,57



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Badan Pendapatan Daerah	5.992.435.165,62	633.174.418,61	5.359.260.747,01
	Jumlah	8.428.660.509,19	597.947.170,79	7.830.713.338,40

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
201.101.059.202,14	191.625.025.498,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp201.101.059.202,14 mengalami kenaikan sebesar Rp9.476.033.703,62 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp191.625.025.498,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.54
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.348.484.441,48	62.727.303.485,53	2.621.180.955,95
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.409.663.307,13	27.368.750.988,27	2.040.912.318,86
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.946.704.621,03	101.072.557.942,22	4.874.146.678,81
Beban Penyusutan Aset Lainnya	396.206.832,50	456.413.082,50	(60.206.250,00)
Jumlah	201.101.059.202,14	191.625.025.498,52	9.476.033.703,62

Tabel 5.4.55
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	19.264.345.821,97	19.782.164.801,24	(517.818.979,27)
2	Dinas Kesehatan	39.118.584.038,31	35.635.322.403,72	3.483.261.634,59
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.384.358.419,89	81.417.225.593,71	4.967.132.826,18
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	15.424.230.878,68	15.606.325.066,84	(182.094.188,16)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.516.714.515,47	2.521.453.440,60	(4.738.925,13)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.565.802.171,59	2.105.594.643,06	(539.792.471,47)
7	Dinas Sosial	455.895.767,04	444.802.687,24	11.093.079,80
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.199.977.069,46	5.175.526.658,36	24.450.411,10
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	464.185.643,45	583.382.332,79	(119.196.689,34)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.062.743.971,47	2.608.325.194,25	454.418.777,22
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	526.833.330,83	277.506.536,01	249.326.794,82
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	338.574.990,48	302.087.993,09	36.486.997,39
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2.899.839.197,86	2.830.412.570,15	69.426.627,71
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	503.492.219,23	515.426.516,81	(11.934.297,58)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.088.200.015,95	1.071.776.186,16	16.423.829,79
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.118.684.193,55	920.810.349,84	197.873.843,71
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.589.528.358,98	1.622.191.905,22	(32.663.546,24)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.079.989.047,74	1.267.466.775,41	(187.477.727,67)
19	Sekretariat Daerah	4.250.233.855,69	4.188.575.644,94	61.658.210,75
20	Inspektorat Daerah	730.706.628,49	537.278.631,04	193.427.997,45
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	914.685.576,65	776.734.288,01	137.951.288,64
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.016.502.740,39	4.502.919.103,96	513.583.636,43
23	Badan Pendapatan Daerah	1.301.121.499,73	1.264.775.852,80	36.345.646,93
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.052.003.723,32	837.604.513,40	214.399.209,92
25	Sekretariat DPRD	1.620.765.259,15	1.765.189.202,08	(144.423.942,93)
26	Kecamatan Katingan Kuala	458.721.272,42	407.516.372,38	51.204.900,04
27	Kecamatan Mendawai	92.896.477,67	75.995.477,68	16.900.999,99
28	Kecamatan Kamipang	212.161.405,47	192.426.169,37	19.735.236,10
29	Kecamatan Tasik Payawan	59.502.819,30	59.332.824,27	169.995,03
30	Kecamatan Katingan Hilir	536.540.698,06	460.086.227,24	76.454.470,82



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	434.818.978,27	391.694.547,01	43.124.431,26
32	Kecamatan Pulau Malan	103.658.114,77	91.433.114,76	12.225.000,01
33	Kecamatan Katingan Tengah	327.999.323,25	326.310.858,41	1.688.464,84
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	307.079.390,30	148.388.844,28	158.690.546,02
35	Kecamatan Marikit	207.060.885,42	76.167.214,00	130.893.671,42
36	Kecamatan Katingan Hulu	352.724.156,47	337.279.232,48	15.444.923,99
37	Kecamatan Petak Malai	129.947.722,50	145.655.508,22	(15.707.785,72)
38	Kecamatan Bukit Raya	103.816.350,17	90.281.635,91	13.534.714,26
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	286.132.672,70	261.578.581,78	24.554.090,92
	Jumlah	201.101.059.202,14	191.625.025.498,52	9.476.033.703,62

5.4.2.2.1	Beban Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Peralatan dan Mesin	65.348.484.441,48	62.727.303.485,53

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp65.348.484.441,48 mengalami kenaikan sebesar Rp2.621.180.955,95 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp62.727.303.485,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.56
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.376.666.647,84	996.189.877,99	380.476.769,85
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	11.475.408.912,66	11.076.852.031,87	398.556.880,79
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	834.544.422,65	903.015.030,71	(68.470.608,06)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	367.750.043,25	472.627.660,50	(104.877.617,25)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.985.693.059,27	10.274.790.652,53	1.710.902.406,74
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.122.456.218,12	2.701.453.038,97	(578.996.820,85)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.688.132.683,70	20.282.738.800,10	1.405.393.883,60



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.174.731.015,26	2.775.469.887,41	399.261.127,85
9	Beban Penyusutan	178.022.196,54	183.517.997,82	(5.495.801,28)
10	Beban Penyusutan Komputer	11.074.443.291,55	12.061.442.295,89	(986.999.004,34)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
12	Beban Penyusutan Alat Produksi. Pengolahan dan Pemurnian	67.582.566,66	67.522.566,67	59.999,99
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	285.088.063,36	241.740.416,61	43.347.646,75
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	34.905.467,00	28.368.037,00	6.537.430,00
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.670.625,00	1.670.625,00	0,00
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	530.841.495,23	514.775.983,23	16.065.512,00
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	149.347.733,39	143.928.583,23	5.419.150,16
	Jumlah	65.348.484.441,48	62.727.303.485,53	2.621.180.955,95

Tabel 5.4.57

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	10.228.982.142,68	11.257.180.103,12	(1.028.197.960,44)
2	Dinas Kesehatan	17.177.826.609,15	16.400.954.145,47	776.872.463,68
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	13.719.819.357,08	12.646.724.226,23	1.073.095.130,85
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.213.486.088,37	1.037.925.327,08	175.560.761,29
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	609.969.931,11	566.950.316,79	43.019.614,32
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.148.572.662,06	2.146.327.257,09	2.245.404,97
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.453.255.443,73	2.016.962.042,66	(563.706.598,93)
8	Dinas Sosial	165.276.069,66	239.475.227,70	(74.199.158,04)
9	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	466.289.529,98	444.728.893,57	21.560.636,41



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	270.323.529,94	396.496.219,28	(126.172.689,34)
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.439.312.103,93	1.751.231.176,80	688.080.927,13
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	424.990.332,99	186.689.438,17	238.300.894,82
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227.326.148,09	197.818.648,11	29.507.499,98
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.620.754.133,02	1.537.042.552,84	83.711.580,18
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	355.895.186,55	369.532.062,03	(13.636.875,48)
16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	274.130.825,00	260.074.674,99	14.056.150,01
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	770.445.514,25	664.839.769,40	105.605.744,85
18	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	391.497.130,75	434.669.297,39	(43.172.166,64)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	359.307.991,61	343.705.398,06	15.602.593,55
20	Sekretariat Daerah	2.058.814.973,64	1.965.595.668,68	93.219.304,96
21	Inspektorat Daerah	439.583.305,22	279.068.395,21	160.514.910,01
22	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	590.827.780,75	500.821.698,57	90.006.082,18
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.551.279.006,33	3.174.148.140,28	377.130.866,05
24	Badan Pendapatan Daerah	796.432.516,97	763.591.621,23	32.840.895,74
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	845.338.142,20	562.343.567,26	282.994.574,94
26	Sekretariat DPRD	944.895.830,88	1.090.456.742,82	(145.560.911,94)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
27	Kecamatan Katingan Kuala	48.326.500,02	53.656.499,98	(5.329.999,96)
28	Kecamatan Mendawai	58.237.571,42	41.336.571,43	16.900.999,99
29	Kecamatan Kamipang	138.504.643,42	123.743.029,14	14.761.614,28
30	Kecamatan Tasik Payawan	38.406.319,30	38.236.324,27	169.995,03
31	Kecamatan Katingan Hilir	248.645.345,43	226.702.863,49	21.942.481,94
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	177.971.270,47	160.691.255,14	17.280.015,33
33	Kecamatan Pulau Malan	81.163.857,15	68.938.857,14	12.225.000,01
34	Kecamatan Katingan Tengah	134.685.248,09	139.980.533,81	(5.295.285,72)
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	199.731.572,30	128.655.026,28	71.076.546,02
36	Kecamatan Marikit	192.493.921,42	61.600.250,00	130.893.671,42
37	Kecamatan Katingan Hulu	118.727.866,34	104.170.652,36	14.557.213,98
38	Kecamatan Petak Malai	54.813.958,57	70.521.744,29	(15.707.785,72)
39	Kecamatan Bukit Raya	84.313.142,84	70.778.428,58	13.534.714,26
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	227.830.938,77	202.938.838,79	24.892.099,98
	Jumlah	65.348.484.441,48	62.727.303.485,53	2.621.180.955,95

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

29.409.663.307,13

27.368.750.988,27

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp29.409.663.307,13 mengalami kenaikan sebesar Rp2.040.912.318,86 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27.368.750.988,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.58
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	28.820.653.650,87	26.915.603.576,13	1.905.050.074,74
2	Beban Penyusutan Monumen	0,00	58.589.365,85	(58.589.365,85)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	74.212.864,01	74.212.864,01	0,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	514.796.792,25	320.345.182,28	194.451.609,97
	Jumlah	29.409.663.307,13	27.368.750.988,27	2.040.912.318,86



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	8.933.279.640,03	8.416.045.408,38	517.246.250,03
2	Dinas Kesehatan	6.271.721.062,55	5.335.882.653,83	935.838.408,72
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	918.907.850,77	623.789.632,59	295.118.218,18
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.366.139,80	380.436.476,32	(9.070.336,52)
5	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.370.707.055,05	2.381.966.673,55	(11.259.618,50)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	360.477.016,49	344.691.806,27	15.785.210,22
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.051.048,29	82.264.625,40	12.786.422,89
8	Dinas Sosial	263.236.994,43	178.130.794,43	85.106.200,00
9	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	791.696.339,34	787.077.329,77	4.619.009,57
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.189.533,51	168.213.533,51	6.976.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	479.375.695,85	521.533.035,65	(42.157.339,80)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.155.898,24	81.155.898,24	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	111.248.842,39	104.269.344,98	6.979.497,41
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.068.643.621,18	1.076.060.052,00	(7.416.430,82)
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	129.042.618,84	122.832.282,83	6.210.336,01
16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	807.364.000,97	805.263.466,88	2.100.534,09
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.406.470,19	157.406.470,19	0,00
18	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	955.020.036,16	949.560.547,76	5.459.488,40
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	562.414.274,32	557.085.081,38	5.329.192,94
20	Sekretariat Daerah	1.972.548.753,43	1.995.538.092,46	(22.989.339,03)
21	Inspektorat Daerah	176.199.030,07	143.011.402,00	33.187.628,07
22	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	259.923.341,80	259.923.341,79	0,01
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	314.621.043,11	270.873.484,74	43.747.558,37



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
24	Badan Pendapatan Daerah	398.782.622,10	345.971.748,93	52.810.873,17
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	139.151.315,08	139.151.315,08	0,00
26	Sekretariat DPRD	482.115.667,03	479.467.298,03	2.648.369,00
27	Kecamatan Katingan Kuala	107.987.677,40	107.987.677,40	0,00
28	Kecamatan Mendawai	34.138.906,25	34.138.906,25	0,00
29	Kecamatan Kamipang	72.805.643,33	67.860.643,32	4.945.000,01
30	Kecamatan Tasik Payawan	21.096.500,00	21.096.500,00	0,00
31	Kecamatan Katingan Hilir	104.934.564,17	100.456.575,29	4.477.988,88
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	56.635.897,10	55.346.481,17	1.289.415,93
33	Kecamatan Pulau Malan	22.494.257,62	22.494.257,62	0,00
34	Kecamatan Katingan Tengah	51.406.710,00	47.864.910,00	3.541.800,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	107.347.818,00	19.733.818,00	87.614.000,00
36	Kecamatan Marikit	14.441.964,00	14.441.964,00	0,00
37	Kecamatan Katingan Hulu	20.585.175,24	20.585.175,23	0,01
38	Kecamatan Petak Malai	73.427.163,93	73.427.163,93	0,00
39	Kecamatan Bukit Raya	18.503.207,33	18.503.207,33	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.211.911,74	57.211.911,74	0,00
Jumlah		29.409.663.307,13	27.368.750.988,27	2.040.912.318,86

5.4.2.2.3

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2025

105.946.704.621,03

31 Desember 2024

101.072.557.942,22

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp105.946.704.621,03 mengalami kenaikan sebesar Rp4.874.146.678,81 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp101.072.557.942,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.60
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94.962.584.595,39	90.740.198.375,39	4.222.386.220,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	5.858.035.129,72	5.705.395.048,97	152.896.623,17
3	Beban Penyusutan Instalasi	2.567.782.069,95	2.190.334.415,33	377.447.654,62



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.558.302.825,97	2.436.630.102,53	121.672.723,44
	Jumlah	105.946.704.621,03	101.072.557.942,22	4.874.146.678,81

Tabel 5.4.61
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	101.807.539,26	108.662.789,74	(6.855.250,48)
2	Dinas Kesehatan	1.030.309.158,76	627.971.745,60	402.337.413,16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.799.506.191,72	79.976.451.290,31	4.823.054.901,41
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman serta Pertanahan	12.443.553.892,52	12.646.183.076,50	(202.629.183,98)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.664.836,92	30.434.377,24	(22.769.540,32)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.495.679,57	6.367.975,00	11.127.704,57
7	Dinas Sosial	27.382.702,95	27.196.665,11	186.037,84
8	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.941.991.200,14	3.943.720.435,02	(1.729.234,88)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.672.580,00	18.672.580,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	119.131.171,69	310.635.981,80	(191.504.810,11)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.599.599,60	9.661.199,60	(61.600,00)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	134.353.943,66	141.222.465,31	(6.868.521,65)
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	18.554.413,84	23.062.171,95	(4.507.758,11)
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.705.189,98	6.438.044,29	267.145,69
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	190.832.209,11	98.564.110,25	92.268.098,86
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	183.031.192,07	177.982.060,07	5.049.132,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	158.266.781,81	366.676.295,97	(208.409.514,16)
19	Sekretariat Daerah	218.870.128,62	221.191.883,80	(2.321.755,18)
20	Inspektorat Daerah	114.924.293,20	115.198.833,83	(274.540,63)
21	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	15.734.454,10	15.989.247,65	254.793,55
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.139.352.690,95	1.002.953.728,94	136.398.962,01
23	Badan Pendapatan Daerah	3.056.360,66	3.962.482,64	(906.121,98)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.710.183,54	90.793.048,56	(81.082.865,02)
25	Sekretariat DPRD	190.007.511,24	191.518.911,23	(1.511.399,99)
26	Kecamatan Katingan Kuala	302.407.095,00	245.872.195,00	56.534.900,00
27	Kecamatan Mendawai	520.000,00	520.000,00	0,00
28	Kecamatan Kamipang	851.118,72	822.496,91	28.621,81
30	Kecamatan Katingan Hilir	182.960.788,46	132.926.788,46	50.034.000,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	200.211.810,70	175.656.810,70	24.555.000,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	141.907.365,16	138.465.414,60	3.441.950,56
35	Kecamatan Marikit	125.000,00	125.000,00	0,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	213.411.114,89	212.523.404,89	887.710,00
37	Kecamatan Petak Malai	1.706.600,00	1.706.600,00	0,00
38	Kecamatan Bukit Raya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.089.822,19	1.427.831,25	(338.009,06)
Jumlah		105.946.704.621,03	101.072.557.942,22	4.874.146.478,81

5.4.2.2.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025

31 Desember 2024

396.206.832,50

456.413.082,50

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp396.206.832.50 mengalami penurunan sebesar Rp60.206.250.00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp456.413.082.50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.62
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Berdasarkan SKPD

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	276.500,00	276.500,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	22.412.500,00	(22.412.500,00)
3	Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	11.225.000,00	(11.225.000,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.087.500,00	0,00	11.087.500,00
6	Dinas Perhubungan dan Perikanan	76.087.500,00	76.087.500,00	0,00
7	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	59.980.000,00	59.980.000,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
9	Sekretariat DPRD	3.746.250,00	3.746.250,00	0,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.250.000,00	54.943.750,00	(43.693.750,00)
11	Badan Pendapatan Daerah	102.850.000,00	151.250.000,00	(48.400.000,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	48.200.000,00	0,00	48.200.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.804.082,50	45.316.582,50	12.487.500,00
JUMLAH		396.206.832,50	456.413.082,50	(60.206.250,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.2.3	Beban Transfer	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		91.719.208.365,40	107.597.541.937,30

Beban Transfer TA 2025 sebesar Rp91.719.208.365,40 mengalami kenaikan sebesar Rp15.878.333.571,90 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp107.735.215.429,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.63
Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bagi Hasil	7.499.999.988,00	6.446.126.714,70	1.053.873.273,30
Beban Bantuan Keuangan	84.219.208.377,40	101.151.415.222,60	(16.932.206.845,20)
Jumlah	91.719.208.365,40	107.597.541.937,30	(15.878.333.571,90)

5.4.2.3.1	Beban Bagi Hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		7.499.999.988,00	6.446.126.714,70

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp7.499.999.988,00 merupakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.053.873.273,30 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.446.126.714,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.64
Beban Bagi Hasil - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	4.999.999.993,25	4.973.382.942,25	26.617.051,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	2.499.999.994,75	1.472.743.772,45	1.027.256.222,30
Jumlah	7.499.999.988,00	6.446.126.714,70	1.053.873.273,30

5.4.2.3.2	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		84.219.208.377,40	101.151.415.222,60

Beban Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp84.219.208.377,40 mengalami penurunan sebesar Rp16.932.206.845,20 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp101.151.415.222,60. Beban Transfer bantuan Keuangan terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan ke Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.65
Beban Bantuan Keuangan - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	245.000.000,00	(245.000.000,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	84.219.208.377,40	100.906.415.222,60	(16.687.206.845,20)
JUMLAH	84.219.208.377,40	101.151.415.222,60	(16.932.206.845,20)

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA sebesar Rp139.260.433.938,60 penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.66
selisih antara Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Beban Bantuan Keuangan – LO	84.219.208.377,40
Belanja Bantuan Keuangan – LRA	223.479.642.316,00
Selisih LO – LRA	(139.260.433.938,60)
Penjelasan Selisih:	
Transfer Dana Desa yang tidak diakui dalam LO	(125.810.534.516,00)
Penghitungan ulang atas kekurangan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang tidak teranggarkan pada tahun 2024	(13.449.899.422,60)
Jumlah Penjelasan Selisih	(139.260.433.938,60)

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	291.942.800,00	1.605.409.963,00

Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp291.942.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.313.467.163,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.605.409.963,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.66
Beban Tidak Terduga – LO
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Tidak Terduga	291.942.800,00	1.605.409.963,00	(1.313.467.163,00)
Jumlah	291.942.800,00	1.605.409.963,00	(1.313.467.163,00)

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	32.161.296.916,65	81.863.193.672,29

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasi diperoleh surplus perhitungan sebesar Rp32.161.296.916,65 dimana selisih dari Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp1.202.276.471.190,75 dengan Beban Operasi Laporan Operasional tahun 2025 sebesar Rp1.170.115.174.274,10.

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(4.485.899.002,90)	(114.359.311,59)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 adalah defisit sebesar Rp4.485.899.002,90 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.67
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	993.722.633,94	(993.722.633,94)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(4.485.899.002,90)	(1.108.081.945,53)	3.377.817.057,37)
JUMLAH	(4.485.899.002,90)	(114.359.311,59)	(4.371.539.691,31)

5.4.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	993.722.633,94

Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.4.2	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		4.485.899.002,90	1.108.081.945,53

Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2025 sebesar Rp4.485.899.002,90 merupakan defisit atas penghapusan Aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.68
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	Keterangan Aset 2025	Nilai	Keterangan Aset 2024	Nilai
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor	78.374.342,87	Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang-LO	276.138.725,57
Dinas Kesehatan	Reklas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	850.000,00		
	Reklas Bangunan Gedung	399.617.576,00		
	Reklas Bangunan Kesehatan	644.622.772,19		
	Reklas Rumah Negara Golongan II	183.220.000,00		
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang	29.600.000,00		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Reklas Bangunan Gedung Kantor	2.511.909.912,00		
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	272.851.800,00		
Dinas Perhubungan dan Perikanan	Penghapusan Bangunan	145.433.803,20		
	Penghapusan Bangunan Pelabuhan	176.962.975,22		



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Perangkat Daerah	Keterangan Aset 2025	Nilai	Keterangan Aset 2024	Nilai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	14.142.857,14		
	penghapusan aset lainnya kendaraan beroda dua satpol pp (2 unit)	28.312.964,28		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			383.298.000,00
Dinas Pendidikan	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			1.104.000,00
Inspektorat	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			119.259.147,84
Kecamatan Katingan Tengah	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			190.112.072,12
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			66.170.000,00
Sekretariat Daerah	Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO			72.000.000,00
JUMLAH		4.485.899.002,90		1.108.081.945,53

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.6 Surplus/Defisit – LO

31 Desember 2025 31 Desember 2024

27.675.397.913,75 81.748.834.360,70

Perhitungan akhir Laporan Operasional tahun 2025 mengalami Surplus sebesar Rp27.675.397.913,75.

Pendapatan	1.202.276.471.190,75
Beban	1.170.115.174.274,10
Surplus/Defisit Dari Operasi – LO	32.161.296.916,65
Kegiatan Non Operasional	
Surplus non Operasional	0,00
Defisit non Operasional	4.485.899.002,90
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(4.485.899.002,90)
Pos Luar biasa	0,00
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa	27.675.397.913,75
Surplus/Defisit- LO	27.675.397.913,75



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris, dengan uraian sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
200.684.042.817,25	371.162.217.627,23

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp200.684.042.817,25 yang merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.314.958.138.351,87 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.114.274.095.534,62.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.314.958.138.351,87	1.584.111.042.311,46

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.314.958.138.351,87 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.69
Arus Kas Masuk

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	46.173.447.562,30	22.060.219.369,80
Penerimaan Retribusi Daerah	34.507.972.802,00	8.184.315.989,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.428.321.792,77	4.579.510.360,83
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.785.197.578,10	32.256.551.451,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	186.190.613.100,00	332.285.338.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	644.050.930.713,00	672.273.960.026,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	82.775.069.237,00	186.604.733.257,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	130.569.284.446,00	126.733.032.185,00
Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	5.890.545.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	45.174.096.839,00	52.166.886.132,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	798.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	482.852.580,00	378.281.230,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	9.211.817.185,70	7.683.649.310,00
Penerimaan Dana Desa	125.810.534.516,00	133.014.020.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.314.958.138.351,87	1.584.111.042.311,46

5.5.1.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.114.274.095.534,62	1.212.948.824.684,23

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.114.274.095.534,62 diuraikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.70
Arus Kas Keluar

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	526.896.314.427,53	506.232.945.775,58
Belanja Barang dan Jasa	316.043.555.079,09	369.606.587.482,51
Belanja Subsidi	1.093.601.700,00	2.536.412.800,00
Belanja Hibah	37.210.809.766,00	103.297.956.459,44
Belanja Bantuan Sosial	1.758.229.458,00	2.507.849.689,00
Belanja Tak Terduga	291.942.800,00	1.605.409.963,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	223.479.642.316,00	220.470.535.800,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah	7.499.999.988,00	6.446.126.714,70
Jumlah Arus Keluar Kas	1.114.274.095.534,62	1.212.703.824.684,23

5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(251.016.313.484,72)	(373.107.440.225,24)

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar (Rp251.016.313.484,72) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp420.482.800,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp251.436.796.284,72

5.5.2.1	Arus Kas Masuk	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		420.482.800,00	1.088.070.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp420.482.800,00 yang diperoleh dari pelepasan/penjualan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.71
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Merk/Type	Harga Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang Telah Dibayarkan	Nama Pembeli	Keterangan
1	Yeengler/Trailer/Kendaraan Bermotor Roda 4 Wakil Ketua DPRD	Honda CR-V ALL New TC 1.5 CVT/ Prestige	121.543.200,00	Dijual Kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Katingan (Fahrul Razi)	Tercatat pada daftar BMD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Katingan
2	Yeengler/Trailer/Kendaraan Bermotor Roda 4 Wakil Ketua DPRD	Honda CR-V ALL New TC 1.5 CVT/ Prestige	143.370.800,00	Dijual Kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Katingan (Nanang Suryansyah)	Tercatat pada daftar BMD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Katingan
3	Sedan/ New CAMRY 2.5 V A/T	Toyota CAMRY 2.5 V A/T	155.568.800,00	Dijual Kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Katingan (Marwan Susanto)	
Jumlah			420.482.800,00		



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

5.5.2.2	Arus Kas Keluar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		251.436.796.284,72	374.195.510.225,24

Arus Kas Keluar dari

Aktivitas Investasi sebesar Rp251.436.796.284,72 merupakan realisasi Belanja Modal dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.72
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

(dalam rupiah)

Arus Kas Keluar	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Tanah	683.500.000,00	1.478.500.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	71.019.432.124,00	106.614.740.833,80
Perolehan Gedung dan Bangunan	111.725.356.633,99	160.277.154.014,83
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.448.604.554,73	105.242.194.176,61
Perolehan Aset Tetap Lainnya	465.602.972,00	235.131.200,00
Perolehan Aset Lainnya	94.300.000,00	347.790.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	251.436.796.284,72	374.195.510.225,24

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp0,00, merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp73.080.416.541,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp73.080.416.541,00.

5.5.3.1	Arus Kas Masuk	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		73.080.416.541,00	104.690.378.022,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp73.080.416.541,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.73
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	IWP	29.666.094.658,00
2	PPH 21	8.398.466.525,00
3	BPJS 1%	1.437.096.845,00
4	PPN	28.361.512.711,00
5	PPH PS 4 (2)	3.501.928.025,00
6	PPH 23	505.891.230,00
7	PPH 22	1.200.717.297,00
8	PPH 21	8.709.250,00
	JUMLAH	73.080.416.541,00

5.5.3.2	Arus Kas Keluar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		73.080.416.541,00	104.690.378.022,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp73.080.416.541,00 dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Tabel 5.4.74
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transistoris Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	IWP	29.666.094.658,00
2	PPH 21	8.398.466.525,00
3	BPJS 1%	1.437.096.845,00
4	PPN	28.361.512.711,00
5	PPH PS 4 (2)	3.501.928.025,00
6	PPH 23	505.891.230,00
7	PPH 22	1.200.717.297,00
8	PPH 21	8.709.250,00
JUMLAH		73.080.416.541,00

5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(50,332,270,667,47)	(1,945,222,598,01)

Pada Tahun 2025 terdapat penurunan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar Rp50.332.270.667,47 yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi dan Transistoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.75
Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

Kenaikan/ Penurunan Kas		Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
a	Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	200.684.042.817,25	371.162.217.627,23
b	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(251.016.313.484,72)	(373.107.440.225,24)
c	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transistoris	0,00	0,00
Jumlah Kenaikan/ Penurunan Kas Tahun 2025		(50.332.270.667,47)	(1.945.222.598,01)

5.5.5 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.926.908.942,50	54.678.264.655,97

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp3.926.908.942,50 dan Rp54.678.264.655,97 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.76
Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	234.134.451,92	47.601.787.155,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	180.297.589,00	900,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	52.735.500,00
Kas di BLUD	12.881.789,09	3.168.405.006,63
Kas di Bendahara BOS	1.051.347.171,74	1.113.359.385,22
Kas di Bendahara FKTP	1.170.264.651,75	75.557.741,92
Kas Dana BOK Puskesmas	1.277.983.289,00	2.666.419.867,00
Saldo Akhir Kas	3.926.908.942,50	54.678.264.655,97

5.6 Penjelasan Akun – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.408.260.197.129,23	3.324.939.944.212,69

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.408.260.197.129,23 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2025.

Tabel 5.6.1
Ekuitas Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	450.479.900.102,65	406.459.108.617,46	44.020.791.485,19
2	Dinas Kesehatan	422.811.215.634,29	301.577.659.334,93	121.233.556.299,36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	983.288.784.508,65	936.757.068.268,48	46.531.716.240,17
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	264.832.617.448,46	258.840.097.100,15	5.992.520.348,31
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.401.396.240,13	5.009.253.350,91	392.142.889,22
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25.352.550.696,52	16.338.867.871,68	9.013.682.824,84
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.379.675.433,03	8.398.034.133,23	(1.018.358.700,20)
8	Dinas Sosial	11.906.495.437,62	11.417.934.891,43	488.560.546,19
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	65.696.682.431,94	69.268.760.820,15	(3.572.078.388,21)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.974.362.785,58	8.157.969.113,37	(183.606.327,79)
11	Dinas Lingkungan Hidup	35.176.811.240,53	34.485.853.064,62	690.958.175,91
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.339.583.774,14	5.467.842.146,86	871.741.627,28
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.059.554.557,31	5.206.411.009,43	853.143.547,88
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	63.689.731.789,68	65.361.368.406,69	(1.671.636.617,01)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.799.114.905,15	10.628.150.416,53	(829.035.511,38)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	38.952.431.904,38	38.902.148.090,54	50.283.813,84
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	63.386.626.140,79	59.211.128.144,01	4.175.497.996,78
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	55.232.664.244,56	52.586.865.353,40	2.645.798.891,16
19	Sekretariat Daerah	535.895.271.057,37	534.306.581.624,74	1.588.689.432,63
20	Sekretariat DPRD	27.773.400.968,52	28.441.978.796,60	(668.577.828,08)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.858.525.146,60	9.869.623.886,44	988.901.260,16
22	Kecamatan Katingan Kuala	9.382.065.913,13	9.142.398.106,95	239.667.806,18
23	Kecamatan Kamipang	3.477.688.734,05	3.197.461.797,71	280.226.936,34
24	Kecamatan Tasik Payawan	983.559.820,73	948.105.141,43	35.454.679,30
25	Kecamatan Katingan Hilir	6.580.128.632,14	6.215.944.600,45	364.184.031,69
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	5.227.847.263,68	4.674.878.833,69	552.968.429,99
27	Kecamatan Pulau Malan	1.852.506.141,84	1.803.098.256,60	49.407.885,24
28	Kecamatan Katingan Tengah	3.717.275.206,35	3.765.896.764,02	(48.621.557,67)
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.585.076.880,29	1.256.514.346,00	328.562.534,29
30	Kecamatan Marikit	1.280.416.341,71	1.276.685.127,14	3.731.214,57
31	Kecamatan Katingan Hulu	2.787.112.290,27	2.763.282.431,68	23.829.858,59
32	Kecamatan Mendawai	1.769.481.577,02	1.824.864.268,98	(55.382.691,96)
33	Kecamatan Bukit Raya	1.032.833.073,68	984.464.709,59	48.368.364,09
34	Kecamatan Petak Malai	3.462.985.980,22	3.574.388.184,87	(111.402.204,65)
35	Inspektorat Daerah	7.769.290.777,27	7.385.291.906,15	383.998.871,12
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.371.882.616,72	14.354.555.584,16	1.017.327.032,56



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	198.848.320.265,97	366.255.315.443,28	(167.406.995.177,31)
38	Badan Pendapatan Daerah	36.601.896.234,98	20.778.636.423,66	15.823.259.811,32
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.242.432.931,28	8.045.457.844,68	196.975.086,60
JUMLAH		3.408.260.197.129,23	3.324.939.944.212,69	83.320.252.916,54

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

27.675.397.913,75

81.748.834.360,70

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp27.675.397.913,75.

Tabel 5.6.2
Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	(337.361.840.635,60)	(243.594.594.132,98)	(93.767.246.502,62)
2	Dinas Kesehatan	(198.638.941.062,52)	(206.364.989.710,20)	7.726.048.647,68
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(79.881.635.994,81)	(105.889.018.914,11)	26.007.398.597,36
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(27.566.682.782,01)	(23.522.661.469,740)	(4.044.021.312,27)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(34.153.672.000,78)	(8.016.768.210,70)	(26.136.903.790,08)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(24.051.384.300,60)	(22.301.345.179,33)	(1.750.039.121,27)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.210.637.626,06)	(7.765.767.552,59)	(1.444.870.073,47)
8	Dinas Sosial	(7.350.452.713,24)	(6.785.674.084,04)	(564.778.629,20)
9	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(14.718.800.620,36)	(13.496.743.243,46)	(1.222.057.376,90)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(11.923.604.614,79)	(10.448.274.855,45)	(1.475.329.759,34)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(16.450.128.987,25)	(16.580.963.118,47)	130.834.131,22
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.511.482.769,01)	(5.556.396.680,83)	(955.086.088,18)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(7.421.624.392,09)	(6.529.356.330,48)	(892.268.061,61)
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(13.873.933.043,15)	(14.689.924.067,28)	(815.991.024,13)
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	(11.902.360.170,81)	(10.374.879.767,23)	(1.527.480.403,58)
16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perdagangan dan Perindustrian	(7.053.000.775,16)	(6.716.871.516,95)	(336.129.258,21)
17	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(12.551.959.001,22)	(15.597.577.884,98)	(3.045.618.883,76)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(14.873.526.627,41)	(12.983.214.858,74)	(1.890.311.768,67)
19	Sekretariat Daerah	(50.207.414.357,29)	(48.279.351.563,39)	(1.928.062.793,90)
20	Sekretariat DPRD	(46.433.862.458,08)	(43.884.148.084,02)	(2.549.714.374,06)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(7.877.685.803,84)	(6.553.312.983,55)	(1.324.372.820,29)
22	Kecamatan Katingan Kuala	(4.119.216.841,38)	(3.860.795.969,42)	(258.420.871,96)
23	Kecamatan Kamipang	(3.501.048.005,37)	(2.976.414.580,47)	(524.633.424,90)
24	Kecamatan Tasik Payawan	(3.053.216.451,27)	(2.827.495.266,30)	(225.721.184,97)
25	Kecamatan Katingan Hilir	(6.170.485.557,24)	(5.363.664.323,06)	(806.821.234,18)
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(4.585.549.415,01)	(3.579.313.751,27)	(1.006.235.663,74)
27	Kecamatan Pulau Malan	(3.534.502.459,76)	(3.341.423.450,77)	(193.079.008,99)
28	Kecamatan Katingan Tengah	(5.003.809.111,53)	(4.105.868.997,25)	(897.940.114,28)
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	(3.150.978.015,28)	(2.973.488.601,30)	(177.489.413,98)
30	Kecamatan Marikit	(2.631.869.535,00)	(2.687.663.686,42)	(55.794.151,42)
31	Kecamatan Katingan Hulu	(4.057.960.596,48)	(3.352.966.129,47)	(704.994.467,01)
32	Kecamatan Mendawai	(2.713.322.395,68)	(2.636.275.232,67)	(77.047.163,01)
33	Kecamatan Bukit Raya	(2.442.714.408,91)	(1.947.181.264,17)	(495.533.144,74)
34	Kecamatan Petak Malai	(2.443.016.395,22)	(1.960.362.862,50)	(482.653.532,72)
35	Inspektorat Daerah	(11.987.175.396,88)	(12.674.601.528,49)	(687.426.131,61)
36	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	(10.570.729.519,01)	(7.621.981.508,65)	(2.948.748.010,36)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.083.945.070.308,15	904.860.247.854,35	(179.084.822.453,80)
38	Badan Pendapatan Daerah	17.485.153.700,05	27.384.239.058,45	(9.899.085.358,40)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(9.701.164.807,40)	(6.727.757.638,32)	(2.973.407.169,08)
Jumlah		81.748.834.360,70	27.675.397.913,75	(54.073.436.446,95)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1	Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(1.088.231.235,72)	1.571.418.555,84

Koreksi Ekuitas Lainnya pada Tahun 2025 senilai Rp1.088.231.235,72 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. **Koreksi Kas Dana BOS (Rp419.085.946,00)**

Koreksi Kas Dana BOS merupakan koreksi atas saldo awal BOS Reguler SMPN sebesar Rp2.063.154,00 dan BOP PAUD sebesar Rp421.149.100,00 yang merupakan sisa saldo BOP PAUD Swasta pada Tahun 2024.

b. **Koreksi Utang Belanja Pegawai BLUD Rp76.088.027,07**

Koreksi untuk pengurangan saldo awal Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp76.088.027,07 yang disebabkan klaim dari BLUD yang tidak dapat diakui oleh BPJS atas hasil verifikasi



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp694.833.316,79)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disebabkan kesalahan atas perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMBADA dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi pada Dinas Lingkungan Hidup	133.200,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak pada Dinas Pendidikan	(75.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian pada Dinas Pendidikan	(280.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(2.110.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.649.600,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada dinas Pekerjaan Umum	126.146.316,16)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film pada Dinas Pendidikan	255.000,00
8	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer pada Dinas Pendidikan	(3.067.500,00)
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe pada Dinas Pendidikan	(202.500,00)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada Dinas Pendidikan	(1.800.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan pada Dinas Pendidikan	(1.655.400,01)
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinkes. PU. BPBD. DISKOP. BKAD. Sanaman Mantikei	(9.243.575,98)
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Dispota dan BKAD	(63.508.059,56)
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium pada Dinkes. DLH.	(43.733.371,18)
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan pada Dinkes. BLUD.	(81.233.478,71)
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pada Dinas Pemukiman serta Pertanahan	167.720,01
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing	533.525,52
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir pada Inspektorat	(97.782,44)
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Dinas Kesehatan	(1.348.480,00)
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III pada Dinas Kesehatan. Sekretariat Daerah. Badan Keuangan dan Asset Daerah	(9.066.313,09)
21	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744.617.070,21
22	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.339.232.453,03)
23	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota pada PTSP. Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(39.359.732,78)
24	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kec.Katingan Kuala	1.054.250,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai
25	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus pada Inspektorat	254.268,75
26	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa pada Kecamatan Katingan Tengah. Kecamatan Katingan Hulu	23.625.199,40
27	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.167.370,11
28	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan pada Dinas Kesehatan	1.687.126,02
29	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai pada Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(16.089.216,19)
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	9.978.900,00
Jumlah		(694.833.316,79)

- d. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp50.400.000,00)
Koreksi yang disebabkan kesalahan perhitungan pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Koreksi Amortisasi Aset tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan	(2.200.000,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan	(48.200.000,00)
Jumlah		(50.400.000,00)

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.434.847.363.807,26	3.408.260.197.129,23

Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp3.434.847.363.807,26 dan Rp3.408.260.197.129,23.



VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2025

6.1.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam pelaksanaan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memproses kerugian daerah.

Atas dasar Peraturan Bupati Katingan tersebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi melakukan beberapa kali pemanggilan dan persidangan terhadap beberapa orang terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dari proses pemanggilan dan pelaksanaan sidang yang telah dilakukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan dapat dihasilkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan terdapat pula beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan melakukan pembayaran atas kerugian Daerah tersebut kemudian akan dilakukan penghapusan beberapa item kerugian daerah dari daftar piutang daerah. telah dilaksanakan pula rekonsiliasi atas beberapa kasus Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya didukung dengan menyajikan bukti pendukung.

Adapun aktivitas Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Katingan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.1.1
Daftar Aktivitas TP/TGR
Kabupaten Katingan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama	Jumlah Kewajiban	Jumlah Pengembalian	Sisa Lebih/(Kurang)	Keterangan
1	YTK S MDS	64.115.000,00	37.057.500,00	(27.057.500,00)	Proses Angsuran
2	SY	129.118.151,00	0,00	(129.118.151,00)	Proses Lelang Jaminan
3	Rt (istri alm Dana)	31.547.677,00	0,00	0,00	Usul Penghapusan
4	Ys	1.415.694.683,00	0,00	0,00	Proses
5	ABD	609.473.003,00	0,00	(609.473.003,00)	Proses Sidang
6	IKL-M3/GB	237.000.000,00	13.000.000,00	224.000.000,00	Proses Angsuran



Untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang diterbitkan selama Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan sampai Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.1.2
Daftar Terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama	Saldo Awal/ Pengembalian di Tahun 2021	Jumlah Pengembalian s/d di Tahun 2021	Saldo	Keterangan
1	P	73.556.768,00	73.556.768,00	0,00	Usulan Proses Penghapusan
Jumlah		73.556.768,00	73.556.768,00	0,00	

6.2 Barang Ekstrakomptabel (*Extracomptable*)

Penerapan dari Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pencatatan barang-barang (selain barang persediaan) yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi dilakukan terpisah dengan pencatatan barang yang menjadi aset tetap daerah.

Pada tahun 2025 ini, barang-barang yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi, baik itu yang bersumber dari realisasi belanja tahun berkenaan maupun sumber-sumber lain dikeluarkan dari pencatatan/pembukuan aset tetap daerah dan dibukukan dalam daftar barang ekstrakomptabel (*Extracomptable*).

6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02

Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran (TA) 2021 disajikan bahwa, pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan yang diterima oleh satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Biaya Non Personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain, namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

6.4 Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 s.d Semester I 2025

Pada tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 s.d Semester 1 tahun 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, pada :

1. Kerja Sama Pemanfaatan BMD atas Aset Kabupaten Katingan Belum Sepenuhnya Memberikan hasil optimal. Pemanfaatan BMD berupa peralatan mesin, tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa dikenakan tarif pokok sewa yang merupakan nilai wajar atas sewa BMD berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai. Penilai yang dimaksud adalah penilai pemerintah atau penilai publik yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota yang diakui oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat beberapa objek sewa tanah dan/atau bangunan yang masih menerapkan tarif pokok sewa yang tidak berdasarkan hasil penilaian penilai namun berdasarkan tarif pada Perda, yaitu:
 - a. Sewa Kawasan industri rotan hampangan Aset Kawasan industri rotan hampangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja berlokasi di Kawasan Industri Hampangen, Jl. Sutomo Desa/Kelurahan Hampangen kecamatan Katingan Hilir. Aset semula dibangun dengan tujuan untuk menyediakan suatu Kawasan khusus yang mengakomodir kegiatan industri yang ada di Kabupaten Katingan. Aset tersebut disewakan kepada PT Harmoni Usaha Indonesia sejak tahun 2023 berdasarkan surat perjanjian nomor 530/485/DPTTK-III/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang diperpanjang dengan 500/496/DPTTK-III/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.
 - b. Sewa tanah kepada PT Arjuna Utama Sawit Aset dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan Perikanan berlokasi di Kereng Pakahi desa Jahanjang Kecamatan Kamipang. Aset tersebut disewakan kepada PT Arjuna Utama Sawit sejak tahun 2024 berdasarkan surat perjanjian nomor 550/471/Dishubkan-Um/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diperpanjang dengan nomor 500.11/429/DISHUBKAN-UM/2024 tanggal 16 Desember 2024.
 - c. Sewa tanah kepada PT Persada Era Agro Kencana Aset dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan Perikanan berlokasi di Kereng Pakahi Desa Jahanjang Kecamatan Kamipang. Aset tersebut disewakan kepada PT Persada Era Agro Kencana sejak tahun 2023 berdasarkan surat perjanjian nomor 550/269/Dishubkan-Um/2023 tanggal 22 Juni 2023 untuk jangka waktu lima tahun.
 - d. Sewa tanah Pelabuhan Ujung Tajur. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dibangun rumah-rumah penyewa dengan luasan melebihi luasan tanah yang ada pada perjanjian sewa. Keterangan Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan diketahui bahwa perjanjian dibuat tidak berdasarkan hasil pengukuran fisik lapangan namun lebih mengutamakan pengamanan aset tanah karena masyarakat sudah lebih dahulu bermukim di wilayah tersebut.



Secara umum, ketentuan mengenai tarif pokok sewa BMD di Kabupaten Katingan masih mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang didalamnya menetapkan tarif pokok sewa dengan tarif yang tetap untuk setiap jenis asetnya. Hal ini tidak selaras dengan Permendagri 7 Tahun 2024 khususnya pada pasal 118 ayat (1) yang mengatur bahwa perhitungan tarif pokok sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa dari hasil penilaian oleh Penilai.

2. Kegiatan Pengamanan Hukum BMD Belum Sepenuhnya Menjamin Keamanan BMD dari Tuntutan atau Gugatan Pihak Lain.

- a. Aset Tanah Pencadangan seluas 12.437.836m² senilai Rp422.675.072.453,43 pada Sekretariat Daerah tidak Didukung Bukti Kepemilikan yang Sah maupun Riwayat Tanah. Tanah tersebut belum dilakukan pengurangan/pemecahan pencatatan atas sebagian tanah yang lain juga tercatat pada Daftar BMD tanah, serta lokasi secara keseluruhan tidak dapat ditentukan secara pasti;
- b. Terdapat Aset Tanah berupa Kebun Raya yang tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup dengan total luas 826.031 m² senilai Rp4.647.531.675,00. Tanah dimaksud dicatat dengan rincian 6 Objek, sebagai berikut :
 - NIBAR 1619957 seluas 10.248 m² senilai Rp290.000.000,00;
 - NIBAR 567747 seluas 361.597 m² senilai Rp2.291.592.350,00;
 - NIBAR 567787 seluas 15.150 m² senilai Rp77.933.025,00;
 - NIBAR 563288 seluas 206.676 m² senilai Rp1.129.635.300,00;
 - NIBAR 563307 seluas 30.566 m² senilai Rp134.495.300,00;
 - NIBAR 568304 seluas 201.794 m² senilai Rp723.875.700,00.

Selanjutnya, berdasarkan overlay hasil pemetaan tanah yang dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan Disperkimtan dan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Katingan diketahui terdapat indikasi empat bidang tanah yang telah didaftarkan sebagai tanah milik masyarakat.

6.4.1 Perkembangan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 s.d Semester I 2025

1. Terkait pemanfaatan BMD oleh pihak lain belum didukung perikatan yang memadai, atas sewa tanah oleh PT Arjuna Utama Sawit, PT Persada Era Agro Kencana, dan Sewa tanah Pelabuhan Ujung Tajur yang tercatat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Dinas Perhubungan dan Perikanan, bahwa pada tahun 2026 pihak Dinas Perhubungan dan Perikanan telah melaksanakan koordinasi dan penilaian terhadap objek pemanfaatan aset tetap dalam bentuk sewa berupa tanah bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya melalui pejabat penilainya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dinas Perhubungan dan Perikanan akan melakukan proses perpanjangan sewa atas Pelabuhan Ujung Tajur dan untuk objek tanah yang disewa oleh PT Arjuna Utama Sawit.

Terkait aplikasi penatausahaan belum mendukung pembukuan barang milik daerah secara memadai, atas hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencatatan BMD secara komprehensif dari berbagai dokumen sumber.

Terkait pemanfaatan barang milik daerah atas aset Pemerintah Kabupaten Katingan belum sepenuhnya belum memberikan hasil yang optimal, atas hal tersebut Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Badan Pendapatan Daerah juga sedang menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha, saat ini sedang dilakukan koreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

2. Terkait proses Inventarisasi BMD belum dilaksanakan secara memadai untuk mendukung digitalisasi penatausahaan BMD (Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang berkoordinasi dengan KPKNL terkait mekanisme penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB).

Bahwa telah ditugaskan staff BKAD dalam rangka koordinasi terkait mekanisme penghapusan aset tak berwujud ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Palangka Raya berdasarkan surat tugas Nomor : 800.1.11.1/27/BKAD-5/2026 tanggal 27 Januari 2026 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghapusan aset tak berwujud perlu dilakukan dengan membentuk tim ahli dibidangnya untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi barang milik daerah tersebut dalam bentuk SK Kepala Daerah dengan melibatkan perangkat daerah selaku pengguna barang tersebut;
- b. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi BMD tersebut dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan ditandatangani oleh tim yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap tentang penghapusan BMD dimaksud, maka dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan, dibakar, dikubur, serta cara lisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, hasil koordinasi tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 000.2.4/318/BPKAD-5/2026 Tanggal 13 Maret 2026.



PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 yang disusun menjadi laporan Keuangan Tahunan. setelah melalui perhitungan yang terperinci dan *cross check* silang antara instansi-instansi terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diaudit. sehingga dengan demikian rakyat di daerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan. walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah. baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut. harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin dimana Laporan tersebut dapat kami susun menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 pada saatnya.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 beserta Laporan Keuangan diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun. kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada saatnya nanti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih.

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL